

**INOVASI PENDAMPING SEKOLAH LAPANG
DALAM PEMBANGUNAN DESA INKLUSIF DENGAN PRINSIP *NO
ONE LEFT BEHIND***

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan**



Disusun Oleh:

Tri Asmiyanto

21610021

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD”
YOGYAKARTA**

2025

PELAKSANAAN UJIAN
TESIS
INOVASI PENDAMPING SEKOLAH LAPANG
DALAM PEMBANGUNAN DESA INKLUSIF DENGAN PRINSIP *NO ONE*
LEFT BEHIND

Disusun Oleh:
Tri Asmiyanto
21610021

Diuji oleh Tim Penguji

Pada Tanggal : 8 Juni 2025

Susunan Tim Penguji

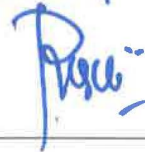
Pembimbing / Penguji I

Dr. Sugiyanto, M.M



Penguji II

Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A



Penguji III

Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat



Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Program Studi Ilmu Pemerintahan

Yogyakarta, 8 Juni 2025,

Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A



PENGESAHAN
TESIS
INOVASI PENDAMPING SEKOLAH LAPANG
DALAM PEMBANGUNAN DESA INKLUSIF DENGAN PRINSIP *NO ONE*
LEFT BEHIND

Disusun Oleh:
Tri Asmiyanto
21610021

Disahkan oleh Tim Penguji

Pada Tanggal : 8 Juni 2025

Susunan Tim Penguji

Pembimbing / Penguji I

Dr. Sugiyanto, M.M

Penguji II

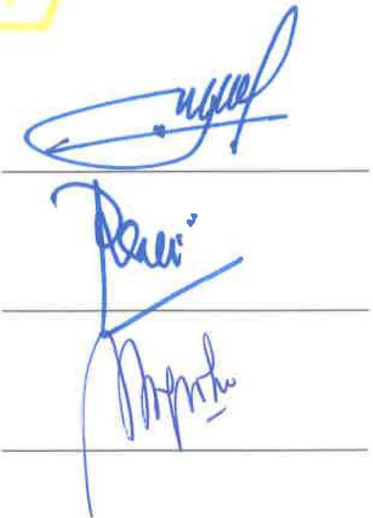
Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A

Penguji III

Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A



Yogyakarta, 8 Juni 2025,



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tri Asmiyanto

Nomor Mahasiswa : 21610021

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis berjudul INOVASI PENDAMPING SEKOLAH LAPANG DALAM PEMBANGUNAN DESA INKLUSIF DENGAN PRINSIP *NO ONE LEFT BEHIND* adalah betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 30 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



TRI ASMIYANTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan laporan ilmiah ini yang berjudul *“Inovasi Pendamping Sekolah Lapang dalam Mewujudkan Desa Inklusif dengan Prinsip No One Left Behind”*. Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari upaya akademik dan kepedulian sosial terhadap praktik pembangunan desa yang berkeadilan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Penulisan laporan ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Dosen Pembimbing dan Penguji I, Dr. Sugiyanto, MM.**, yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan konstruktif sepanjang proses penelitian hingga penyusunan laporan ini;
2. **Dosen Penguji II dan Dosen Penguji III, Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A., dan Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat**, yang telah memberikan wawasan keilmuan secara sistemik dan mencerahkan sehingga penelitian ini layak di pertanggungjawabkan secara akademik;
3. **Seluruh informan penelitian**, khususnya para pendamping Sekolah Lapang, Mas Rasyid Efendi, Mbak Ika, dan Mbak Salwa, Lurah Petir, Lurah Ngipak, dan Koordinator/Pengurus Sekolah Lapang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu serta masyarakat di

Kabupaten Gunungkidul yang telah bersedia meluangkan waktu, berbagi informasi, dan menjadi bagian penting dalam penelitian ini;

4. **Rekan-rekan dan sahabat seperjuangan**, yang telah memberikan dorongan moral, diskusi produktif, dan semangat kebersamaan dalam menapaki proses akademik ini;
5. **Civitas akademika Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakatat Desa “APMD” Yogyakarta Program Magister Ilmu Pemerintahan**, atas kesempatan dan dukungan selama proses perkuliahan dan penelitian berlangsung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi positif, baik secara akademik maupun praktis, terutama dalam mendukung implementasi pembangunan desa yang inklusif dan berkeadilan dengan prinsip *No One Left Behind*.

Yogyakarta, 30 Juni 2025

Penulis

Tri Asmiyanto

NIM. 21610021

MOTTO

(1)

“Bukan kekuasaan yang memerdekakan manusia, tapi pengetahuan yang menyadarkannya. Seperti kata Nelson Mandela, 'Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. “Maka belajarlah, dan ubahlah dunia dari desa yang kecil sekalipun.”

(2)

“Ketika segala hal dapat dicuri, hanya ilmu yang tetap menjadi milik sejati. Maka belajar bukanlah pilihan, tapi harapan. Sebab seperti kata Ki Hajar Dewantara, 'Dengan ilmu, kita dapat menjadi merdeka dalam berpikir, merdeka dalam berkehendak, dan merdeka dalam bertindak”

(3)

"Di dunia yang cepat berubah ini, kepemilikan hanyalah semu. Tapi ilmu? Ia abadi, tumbuh dalam pikiran dan hidup dalam tindakan. Ilmu bukan sekadar milik, tapi bekal; bukan sekadar hiasan, tapi arah.” Karena dalam kata-kata Carl Sagan:

'Di suatu tempat, sesuatu yang luar biasa sedang menunggu untuk diketahui.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya ilmiah ini kupersembahkan sebagai bentuk kecil dari pengabdian dan ikhtiar intelektual demi terwujudnya keadilan sosial dan pembangunan yang benar-benar inklusif.

Kupersembahkan karya ini untuk:

Allah SWT, Dzat yang Maha Mengetahui dan Maha Adil. Segala usaha dan ilmu ini tak akan berarti tanpa izin dan ridha-Mu. Semoga setiap kata dan langkah dalam karya ini menjadi bentuk ibadah yang Engkau terima.

Orang tuaku tercinta, yang telah menanamkan nilai-nilai kesederhanaan, tanggung jawab, dan keikhlasan dalam hidup. Doa kalian menjadi kekuatan dalam sunyi, cahaya dalam gelap. Semoga Allah membalas seluruh kebaikan dengan balasan terbaik di sisi-Nya.

Istriku tercinta, Qori Hanifah, S.Pd., pendamping dalam suka dan duka, yang selalu setia memberikan semangat di saat genting, dan menjadi penjaga hati dalam setiap ujian. Semoga Allah melimpahkan kebahagiaan dunia akhirat untukmu.

Anak-anakku tersayang, Ziulhaq Rusyd El Azmi, Qoimulhaq Shadr El Azmi, Azalfa Fajri El Azmi, penyemangat dalam diam, pemantik api perjuangan dalam dada. Semoga kelak kalian menjadi generasi pembawa kebaikan dan keadilan, yang tak gentar berpihak kepada yang lemah.

Semoga karya ini, meski sederhana, menjadi bagian dari upaya kolektif untuk mewujudkan desa yang tidak meninggalkan siapa pun—sebagaimana ajaran agama, bahwa keadilan adalah fondasi peradaban.

“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGUJIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRAC</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Kajian Literatur	8
C. Fokus Penelitian	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
F. Kerangka Konseptual	14
BAB II METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Lokasi dan Subyek Penelitian	43
C. Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknik Pemilihan Informan	47
F. Teknik Vaidasi Data	47
G. Teknik Analisis Data.....	49

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	54
A. Program Sekolah Lapang Desa Inklusi (SLDI).....	54
B. Profile Pendamping Sekolah Lapang	54
C. Lokasi dan Karakteristik Penelitian	57
1. Desa/Kalurahan Ngipak	57
2. Desa/Kaurahan Petir	67
D. Gambaran Inklusi Sosial Kalurahan	81
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	84
A. Inovasi Pendamping Sekolah Lapang dalam Mewujudkan Desa Inklusif	84
B. Strategi Pendamping Sekolah Lapang dalam Pemberdayaan dan Penjangkauan Kelompok Rentan.....	106
C. Tantangan Pendamping Sekolah Lapang dalam mewujudkan prinsip No One Left Behind Tantangan	117
D. Hubungan dengan Prinsip <i>No One Left Behind</i>	122
BAB V PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran	125
C. Kelemahan Penelitian.....	127
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel II-1. Sumber Data Informan <i>Indepht</i>	44
Tabel II-2. Sumber Data Dokument.....	46
Tabel III-1 Jumlah Penduduk Berdasar Kelompok Usia	59
Tabel III-2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan dan Mata Pencaharian.	60
Tabel III-3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	62
Tabel III-4 Jumlah Indikator Kesehatan.....	63
Tabel III-5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	64
Tabel III-6 Tingkat Kemiskinan.....	65
Tabel III-7 Daftar Pamong Kalurahan Ngipak.....	66
Tabel III-8 Jumlah Penduduk dan KK	69
Tabel III-9 Data Penduduk Kalurahan Petir Berdasarkan Pekerjaan atau Mata Pencaharian	69
Tabel III-10 Data Penduduk Kalurahan Petir Berdasarkan Kelompok Usia	71
Tabel III-11 Jenjang Pendidikan Masyarakat Kalurahan Petir	72
Tabel III-12 Data Penduduk Kalurahan Petir Berdasarkan Agama	74

Tabel III-13 Data Penduduk Kalurahan Petir berdasarkan Tingkat Kesejahteraan	76
Tabel III-14 Data Penduduk Kalurahan Petir berdasarkan Usia Tenaga Kerja	77
Tabel III-15 Lurah dan Pamong Kalurahan Petir-----	78
Tabel III-16 Badan Permusyawaratan Kalurahan Petir-----	80

INTISARI

Penelitian ini mengkaji peran inovasi, strategi fasilitasi, dan tantangan multidimensional yang dihadapi oleh pendamping Sekolah Lapang Desa Inklusif (SLDI) dalam mendorong implementasi prinsip *No One Left Behind* (NOLB) di tingkat desa. Studi ini dilakukan di Kalurahan Ngipak dan Petir, Kabupaten Gunungkidul, yang merepresentasikan karakteristik sosial-geografis yang kontras. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping menjalankan peran yang melampaui fungsi administratif. Mereka bertindak sebagai agen perubahan akar rumput yang digerakkan oleh empati dan pemahaman kontekstual, serta merancang inovasi inklusif yang berakar pada pengetahuan lokal dan praktik budaya. Inovasi tersebut mencakup berbagai dimensi—administratif, sosial, pedagogis, ekonomi, dan kelembagaan—dan mentransformasi ruang-ruang sosial warga menjadi arena inklusi yang bermakna. Strategi pemberdayaan yang digunakan bersifat relasional, adaptif, dan transformatif, dengan penekanan pada pembangunan kepercayaan, penciptaan ruang aman partisipatif, kolaborasi lintas sektor, serta pengarusutamaan nilai-nilai inklusif dalam sistem tata kelola desa. Namun demikian, para pendamping bekerja di tengah lanskap tantangan yang kompleks, yang mencakup hambatan struktural (minimnya dana fleksibel, lemahnya dukungan kelembagaan), hambatan kultural (eksklusi sosial, dominasi elite, rendahnya literasi inklusi), dan hambatan teknis (akses digital, keterbatasan infrastruktur). Berbagai hambatan ini menempatkan pendamping sebagai aktor mikro-politik yang menegosiasikan tuntutan warga dengan kenyataan institusional desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan desa inklusif tidak dapat bergantung pada kerangka regulatif semata, tetapi memerlukan fasilitasi sosial yang berkelanjutan, pendekatan yang berpusat pada manusia, dan dukungan sistemik. Pendamping SLDI menunjukkan bahwa praktik sosial sehari-hari di tingkat akar rumput mampu menerjemahkan prinsip NOLB dari wacana menjadi tindakan yang nyata dan bermakna dalam konteks pedesaan.

Kata kunci: Sekolah Lapang Desa Inklusif, pendamping desa, inovasi sosial, pemberdayaan partisipatif, kelompok rentan, No One Left Behind, pembangunan desa

ABSTRACT

This research investigates the roles of innovation, facilitation strategies, and the multidimensional challenges faced by facilitators of the Inclusive Village Learning School (Sekolah Lapang Desa Inklusif or SLDI) in promoting the implementation of the No One Left Behind (NOLB) principle at the village level. The study was conducted in Kalurahan Ngipak and Kalurahan Petir, Gunungkidul Regency, which represent contrasting socio-geographical settings. Employing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis, and were analyzed using Miles and Huberman's interactive model. The findings indicate that facilitators perform far beyond administrative functions. They act as grassroots change agents, driven by empathy and contextual awareness, who design inclusive innovations rooted in local knowledge and cultural practices. These innovations span various dimensions—administrative, social, pedagogical, economic, and institutional—and transform everyday community spaces into meaningful arenas of inclusion. Their strategies are relational, adaptive, and transformative, emphasizing trust-building, safe participatory environments, cross-sector collaboration, and the institutionalization of inclusive values within village governance systems. Nevertheless, facilitators operate within a challenging environment shaped by structural (limited funding, weak institutional support), cultural (social exclusion, elite domination, low awareness of inclusion), and technical (digital access, infrastructural limitations) constraints. These overlapping barriers require facilitators to negotiate between citizen demands and institutional realities, positioning them as micro-political actors within village power dynamics. In conclusion, inclusive development cannot rely solely on regulatory frameworks. It requires sustained social facilitation, human-centered approaches, and systemic support. Facilitators of SLDI demonstrate how daily grassroots practices can translate inclusion from discourse into action, making the NOLB principle tangible and meaningful in rural contexts.

Keywords: *Inclusive Village Learning School (Sekolah Lapang Desa Inklusif), village facilitator, social innovation, participatory empowerment, marginalized groups, No One Left Behind, rural development*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa memainkan peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia dan merupakan entitas strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional (Suharto, 2019; Sutoro, 2014). Dalam kerangka otonomi daerah, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang memiliki peran aktif dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi pembangunan lokal (Wijaya & Samadhi, 2020; Antlöv, 2003). Penguatan peran desa semakin terasa seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan lebih besar bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri (Kemendagri, 2020).

Namun demikian, desa dan masyarakatnya masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersifat multidimensional, meliputi permasalahan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, lingkungan, serta partisipasi dan tata kelola pemerintahan (Kementerian Desa PDTT, 2021; Bappenas, 2020; UNDP Indonesia, 2021). Ketimpangan sosial yang terjadi, ditambah dengan keterbatasan akses terhadap informasi dan sumber daya, turut memperburuk kesenjangan antara kelompok masyarakat di desa (Bappenas, 2022; OECD, 2018). Hal ini diperparah oleh lemahnya kapasitas kelembagaan desa dan belum optimalnya kolaborasi antara aktor lokal dan supralokal (Sumarto & Suryahadi, 2010).

Kondisi ini menuntut upaya berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas masyarakat desa melalui sistem pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan (Abidjulu et al., 2024; Chambers, 1995; Ife & Tesoriero, 2006). Pemerintahan desa yang demokratis dan adaptif terhadap konteks lokal menjadi syarat utama untuk memastikan pembangunan yang adil dan merata (Cornwall, 2004). Prinsip pembangunan partisipatif tidak hanya menekankan pada kehadiran masyarakat dalam musyawarah, tetapi juga pada keterlibatan bermakna (meaningful participation) dalam seluruh tahapan proses pembangunan, dari perencanaan hingga evaluasi (Mansuri & Rao, 2013; Narayan, 2000). Inklusi sosial menjadi dimensi penting yang perlu diperkuat agar kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, anak muda, dan lansia memiliki ruang yang setara untuk berpartisipasi dalam pembangunan (PSPPR UGM, 2023; UNESCAP, 2020).

Pembangunan desa yang efektif tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk mengurangi ketimpangan dan memperkuat otonomi desa (Pratolo et al., 2020; Suharto, 2014; Todaro & Smith, 2015). Konsep pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa menjadi sangat penting, dengan menyediakan peluang, akses, dan perlindungan agar masyarakat dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan (Chambers, 1995; Ife & Tesoriero, 2006; Sen, 1999).

Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022, yang menekankan pembangunan yang holistik dan berkeadilan dengan menjunjung tinggi tiga prinsip utama: universality, integration, dan *No One Left Behind* (PSPPR UGM, 2023; Bappenas,

2020). Prinsip *No One Left Behind* menegaskan bahwa tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang boleh tertinggal dalam proses pembangunan (UNDESA, 2016; Sachs, 2015; OECD, 2018).

Dalam konteks ini, Sekolah Lapang Desa Inklusif menjadi pendekatan inovatif untuk memperkuat kapasitas dan partisipasi masyarakat desa. Model ini berakar dari konsep Sekolah Lapangan yang diperkenalkan melalui Program Pengendalian Hama Terpadu (PHT) pada tahun 1989 oleh Departemen Pertanian bekerja sama dengan FAO (Dirjen PDP Kemendesa PDTT, 2021; Setyowati & Satriawan, 2020). Sekolah Lapang berkembang menjadi media pembelajaran partisipatif yang berbasis praktik langsung di lapangan, serta berfungsi sebagai ruang dialog dan pembentukan kesadaran kritis masyarakat (Fakih, 2013; Van den Berg, 2004; Röling & Wagemakers, 1998).

Pendamping sekolah lapang memiliki peran strategis sebagai fasilitator, mediator, katalisator sosial, dan agen perubahan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak muda, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat miskin (IFAD, 2009; Kurniawan, 2021; Chambers, 2004). Pendamping yang sensitif terhadap konteks lokal dan dinamika sosial-budaya dapat membangun kepercayaan serta memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat penting, sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan desa (Antara, 2024). Keterlibatan langsung masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan

memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi kebutuhan lokal, memastikan alokasi sumber daya yang tepat sasaran, dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dan ekonomi (Baharuddin et al., 2022; Lestaluhu et al., 2023; Rifaid et al., 2023; Talitha et al., 2020; UNDP Indonesia, 2021).

Namun, pada praktiknya, banyak kelompok rentan yang belum sepenuhnya terlibat dalam pembangunan desa secara bermakna. Mereka seringkali hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, tanpa mendapatkan ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi atau terlibat dalam pengambilan keputusan (Seknas FITRA, 2016; Syaifullah, 2021). Ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi lebih dalam strategi serta efektivitas peran Pendamping sekolah lapang dalam menjangkau kelompok rentan.

Kabupaten Gunungkidul, sebagai salah satu wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami perkembangan yang signifikan dalam pembangunan. Namun, kesenjangan sosial-ekonomi yang masih ada, terutama di wilayah pedesaan, menghambat tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Angka kemiskinan di Gunungkidul mencapai 14,50%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata DIY yang hanya 11,91%, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih belum menikmati hasil pembangunan secara merata (BPS Gunungkidul, 2023a). Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Gunungkidul yang hanya 71,23, menunjukkan adanya kelemahan dalam pencapaian dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup (BPS Gunungkidul, 2023b).

Pada sektor pendidikan, meskipun partisipasi sekolah usia 7–12 tahun mencapai 99,12%, angka partisipasi pada usia 16–18 tahun hanya mencapai 84,67% (BPS Gunungkidul, 2023a). Akses terhadap layanan

kesehatan juga menunjukkan ketimpangan, berdasarkan data yang dilansir Harian Jogja (2024), rasio dokter umum di Kabupaten Gunungkidul adalah 1:5.000 penduduk, jauh di bawah standar WHO yang idealnya 1:1.000. (Kementerian Kesehatan RI, 2020; WHO, 2006).

Penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak oleh kesenjangan ini. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, terdapat 6.286 penyandang disabilitas pada tahun 2024, yang meningkat dari 6.019 orang pada tahun 2022 (Harian Jogja, 2022; 2024). Penyandang disabilitas fisik merupakan kelompok yang paling dominan, mencakup sekitar 21% dari total penyandang disabilitas. Meskipun pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan seperti alat bantu dan layanan sosial, penyandang disabilitas masih menghadapi tantangan besar terkait keterbatasan akses pendidikan inklusif, kurangnya pelatihan keterampilan, dan minimnya lapangan pekerjaan yang ramah disabilitas (Harian Jogja, 2024).

Pun demikian, agenda pembangunan desa telah mengusung pendekatan partisipatif, namun masih terdapat persoalan mendasar terkait inklusi social. Di Kalurahan Ngipak mengalami persoalan dalam aspek pendidikan, kesehatan anak, dan keterbatasan ekonomi. Data menunjukkan bahwa 25% warganya tidak atau belum bersekolah, mencerminkan rendahnya capaian pendidikan dasar. Selain itu, terdapat 18 balita mengalami gizi buruk dari total 16% penduduk anak-anak, meskipun cakupan imunisasi terbilang baik. Dalam aspek ketenagakerjaan, 28,5% warga bekerja sebagai petani, dan 18,9% belum bekerja, menandakan beban ekonomi pada sektor informal dan minimnya jaminan pendapatan tetap. Dalam hal kemiskinan, 69% kepala keluarga

(KK) masuk dalam kategori miskin, menjadikan intervensi perlindungan sosial sebagai kebutuhan mendesak.

Kalurahan Petir menampilkan karakteristik kerentanan yang berbeda. Aspek demografi lansia menjadi perhatian utama, di mana 28,9% penduduknya merupakan warga lanjut usia, jauh lebih tinggi dibanding Ngipak. Tingginya proporsi lansia ini membawa implikasi terhadap kebutuhan layanan kesehatan dan program produktivitas usia lanjut. Meskipun 17% penduduknya adalah anak-anak, data gizi balita belum tersedia secara lengkap, yang mengindikasikan lemahnya sistem pendataan dan monitoring gizi.

Dalam aspek pendidikan, 18,6% warga Petir tidak atau belum bersekolah, yang walaupun lebih rendah dari Ngipak, tetap mencerminkan perlunya intervensi pendidikan nonformal. Kondisi ekonomi juga menjadi sorotan: 40,5% warga Petir bekerja sebagai petani, mayoritas adalah perempuan, dan 14% belum bekerja. Ini menunjukkan peran besar perempuan dalam ekonomi rumah tangga, namun dengan beban kerja yang tidak selalu diakui secara formal. 68% KK di Petir masih berada dalam kategori miskin atau pra-sejahtera, menandakan tingginya kebutuhan terhadap program padat karya, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi.

Dilihat dari segi partisipasi dalam pemerintahan desa, keterlibatan perempuan, generasi muda, dan disabilitas masih sangat terbatas. Di Ngipak belum tergambar jelas representasi kelompok ini dalam musyawarah desa, sementara di Petir hanya terlihat sebagian staf perempuan dengan latar pendidikan yang beragam. Ketiadaan data disabilitas, keterbatasan layanan gizi, serta ketimpangan akses pendidikan dan pekerjaan menunjukkan bahwa inklusi sosial belum menjadi

kerangka operasional di kedua kalurahan. Kondisi ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan pendekatan pembangunan yang lebih reflektif dan berkeadilan, sebagaimana diamanatkan dalam prinsip *No One Left Behind (NOLB)* yang tidak hanya menjangkau warga termarginalkan, tetapi juga mereformasi sistem yang selama ini cenderung timpang dan menyingkirkan yang lemah. Maka penelitian ini menjadi penting untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana pendamping dapat berinovasi dalam mendukung partisipasi kelompok rentan di dua kalurahan tersebut secara bermakna dalam proses pembangunan desa yang inklusif.

B. Kajian Literatur

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas peran Pendamping sekolah lapang dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya, Okem, Pangemanan, dan Nayoan (2024) menyoroti peran strategis Pendamping sekolah lapang sebagai fasilitator, katalisator, dan jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menunjukkan pentingnya kehadiran pendamping dalam membangun komunikasi antara warga dan pemerintah desa. Namun, kajian ini belum secara khusus membahas peran pendamping dalam konteks inklusi sosial dan kelompok rentan.

Penelitian serupa dilakukan oleh Rivaldi (2021) yang memfokuskan pada optimalisasi fungsi pendamping dalam pelaksanaan pembangunan desa. Melalui pendekatan kualitatif, ia menemukan bahwa peningkatan kapasitas pendamping serta sinergi dengan perangkat desa merupakan kunci keberhasilan program. Meski begitu, pendekatan partisipatif berbasis pembelajaran seperti Sekolah Lapang tidak menjadi fokus dalam kajiannya.

Sementara itu, Susanti (2022) dalam studi kasusnya menunjukkan bahwa Pendamping sekolah lapang mampu mendorong prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun desa mandiri. Namun, penelitian ini belum mengaitkan peran tersebut dengan prinsip *No One Left Behind* (NOLB) atau inklusivitas dalam pembangunan.

Aspek persepsi masyarakat terhadap pendamping juga dibahas oleh Sonny (2023). Ia menemukan bahwa Pendamping sekolah lapang dinilai positif oleh warga apabila mampu berkomunikasi secara solutif dan terbuka. Sayangnya, studi deskriptif ini belum mengeksplorasi secara dalam kontribusi pendamping terhadap pembangunan desa yang inklusif.

Kajian lain oleh Faizal (2018) menyajikan telaah literatur mengenai peran Pendamping sekolah lapang dalam pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendamping berperan dalam membangun kapasitas warga untuk lebih mandiri. Namun, inklusivitas dan pendekatan pendidikan lapang tidak menjadi fokus kajian tersebut.

Terakhir, Rakhmadi, Bahtiar, dan Jopang (2022) mengevaluasi kinerja Pendamping sekolah lapang dalam program pembangunan desa di Kabupaten Kolaka dengan pendekatan kuantitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa efektivitas kinerja pendamping masih dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis dan non-teknis. Meski demikian, pendekatan pendidikan lapang dan aspek inklusi sosial belum banyak dikaji dalam penelitian ini.

Berdasarkan berbagai studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun peran Pendamping sekolah lapang dalam pembangunan telah banyak dikaji, namun belum banyak penelitian yang secara khusus menyoroti inovasi peran pendamping dalam mendorong pembangunan

desa inklusif dengan pendekatan Sekolah Lapang serta prinsip *No One Left Behind*. Inilah yang menjadi celah (*gap*) yang ingin diisi oleh penelitian ini.

Berdasarkan enam referensi di atas, berikut adalah uraian mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian bertema "Inovasi Pendamping sekolah lapang dalam Membangun Desa Inklusif dengan Prinsip *No One Left Behind (NOLB)*" berdasarkan matriks diatas:

1. Persamaan

- a. Fokus pada Peran Pendamping Sekolah Lapang

Seluruh penelitian terdahulu secara umum membahas peran strategis pendamping sekolah lapang dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi pendamping sebagai fasilitator, motivator, katalisator, serta jembatan antara masyarakat dan pemerintah menjadi benang merah yang menyatukan semua studi tersebut.

- b. Orientasi pada Pemberdayaan Masyarakat

Beberapa penelitian seperti Faizal (2018) dan Susanti (2022) menekankan bahwa pendamping sekolah lapang memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi lokal dan mendorong partisipasi masyarakat menuju kemandirian desa. Hal ini sejalan dengan tujuan besar pembangunan desa inklusif yang berbasis partisipasi aktif masyarakat.

- c. Metode Dominan: Kualitatif

Sebagian besar penelitian menggunakan metode kualitatif atau studi kasus, yang juga dapat digunakan dalam penelitian Anda,

untuk menggali pemahaman mendalam terkait dinamika sosial dan kultural yang melibatkan pendamping dan masyarakat desa.

2. Perbedaan

a. Pendekatan Inovatif (Sekolah Lapang sebagai Media Transformasi Sosial)

Tidak satu pun dari penelitian terdahulu yang menggunakan model Sekolah Lapang sebagai pendekatan pembelajaran sosial. Penelitian Anda menawarkan pembaruan dengan mengintegrasikan pendidikan berbasis praktik dan pengalaman lapangan sebagai alat untuk membentuk kesadaran kritis dan kepemimpinan warga desa.

b. Fokus Eksplisit pada Inklusi Sosial dan Prinsip NOLB

Penelitian terdahulu umumnya belum secara eksplisit menyorot kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, atau masyarakat miskin yang menjadi fokus utama dalam paradigma pembangunan inklusif. Penelitian Anda menekankan prinsip *No One Left Behind*, yang merupakan komponen utama dari SDGs (*Sustainable Development Goals*).

c. Integrasi dengan Paradigma Pembangunan Berbasis Hak

Tidak ada penelitian terdahulu yang mengaitkan pendampingan desa dengan pendekatan pembangunan berbasis hak (*rights-based development*), padahal pendekatan ini sangat relevan dalam konteks desa inklusif namun penelitian ini menyelaraskan praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan akses universal.

d. Kontribusi terhadap Inovasi Tata Kelola Desa

Penelitian ini tidak hanya menyoroti peran pendamping, tetapi juga memberikan kontribusi teoritik dan praktis terhadap tata kelola pemerintahan desa melalui metode inklusi sosial. Penelitian sebelumnya cenderung deskriptif dan tidak menawarkan alternatif model baru seperti sekolah lapang desa inklusif.

Penelitian bertema ‘Inovasi Pendamping sekolah lapang dalam Membangun Desa Inklusif dengan Prinsip *No One Left Behind*’ hadir sebagai komplementer dan pengembangan dari studi-studi terdahulu. Jika sebelumnya fokus hanya pada pemberdayaan atau optimalisasi kinerja pendamping secara umum, maka penelitian ini memperluas cakupan dengan pendekatan inovatif, berorientasi inklusivitas, dan responsif terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi mengisi celah dalam literatur yang belum banyak mengeksplorasi hubungan antara pendampingan, pendidikan lapang, dan pembangunan desa inklusif secara terpadu dan transformative.

C. Fokus Penelitian

Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis peran inovasi sosial yang dilakukan oleh Pendamping sekolah lapang dalam upaya mewujudkan pembangunan desa inklusif, dengan menitikberatkan pada penerapan prinsip *No One Left Behind (NOLB)*. Penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana strategi pendampingan dilakukan untuk menjangkau kelompok rentan, serta tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan prinsip inklusi sosial tersebut di tingkat lokal.

Secara geografis, penelitian difokuskan pada dua wilayah studi, yakni Kalurahan Ngipak dan Kalurahan Petir, yang masing-masing memiliki karakteristik kerentanan sosial berbeda. Kalurahan Ngipak menghadapi persoalan dominan pada aspek pendidikan dasar, gizi balita, dan keterbatasan data kelompok rentan, sementara Kalurahan Petir memiliki proporsi tinggi penduduk lanjut usia dan peran signifikan perempuan dalam sektor pertanian informal, namun masih lemah dalam sistem pendataan dan pelibatan struktural kelompok marginal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk inovasi sosial yang dilakukan oleh pendamping sekolah lapang dalam mewujudkan prinsip *No One Left Behind* di Kalurahan Ngipak dan Kalurahan Petir?
2. Strategi apa saja yang digunakan oleh pendamping dalam menjangkau kelompok rentan?
3. Apa saja yang dihadapi pendamping dalam mengimplementasikan prinsip *No One Left Behind* di tingkat desa?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengeksplorasi dan menganalisa bentuk inovasi pendamping sekolah lapang dalam upaya mendorong pembangunan desa inklusis berbasis prinsip *No One Left Behind*.
 - b. Mengkaji atau menggambarkan strategi pendampingan yang digunakan untuk menjangkau dan memberdayakan kelompok rentan.

- c. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Pendamping sekolah lapang dalam menerapkan prinsip inklusi sosial *No One Left Behind*.
2. Manfaat hasil penelitian
 - a. Teoritis:
 - 1) Memberikan kontribusi pada literatur khususnya dalam kajian pemberdayaan masyarakat, pembangunan inklusif, dan peran aktor pendamping.
 - 2) Menjadi referensi akademik untuk penelitian selanjutnya terkait pembahasan inklusifitas, pendampingan, dan pembangunan berkelanjutan.
 - b. Praktis:
 - 1) Memberikan gambaran konkret kepada aktor Pendamping sekolah lapang mengenai strategi dan peran yang efektif untuk mendorong pembangunan inklusif.
 - 2) Menjadi bahan bagi pemerintahan desa dan instansi terkait dalam penyusunan program pembangunan yang menysasar seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali kelompok rentan.
 - 3) Memberikan masukan bagi Kementerian Desa atau lembaga pelatihan desa dalam merancang pendampingan berbasis prinsip *No One Left Behind*.
 - c. Kebijakan:
 - 1) Mendorong kebijakan desa atau program kerja yang lebih beragam dan sensitif inklusivitas
 - 2) Memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat peran Pendamping sekolah lapang dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan inklusif.

d. Sosial:

- 1) Mendorong kesadaran kolektif untuk menjamin kelompok rentan dalam pembangunan desa.
- 2) Menjadi referensi bersama pencapaian tujuan pembangunan 2030 prinsip *No One Left Behind* dalam pencapaian global pembangunan berkelanjutan.

F. Kerangka Konseptual

Landasan teori berfungsi sebagai pijakan konseptual untuk memahami dinamika peran pendamping Sekolah Lapang Desa Inklusif (SLDI) dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini mengkaji tiga aspek utama: (1) bentuk inovasi sosial yang dilakukan pendamping, (2) strategi dalam menjangkau kelompok rentan, dan (3) tantangan dalam penerapan prinsip *No One Left Behind* (NOLB). Untuk itu, berbagai pendekatan teoretik digunakan guna memberikan perspektif analitis yang kredibel dan komprehensif

1. Inovasi dan transformasi

Teori inovasi sosial menjadi fondasi utama dalam memahami upaya pendamping SLDI dalam menciptakan praktik-praktik baru yang menjawab kebutuhan kelompok rentan secara kontekstual. Mulgan (2006) menjelaskan bahwa inovasi sosial adalah respons atas ketidakmampuan pendekatan formal dalam menyelesaikan masalah sosial. Inovasi ini umumnya bersifat partisipatif, relasional, dan kontekstual.

Lebih lanjut, difusi inovasi dijelaskan oleh Rogers (1983) melalui lima tahapan adopsi inovasi atau difusi inovasi yakni: *knowledge, persuasion, decision, implementation, dan confirmation*. Model ini memberi pemahaman bahwa keberhasilan inovasi sosial

juga ditentukan oleh proses penerimaan dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapannya.

Sedangkan Drucker (2023) menekankan pentingnya *smart innovation*, yakni inovasi yang tidak harus spektakuler namun harus adaptif, sederhana, dan mampu menyelesaikan persoalan nyata.

Dalam konteks pembelajaran sosial, Van de Ven (2022) mengembangkan konsep *distributed learning*, yakni proses di mana pengetahuan menyebar secara horizontal antar aktor lokal melalui forum-forum kolaboratif

Dalam perspektif transformasional, Howaldt dan Schwarz (2017) melihat inovasi sosial sebagai kekuatan yang mampu menggeser norma dan praktik sosial yang eksklusif menuju bentuk-bentuk hubungan sosial yang lebih adil dan reflektif.

Dwiartama et al. (2021) menunjukkan bahwa inovasi sosial bersifat kontekstual, bersandar pada relasi informal, nilai adat, dan praktik komunitas lintas sektor. Inovasi tidak selalu formal, tetapi bisa bersumber dari pengorganisasian sosial sehari-hari yang fleksibel dan adaptif terhadap realitas lokal. Urabe (2022) menyatakan bahwa inovasi bukan merupakan kegiatan satu kali pukul (*one-time phenomenon*), melainkan suatu proses yang panjang dan kumulatif yang meliputi banyak proses pengambilan keputusan di dan oleh organisasi dari mulai penemuan gagasan sampai implementasinya.

Teori inovasi sosial menjelaskan bagaimana solusi baru muncul dari akar rumput untuk menjawab masalah sosial kompleks, dalam penelitian ini inovasi sosial digunakan untuk menganalisis bagaimana pendamping SLDI menciptakan solusi sosial baru yang tidak konvensional, sementara teori difusi inovasi membantu

memahami bagaimana praktik-praktik tersebut menyebar, diterima, dan dilembagakan dalam sistem sosial desa.

2. Pendidikan Transformatif dan Budaya Inklusif

Transformasi sosial tidak terlepas dari peran pendidikan yang membebaskan. Freire (1970) melalui konsep pedagogi pembebasan, menekankan pentingnya pendidikan yang berbasis dialog, kesetaraan, dan refleksi kritis. Dalam konteks pendampingan, prinsip ini menjelaskan peran pendamping sebagai fasilitator kesadaran kritis warga marginal.

Selain pendekatan pedagogis, inovasi sosial juga dapat disemai melalui ruang budaya. Velaques (2014) mengemukakan bahwa nilai-nilai sosial yang baru akan lebih mudah diterima apabila ditanamkan dalam struktur simbolik yang sudah melekat dalam komunitas, seperti ritus keagamaan, tradisi lokal, dan forum kultural.

Pembangunan Inklusif merupakan pendekatan pembangunan yang menekankan pentingnya pelibatan semua kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan dan terpinggirkan dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tujuan utama pembangunan inklusif adalah memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan secara merata, serta tidak ada kelompok yang tertinggal (*No One Left Behind*).

Bappenas (2014) menjelaskan bahwa pembangunan inklusif adalah pembangunan yang memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pembangunan. Sedangkan UNPS (2011) menegaskan bahwa pembangunan inklusif menjamin pertumbuhan ekonomi dan sosial harus dinikmati secara adil, serta melibatkan masyarakat marginal

dalam proses pengambilan keputusan. Hal serupa juga disampaikan OECD (2012) bahwa pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang tersebar secara merata dan menciptakan kesempatan bagi semua orang.

Pembangunan inklusif menekankan pada partisipasi, keadilan, dan pemerataan hasil pembangunan, agar tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses kemajuan sosial dan ekonomi maka pembangunan dalam hal ini mesti berbasis pemberdayaan dimana masyarakatnya didorong untuk mandiri. Dengan demikian, pembangunan inklusif menjadi model pendekatan pembangunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi namun juga memperhatikan aspek keadilan sosial, aspek pemerataan, dan aspek keberlanjutan sampai terhapusnya kesenjangan sosial.

3. Keadilan dan Pengakuan Sosial

Sen (1999) melalui pendekatan *capability approach* menyatakan bahwa keadilan bukan hanya soal distribusi sumber daya, tetapi soal kapasitas individu untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai bermakna. Rawls (1971) menegaskan bahwa ketimpangan sosial dapat diterima hanya jika menguntungkan kelompok paling tertinggal. Sementara itu, Fraser (2003) menambahkan bahwa keadilan sosial harus mencakup redistribusi ekonomi dan rekognisi sosial, artinya Distribusi ekonomi harus diimbangi rekognisi identitas—tanpa pengakuan simbolik, redistribusi sulit berkelanjutan.

Foucault (1977) memberikan kerangka analisis terhadap bagaimana kekuasaan bekerja melalui praktik administratif yang tampak netral namun menghasilkan eksklusif.

4. Tata Kelola Inklusi dan Kelembagaan

Teori *governance* menjadi penting dalam membahas dinamika relasi antara pendamping, pemerintah desa, dan warga. Pierre dan Peters (2000) serta UNDP (2016) menjelaskan bahwa *local governance* yang baik adalah yang mendorong keterlibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengawasan pembangunan. Ditekankan keterpaduan antara struktur pemerintahan lokal dan partisipasi warga dalam seluruh siklus kebijakan.

Menurut Ansell dan Gash (2007) menekankan pentingnya *governance kolaboratif*, yakni model tata kelola yang menumbuhkan kepercayaan, komunikasi, dan pengambilan keputusan bersama. Narayan (2005) mengembangkan gagasan *mainstreaming*, yaitu upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai inklusif ke dalam sistem regulasi, perencanaan, dan anggaran desa.

5. Partisipasi, Modal Sosial, dan Pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang adil dan inklusif. Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata *power* yang berarti kekuatan atau kemampuan, dan secara konseptual merujuk pada proses meningkatkan kapasitas individu dan kelompok untuk mengontrol kehidupan mereka sendiri, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan membentuk struktur sosial yang lebih adil. Dalam menjangkau kelompok rentan, pendekatan partisipatif menjadi penting.

Chambers (1994) mengembangkan konsep *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, yang menekankan pentingnya keterlibatan langsung warga dalam memetakan permasalahan dan potensi lokal.

Keberhasilan pendekatan partisipatif sangat dipengaruhi oleh modal sosial.

Putnam (1993) menyatakan bahwa kepercayaan, norma, dan jaringan sosial merupakan prasyarat terwujudnya kolaborasi yang efektif. Dalam konteks pemberdayaan, Chambers dan Adams (2006) menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis *local knowledge*, yakni pemberdayaan yang dilakukan dengan memahami cara hidup warga dan mendekatkan diri pada dunia keseharian mereka, bukan pengetahuan teknokratik semata.

Crenshaw (1989) memperkenalkan teori *interseksionalitas* yang menekankan bahwa kerentanan bersifat berlapis, untuk itu analisis kebijakan inklusif harus menghindari pendekatan satu-dimensi.

a. Pemberdayaan sebagai Proses Sosial Struktural

Pemberdayaan merupakan konsep sentral dalam pendekatan pembangunan partisipatif, terutama dalam konteks penguatan kapasitas dan posisi kelompok rentan di masyarakat. Chambers (1997) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan yang partisipatif harus dimulai dari pengakuan terhadap pengalaman warga miskin dan kelompok yang terpinggirkan. Ia menekankan pentingnya pembalikan struktur relasi kekuasaan agar warga menjadi subjek pembangunan. Cornwall (2008) memperkuat pandangan ini dengan membedakan antara ruang partisipasi yang “diundang” oleh sistem formal, dan ruang partisipasi yang “diklaim” oleh komunitas. Dalam kerangka ini, pemberdayaan terjadi ketika warga memiliki kapasitas untuk menciptakan ruang politik dan sosialnya sendiri.

Sen (1999) melalui pendekatan *capability* menjelaskan bahwa pemberdayaan tidak hanya berarti akses terhadap sumber daya, tetapi mencakup kebebasan substantif untuk memilih dan menjalani kehidupan yang bernilai. Narayan (2005) menekankan bahwa pemberdayaan yang berkelanjutan memerlukan dukungan kelembagaan yang memberi ruang bagi pilihan warga untuk dapat dijalankan secara nyata dan setara.

Pemberdayaan tidak lagi dipandang sebagai tindakan teknis semata, melainkan sebagai proses sosial-struktural yang menuntut perubahan pada tataran norma, regulasi, dan kelembagaan. Sarjiyanto et al. (2024) menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan dipengaruhi oleh kombinasi modal sosial, psikologis, dan ekonomi. Penelitian oleh Nalikan et al. (2023) dan Naredia & Supriyanto (2024) juga membuktikan bahwa perubahan kelembagaan dan penguatan nilai budaya gotong royong menjadi elemen kunci pemberdayaan yang berkelanjutan.

Ife (2008) membagi pendekatan pemberdayaan ke dalam empat pandangan:

- 1) Strukturalis: pemberdayaan sebagai upaya membebaskan masyarakat dari struktur yang menindas.
- 2) Pluralis: peningkatan daya agar mampu bersaing dalam sistem sosial.
- 3) Elitis: mempengaruhi elite dan struktur yang ada untuk perubahan dari dalam.
- 4) Post-strukturalis: mengubah diskursus dan menghargai subjektivitas dalam membaca realitas sosial.

b. Strategi Pemberdayaan

Strategi pemberdayaan menurut Hulme dan Turner (1990) dibagi ke dalam dua pendekatan utama yakni strategi dari atas (*top-down*) dan strategi dari bawah (*bottom-up*). Strategi *top-down* lebih berorientasi pada intervensi struktural melalui kebijakan negara dan reformasi kelembagaan, sedangkan strategi *bottom-up* menekankan penguatan kapasitas komunitas, partisipasi warga, dan pengakuan atas praktik sosial yang hidup di tingkat lokal.

Strategi pemberdayaan masyarakat merupakan dimensi operasional dari pendekatan pemberdayaan sebagai proses sosial-struktural. Jika pemberdayaan dipahami sebagai upaya transformasi relasi kuasa dan pelembagaan partisipasi, maka strategi pemberdayaan mengacu pada cara, metode, dan pendekatan yang digunakan untuk mengaktualisasikan proses tersebut dalam konteks sosial yang spesifik. Dalam konteks pembangunan desa, strategi ini menjadi penting untuk memahami bagaimana pendamping dapat menjangkau kelompok rentan, mengaktifkan kapasitas kolektif, dan mendorong pelembagaan nilai-nilai inklusif di tingkat lokal.

Menurut Suharto (2005), strategi pemberdayaan masyarakat dapat dibagi dalam tiga pendekatan utama, yaitu: (1) *enabling*, menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat berkembang; (2) *empowering*, memberikan penguatan kapasitas individu dan kelompok; dan (3) *protecting*, menyediakan perlindungan terhadap kelompok yang lemah agar tidak semakin terpinggirkan. Strategi *enabling* berfokus pada penciptaan kondisi

yang kondusif agar masyarakat dapat berkembang secara mandiri, seperti keterbukaan akses terhadap informasi, pendidikan, atau sumber daya ekonomi. Strategi *empowering* berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat, baik dalam bentuk pelatihan, penyuluhan, maupun pengorganisasian warga untuk mampu menyuarakan aspirasinya. Sementara itu, strategi *protecting* ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan agar tidak semakin terpinggirkan, seperti melalui kebijakan afirmatif, bantuan hukum, atau penyediaan ruang aman bagi penyandang disabilitas, lansia, atau perempuan kepala keluarga. Ketiga strategi ini saling melengkapi dan dapat digunakan sebagai kerangka dalam menganalisis efektivitas intervensi pendampingan desa inklusif. Pendekatan ini menempatkan strategi pemberdayaan tidak hanya dalam ranah teknis, tetapi juga dalam konteks advokasi dan keadilan sosial.

Mikkelsen (2003) menekankan pentingnya pendekatan partisipatoris dalam strategi pemberdayaan, melalui metode-metode seperti *Participatory Rural Appraisal* (PRA), peta sosial, dan pemetaan sumber daya lokal. Strategi partisipatif memungkinkan warga untuk terlibat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, yang secara tidak langsung membangun kepemilikan bersama atas proses pembangunan. Pendekatan lain dikembangkan oleh Ife dan Tesoriero (2006), yang mengedepankan strategi pemberdayaan berbasis komunitas (*community-based empowerment*) dengan fokus pada modal sosial, solidaritas horizontal, serta pengakuan atas keberagaman identitas dan pengalaman. Strategi ini menekankan perlunya

menghindari pendekatan seragam, serta mendorong pendekatan yang berbasis konteks sosial dan kultural komunitas lokal.

Strategi pemberdayaan sering dikaitkan dengan pendekatan pengorganisasian masyarakat (*community organizing*), kolaborasi lintas aktor, serta penggunaan ruang-ruang informal untuk membangun kepercayaan dan kedekatan sosial. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menjangkau kelompok yang tidak terakomodasi secara administratif, seperti perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, atau lansia terpencil (Pranadji, 2020).

Strategi pemberdayaan juga berkaitan erat dengan kemampuan aktor pendamping untuk menjalin relasi yang setara, membangun kepercayaan, serta memahami konteks kerentanan secara reflektif dan adaptif. Dalam penelitian ini, strategi pemberdayaan dianalisis untuk memahami bagaimana pendamping Sekolah Lapang Desa Inklusif menjangkau dan melibatkan kelompok rentan dalam proses pembangunan desa, serta bagaimana strategi tersebut mampu melembagakan prinsip inklusi dan keadilan sosial dalam tata kelola desa.

c. Masyarakat sebagai Subjek Perubahan

Teori ACTORS yang dikembangkan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay (1997) menekankan bahwa pemberdayaan adalah proses delegasi sosial dan moral untuk mengembalikan otonomi pada individu atau kelompok masyarakat. Teori ini terdiri dari enam pilar utama yakni, *Authority* (wewenang) yakni pemberian kepercayaan, *Confidence and Competence* (percaya diri dan kemampuan), *Trust* (kepercayaan antara pendamping dan

masyarakat), *Opportunities* (kesempatan untuk berkembang), *Responsibilities* (tanggung jawab atas pilihan), *Support* (dukungan berkelanjutan).

ACTORS melihat masyarakat bukan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai aktor perubahan yang sadar, bertanggung jawab, dan aktif dalam proses pembangunan. Untuk memahami relasi kekuasaan dalam konteks pemberdayaan, Michel Foucault (1980) memperkenalkan konsep *sentrum of power*. Menurutnya, kekuasaan tidak bersifat sentralistik, melainkan tidak terkonsentrasi atau kekuasaan tidak berada di tangan satu pihak, tersebar dimanakekuasaan hadir dalam setiap aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya. Jaringan yaitu relasi kekuasaan dibentuk oleh jaringan interaksi antarindividu, kelompok, dan institusi. Dinamis dimana kekuasaan bersifat berubah dan bisa dinegosiasikan, dan tidak terlihat artinya kekuasaan sering kali tersembunyi dalam sistem norma dan diskursus.

Konsep ini memberikan perspektif kritis dalam melihat bahwa pemberdayaan tidak cukup hanya meningkatkan kapasitas teknis masyarakat, tetapi juga harus membongkar struktur kekuasaan yang membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya, pengambilan keputusan, dan kebijakan publik.

Integrasi antara teori pemberdayaan, strategi Hulme dan Turner, teori ACTORS, serta konsep kekuasaan Foucault menghasilkan sebuah pendekatan pemberdayaan yang utuh dan kritis. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif pembangunan, yang tidak hanya diberikan kapasitas dan

akses, tetapi juga diberi ruang untuk membongkar dan menegosiasi ulang kekuasaan yang selama ini menyingkirkan mereka. Inilah dasar konseptual untuk mewujudkan desa yang inklusif dengan prinsip "*No One Left Behind*" di mana tidak ada seorang pun yang ditinggalkan dalam proses pembangunan.

6. Prinsip *No One Left Behind*

No One Left Behind merupakan prinsip dari komitmen utama agenda pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 yang menekankan bahwa hasil pembangunan harus dapat diakses dan dirasakan oleh semua kalangan terutama kelompok masyarakat yang paling tertinggal secara sosial, ekonomi, dan geografis. Prinsip ini dinyatakan secara eksplisit oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB, 2015):

"We pledge that no one will be left behind. Recognizing that the dignity of the human person is fundamental, we wish to see the Goals and targets met for all nations and peoples and for all segments of society. And we will endeavor to reach the furthest behind first." – *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*

Prinsip ini mengandung pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) dengan komitmen untuk inklusi, pembangunan harus berpijak pada nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap martabat setiap individu tanpa diskriminasi, dan komitmen target menjangkau kelompok paling tertinggal dahulu tentunya dalam cakupan global dan sosial, artinya target pembangunan tidak hanya berlaku untuk negara-negara maju namun juga negara berkembang serta semua kelompok masyarakat dalam negara tersebut. Prinsip ini bukan sekadar slogan moral, melainkan landasan filosofis dan operasional dari seluruh agenda pembangunan global. Prinsip

Leave No One Behind (UNDP: 2018) menjadi pedoman normatif global bahwa setiap inisiatif pembangunan wajib memprioritaskan kelompok paling tertinggal; melampaui pendekatan universalistik dengan strategi afirmatif dan monitoring berkeadilan.

Menurut UN DESA (2016; 2018), *No One Left Behind* adalah komitmen agar pembangunan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling tertinggal akibat kemiskinan, disabilitas, usia lanjut, gender, etnisitas, atau bentuk kerentanan sosial lainnya. Tujuan utama dari prinsip ini adalah menghapus ketimpangan akses, mengatasi diskriminasi, dan mewujudkan keadilan sosial secara sistemik. Prinsip NOLB menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan baru bisa diakui apabila mereka yang paling tertinggal ikut mengalami dampaknya.

“Only by reaching those farthest behind first can we deliver on the promise of the 2030 Agenda” (UN DESA, 2016)

UN DESA (2018) menyusun lima prinsip praktis yang harus diterapkan untuk mengarusutamakan NOLB dalam kebijakan dan program pembangunan:

1. Mengidentifikasi siapa yang tertinggal; Pendekatan berbasis data yang mengenali kelompok disabilitas, lansia, ODGJ, perempuan kepala keluarga, dan kelompok rentan lainnya.
2. Menganalisis penyebab keterpinggiran; Melacak akar diskriminasi, hambatan struktural, aksesibilitas, serta ketimpangan representasi.
3. Memutus siklus ketertinggalan; Melalui kebijakan afirmatif, dukungan sosial, serta pembangunan kapasitas kelompok marginal.

4. Membangun partisipasi dan pemberdayaan; Melibatkan kelompok rentan dalam pengambilan keputusan dan memastikan suara mereka diakui secara setara.
5. Memastikan akuntabilitas dan monitoring; Menyediakan sistem pemantauan yang inklusif dan responsif terhadap keberhasilan / kegagalan program bagi kelompok tertinggal.

Dalam konteks pembangunan desa, prinsip *No One Left Behind* mendorong lahirnya pendekatan desa inklusif yakni desa yang:

1. Merumuskan kebijakan berdasarkan data kelompok rentan;
2. Mengalokasikan anggaran afirmatif untuk ODGJ, penyandang disabilitas, dan lansia;
3. Menjamin akses dan partisipasi mereka dalam forum formal (Musdes, RKPDes);
4. Memastikan pelayanan publik dapat diakses secara adil dan bermartabat oleh semua kalangan.

Dengan demikian, NOLB menuntut agar tidak ada satu pun warga desa yang tertinggal, baik dalam proses pembangunan maupun hasilnya.

7. Kelompok Rentan

Menurut UNDESA (2016), kelompok rentan adalah mereka yang menghadapi hambatan dalam menikmati hak-hak mereka secara penuh karena diskriminasi struktur sosial, status sosial, atau faktor geografis. Kelompok ini mencakup perempuan, anak-anak atau remaja, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, kelompok miskin, dan kelompok dengan kendala akses terhadap layanan dasar. Individu atau kelompok ini berada dalam posisi lemah secara sosial,

ekonomi atau politik sehingga memiliki resiko tinggi untuk tidak mendapatkan manfaat pembangunan secara merata.

Kabeer (2020) menyatakan bahwa kelompok rentan adalah mereka yang mengalami *social exlusion* atau pengecualian sosial, yaitu kondisi ketika individu atau kelompok tidak memiliki akses terhadap sumber dan kesempatan, atau institusi sosial yang penting karena hambatan sosial, budaya, dan ekonomi. Sedangkan Young (1990) mengaitkan kelompok rentan dengan ketidakadilan struktural, yaitu ketika kelompok sosial tertentu mengalami dominasi, marginalisasi, dan tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Kerentanan sosial muncul karena rendahnya modal sosial, modal budaya, dan modal ekonomi dalam masyarakat, sehingga kelompok rentan ini tidak memiliki cukup modal untuk bersaing dalam struktur sosial (Bourdieu, 1986). Dalam kontek pembangunan maka kelompok rentan ini merupakan bagian dari masyarakat miskin yang tidak memiliki daya tawar dan cenderung terpinggirkan dalam proses pembangunan.

8. Sekolah Lapang Desa Inklusif

a. Pengertian

Sekolah Lapang pada awalnya merupakan sebuah model pendidikan berbasis praktik yang dikembangkan oleh Departemen Pertanian pada era 1980-an sebagai bagian dari strategi Pemberantasan Hama Terpadu (PHT). Model ini bertujuan meningkatkan kapasitas petani melalui pembelajaran partisipatif dan berbasis pengalaman langsung di lapangan.

Sedangkan Desa Inklusif adalah paradigma pembangunan yang menekankan pada keterlibatan seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan dan marjinal, dalam proses pembangunan yang adil, setara, dan berkelanjutan. Desa inklusif bertujuan menciptakan ruang yang terbuka, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan semua warga tanpa terkecuali, sejalan dengan prinsip *No One Left Behind* dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Adopsi pendekatan Sekolah Lapang ke dalam konteks pembangunan desa inklusif melahirkan konsep Sekolah Lapang Desa Inklusif. Model ini dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) sebagai bagian dari strategi peningkatan kapasitas masyarakat desa agar mampu menjadi subjek pembangunan. Dalam konteks ini, Sekolah Lapang tidak lagi terbatas pada isu pertanian, melainkan menjadi media pembelajaran sosial untuk mengembangkan kesadaran kritis, memperkuat kapasitas kepemimpinan warga, serta mendorong partisipasi inklusif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Program ini menjadi salah satu instrumen utama dalam rangka pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Tujuan akhirnya adalah menciptakan ruang dialog dan pembelajaran antarwarga yang memungkinkan munculnya kesetaraan, keberdayaan, dan keterlibatan aktif semua pihak, terutama kelompok rentan dan terpinggirkan, dalam proses pembangunan desa. Dengan demikian, Sekolah Lapang Desa Inklusif menjadi model strategis dalam memperkuat kapasitas

kelembagaan desa sekaligus mewujudkan pembangunan yang benar-benar berlandaskan pada prinsip keadilan sosial.

b. Ciri-ciri Sekolah Lapang Desa Inklusi

Sekolah Lapang Desa Inklusi dapat dikenali dari beberapa ciri sebagai berikut:

- 1) Sarana Belajar Ciptaan Sendiri, Desa dengan segala aspek kehidupan masyarakatnya dan penyelenggaraan desa merupakan sarana belajar utama, sedangkan alat tulis dan teknologi merupakan sarana pelengkap pembelajaran. Melalui sarana tersebut, peserta menciptakan sendiri yang disebut 'buku pintar' yakni jurnal catatan proses yang berisi pengamatan fenomena, pencatatan data, dan hasil temuan kajian.
- 2) Peran Pemandu, pemandu sebagai fasilitator yang tugas dan fungsinya memudahkan proses pembelajaran. Di sekolah lapang, prinsip pembelajarannya adalah belajar bersama-sama sehingga disini pemandu bukanlah sebagai guru sebab setiap peserta berperan sebagai guru dan sekaligus sebagai murid yang saling menguji temuannya dan hal ini terlihat dalam dinamika diskusi kelompok.
- 3) Analisis dan Pengambilan Keputusan, Kemampuan melakukan analisis menjadi materi dasar dan metode analisis sosial menjadi wajib dipelajari peserta sebab analisis atau kajian menjadi kegiatan utama peserta sekolah lapang. Hal ini digunakan untuk mendapat pengetahuan serta mengambil suatu keputusan oleh peserta.

- 4) Pembelajaran Berkesinambungan, sekolah lapang dirancang dan dikembangkan dalam kurun waktu tertentu menyesuaikan mekanisme dalam tahap pembangunan Desa dengan tujuan supaya setiap tahap pembangunan Desa menjadi ruang untuk menguji dan menerapkan pengetahuan temuannya untuk mempengaruhi pembentukan Desa Inklusi, dan pada siklus atau tahap pembangunan berikutnya kembali menguji pengetahuannya secara berkesinambungan secara bertahap sebagai proses terbentuknya Desa Inklusif.
- 5) Dinamika Kelompok, Pemandu dan peserta dibekali kemampuan untuk meningkatkan organisasi. Semua peserta diberi kesempatan yang sama dalam kegiatan kelompok dengan memimpin diskusi, mempresentasikan hasil analisisnya serta melakukan eksperimen. Sehingga tercipta organisasi belajar yang berkelanjutan sebagai salah satu tujuan Sekolah lapang.
- 6) Arti Partisipasi dalam Sekolah lapang, *Cohesion* atau kerekatan pihak-pihak yang terlibat dalam sekolah lapang menjadi hal utama yang dibangun untuk menentukan efektifitas dan kedalaman cara belajar kelompok. Untuk menciptakan kerekatan sosial disyaratkan partisipasi aktif dari semua peserta. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan berdasarkan jenjang partisipasi yang akan dicapai, yaitu a) partisipasi untuk menguasai ilmu pembentukan desa inklusi; b) partisipasi untuk interaksi dan pengembangan kelompok; dan c) partisipasi dalam membangun kesadaran kolektif warga.

9. Desa Inklusif

Desa inklusif merupakan konsep pembangunan desa yang menekankan pada kesetaraan akses, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi seluruh warga desa tanpa diskriminasi. Desa inklusif juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama prinsip “*No One Left Behind*.” Untuk melihat sejauh mana peran pendamping sekolah lapang dalam mewujudkan desa inklusi, melalui pendekatan multidisipliner dengan memadukan teori-teori dari bidang inovasi sosial, keadilan sosial, pendidikan kritis, tata kelola, hingga pembangunan berbasis komunitas diharapkan dapat memahami fenomena pembangunan desa inklusif yang berkeadilan, terutama dalam relasi antara inovasi sosial, strategi pemberdayaan kelompok rentan, dan tantangan struktural dalam implementasinya.

a. Teori inovasi Sosial

Mulgan (2006) menyatakan bahwa inovasi sosial adalah proses penciptaan solusi baru terhadap permasalahan sosial yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berakar pada kebutuhan masyarakat. Inovasi ini umumnya tumbuh dari komunitas, bukan berasal dari sistem formal. Inovasi sosial bertumpu pada relasi sosial, empati, dan kemampuan membaca konteks lokal, sehingga mampu menumbuhkan perubahan yang bersifat transformatif.

b. Model Difusi Inovasi

Inovasi secara umum didefinisikan sebagai suatu proses memperkenalkan perubahan baru, baik dalam bentuk ide, metode, atau produk, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu system. Model difusi inovasi yang dikembangkan

oleh Rogers (1983) menjelaskan proses penyebaran ide atau inovasi baru dalam suatu sistem sosial melalui lima tahapan, yaitu: pengetahuan (*knowledge*), persuasi (*persuasion*), keputusan (*decision*), implementasi (*implementation*), dan konfirmasi (*confirmation*). Model ini membantu menjelaskan bagaimana inovasi dapat diterima dan diadopsi oleh masyarakat, serta bagaimana karakteristik inovasi dan lingkungan sosial memengaruhi proses tersebut

c. Teori Sosial (*Social Justice Theory*)

Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971) menyatakan bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang memberikan keuntungan terbesar kepada mereka yang paling tidak beruntung (*the least advantaged*). Prinsip ini menekankan pada pentingnya keberpihakan terhadap kelompok marginal dalam sistem sosial untuk menciptakan keadilan yang substantif dan distributif. Dalam konteks desa inklusif, ini berarti program pembangunan desa harus dirancang agar memberikan manfaat lebih besar kepada kelompok marginal seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga, dan masyarakat adat.

Sementara itu, menurut Putnam (1993) menyatakan bahwa modal sosial terdiri atas jaringan, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan masyarakat untuk berkoordinasi dan bekerja sama secara efektif demi tujuan bersama. Modal sosial memainkan peran penting dalam memperkuat kohesi sosial dan membangun kapasitas kolektif masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan partisipatif.

Untuk itu, desa inklusif harus memastikan akses setara terhadap layanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan) bagi semua warganya.

d. Teori Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment Theory*)

Chambers (1997) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam pendekatannya yang dikenal dengan *Participatory Rural Appraisal* (PRA), Chambers menyatakan bahwa pembangunan harus memperhatikan suara dan kebutuhan masyarakat marginal.

Maka di dalam pembangunan desa inklusif harus memberi ruang partisipasi yang aktif bagi warga desa, termasuk kelompok marginal, dalam pengambilan keputusan.

e. Teori Pembangunan sebagai Kebebasan

Sen (1999) dalam *Development as Freedom* menekankan bahwa pembangunan bukan sekadar peningkatan pendapatan, tetapi juga perluasan kebebasan substantif warga untuk hidup sebagaimana yang mereka nilai penting. Sen (1999) memperkenalkan pendekatan kapabilitas sebagai kerangka keadilan yang berfokus pada kemampuan riil individu untuk menjalani kehidupan yang bernilai menurut mereka sendiri. Pendekatan ini menolak pengukuran pembangunan semata berdasarkan pendapatan atau kepemilikan sumber daya, melainkan pada kemampuan aktual seseorang dalam mengakses, memilih, dan menggunakan kesempatan hidup yang setara pembangunan desa inklusif berarti membuka akses dan peluang bagi seluruh warga untuk menentukan nasibnya sendiri.

Freire (1970) dalam *Pedagogy of the Oppressed* mengembangkan teori pendidikan kritis yang menempatkan individu sebagai subjek pembebasan, bukan objek yang pasif. Melalui pendekatan dialogis dan reflektif, pendidikan harus mendorong kesadaran kritis, partisipasi aktif, dan transformasi sosial. Pendekatan ini memandang proses belajar sebagai ruang emansipasi sosial, khususnya bagi kelompok yang terpinggirkan. Untuk itu, inklusifitas desa tidak hanya memberikan fasilitas fisik, tetapi juga memperkuat kemampuan warga desa untuk mengakses peluang dan menentukan masa depan mereka.

f. Teori Keadilan dan Rekognisi

Fraser (2003) menambahkan dimensi rekognisi dalam teori keadilan sosial. Ia menegaskan bahwa keadilan tidak hanya mencakup redistribusi ekonomi, tetapi juga rekognisi terhadap identitas dan eksistensi sosial kelompok rentan. Ketika suatu kelompok mengalami subordinasi kultural dan eksklusi simbolik, maka intervensi kebijakan harus mencakup pemulihan posisi sosial mereka secara setara.

g. Teori Interseksionalitas

Crenshaw (1989) mengembangkan teori interseksionalitas untuk menjelaskan bagaimana berbagai identitas sosial (gender, disabilitas, status ekonomi, etnis) saling beririsan dan menciptakan bentuk-bentuk diskriminasi yang kompleks. Desa inklusif harus peka terhadap kompleksitas ini. Maka prasyarat dalam inisiasi membangun desa inklusif adalah adanya analisis mendalam tentang kerentanan ganda yang dialami warga, seperti perempuan miskin penyandang disabilitas.

h. Teori Pembangunan Inklusif

United Nations Development Programme (UNDP, 2016) mendorong model pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, terutama yang rentan, dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Konsekuensinya bagi pemerintah desa perlu menyusun rencana pembangunan (RKP Desa dan RPJM Desa) yang memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, dengan prinsip inklusi sosial.

Secara praktis paling tidak terdapat sejumlah indikator terkait desa tersebut mempraktikkan pembangunan inklusi atau belum. M. Guhfron H. & Kordi K (2023) mengemukakan terdapat sembilan indikator desa inklusi sebagai berikut: (1) membangun perspektif disabilitas dan Inklusi sosial; (2) data disabilitas dan kelompok marginal/minoritas lainnya yang selalu tervalidasi; (3) pengorganisasian disabilitas dan kelompok marginal; (4) melibatkan disabilitas dan kelompok marginal/minoritas dalam pembentukan dan pengambilan kebijakan; (5) perencanaan dan implementasi anggaran yang inklusif disabilitas dan kelompok marginal/minoritas; (6) pembentukan regulasi desa yang inklusif; (7) membangun aksesibilitas infrastruktur; (8) membangun sistem informasi; dan (9) mengembangkan proses pembelajaran bersama untuk membangun desa inklusif.

Oleh sebab itu, desa yang inklusif adalah desa yang mampu merancang pembangunan yang partisipatif, berkeadilan, dan merangkul semua golongan, terutama kelompok yang selama ini terpinggirkan. Desa inklusif merupakan desa yang

pengelolaannya bertumpu pada nilai-nilai keadilan sosial, pemberdayaan, kebebasan substantif, dan pengakuan atas keragaman identitas.

i. Dimensi Membangun Desa Inklusif

Menurut IRE (2017), pembangunan desa inklusif dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu tata kelola desa (*governance*), arena partisipasi (formal dan informal), serta aktor pelaku perubahan di tingkat desa.

1. Dimensi *Governance*

Governance atau tata kelola desa menjadi kunci dalam mendorong desa menuju arah inklusif. IRE (2017) dan UNDP (2016) menyebut bahwa *governance* yang inklusif harus partisipatif, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan kelompok marginal.

Dalam hal ini, kebijakan desa memegang peranan penting sebagai ruang diskresi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong emansipasi lokal. Desa diberi keleluasaan untuk menginisiasi program-program inklusif yang selaras dengan karakteristik lokal, potensi yang dimiliki, serta tantangan yang dihadapi. Kebijakan yang baik tidak hanya mendorong pembangunan berbasis potensi, tetapi juga harus memfasilitasi penciptaan keadilan sosial, seperti membuka akses terhadap sumber daya ekonomi, partisipasi politik, serta memperkuat solidaritas dan kolektivitas masyarakat.

Dalam perspektif teori global, Pierre dan Peters (2000) menyatakan bahwa *governance* yang efektif adalah *governance* yang memberi peran besar kepada aktor non-

negara (seperti komunitas, LSM, pendamping, dan tokoh masyarakat) dalam *steering* atau mengarahkan proses pembangunan. Di desa, ini berarti peran tokoh adat, pendamping lokal, dan kelompok rentan menjadi penting dalam mendesain kebijakan.

2. Dimensi Arena Partisipasi

Sebagaimana disampaikan oleh John Gaventa (2004), partisipasi warga terjadi tidak hanya dalam ruang undangan (*invited spaces*), tetapi juga dalam ruang yang diklaim dan diciptakan warga sendiri (*claimed spaces*). Arena informal seperti rasulan dan ronda malam merupakan contoh nyata dari ruang-ruang partisipatif otentik yang memungkinkan kelompok rentan menyuarakan gagasan secara setara. Institut untuk Riset dan *Empowerment* (IRE, 2017) menyebut arena informal sebagai ruang dialog yang autentik yang memiliki potensi besar untuk menghidupkan demokrasi partisipatoris berbasis komunitas. Pendekatan *actor-oriented approach* dari Long (1989) juga menekankan pentingnya memahami masyarakat sebagai aktor aktif yang membentuk ruang partisipasi secara dinamis berdasarkan relasi kuasa dan konteks lokal. Dengan demikian, arena informal menjadi sarana pembelajaran sosial yang transformatif. Ia memungkinkan warga untuk membangun narasi, menyusun strategi, dan memperkuat posisi tawar dalam menghadapi proses pembangunan yang cenderung elitis.

3. Dimensi Aktor

Dimensi terakhir menyangkut aktor-aktor yang terlibat dalam pembangunan desa inklusif. Pemerintahan desa memegang peran sentral, terutama dalam hal kepemimpinan. Diperlukan kepemimpinan progresif yang berpihak pada kelompok rentan dan muncul dari akar rumput. Pemimpin semacam ini bukan hanya bertindak sebagai agen perubahan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem politik desa yang inklusif.

Selain itu, institusi sosial seperti kelompok warga, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas adat juga menjadi ruang penting dalam menumbuhkan inisiatif lokal dan narasi-narasi perubahan. Peran individu warga juga tidak kalah penting. Kesadaran kritis masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam arena formal maupun informal perlu dibangun dan didorong terus-menerus. Nilai dan tradisi lokal yang hidup di masyarakat dapat menjadi dasar moral sekaligus energi sosial dalam menggerakkan perubahan menuju desa inklusif. Keberhasilan pembangunan inklusif bergantung pada sinergi antara aktor struktural dan kultural yang bekerja bersama dalam membentuk arah pembangunan yang adil, partisipatif, dan kontekstual.

j. Pendampingan Desa dalam Konteks Pemberdayaan Prinsip *"No One Left Behind"*

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberi ruang pada paradigma baru dalam pembangunan desa yang diharapkan desa memiliki kemampuan sendiri

dalam membangun desanya. Paradigma ini dikelan dengan istilah Desa Membangun. Paradigma ini dapat dipraktikan apabila di desa tersebut memiliki *agent of change* yang mampu memberikan masukan bagi pembangunan desa. Untuk menjalankan praktik Desa Membangun diperlukan pengembangan kemampuan masyarakat. Dengan demikian upaya pemberdayaan masyarakat menjadi perlu dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder lainnya.

Inti dari pemberdayaan sebagaimana disebutkan dalam Modu.

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen P3MD 2019) memuat 4 (empat) upaya atau proses yaitu:

- a) Suatu upaya atau proses pembangunan yang berkesinambungan, yang berarti dilaksanakan secara terorganisir, dan bertahap dimulai dari tahap permulaan hingga tahap kegiatan tindaklanjut dan evaluasi (*follow-up activity and evaluation*).
- b) Suatu upaya atau proses memperbaiki (*to improve*) kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.
- c) Suatu upaya atau proses menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga prinsip *to help the community to help themselves* dapat menjadi kenyataan.
- d) Suatu upaya atau proses memandirikan masyarakat, dengan cara menggalang partisipasi aktif dalam masyarakat berupa bentuk aksi bersama (*group action*) di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Dengan demikian, seluruh teori yang digunakan dalam penelitian ini membentuk satu sistem konseptual yang saling terhubung, dan menjadi dasar untuk menafsirkan dinamika lapangan secara lebih kritis, sistemik, dan konstruktif.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan keterkaitan antara:

1. Inovasi Pendamping sekolah lapang dalam menjalankan perannya guna mewujudkan desa inklusif.
2. Peran Pendamping sekolah lapang : sebagai inovator, fasilitator, edukator, penghubung masyarakat desa, pemerintah desa, dan instansi pemerintahan di atasnya;
3. Strategi Pendampingan: pendekatan yang digunakan untuk menjangkau kelompok rentan;
4. Pembangunan Desa Inklusif: hasil yang diharapkan berupa keterlibatan aktif seluruh warga, khususnya kelompok rentan dalam proses dan hasil pembangunan yang dilaksanakan;
5. Prinsip *No One Left Behind*: sebagai landasan moral dan normatif.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan Denzin dan Lincoln (2011) bahwa penelitian kualitatif adalah praktik interpretatif yang bertujuan memahami realitas sosial dari perspektif partisipan melalui interaksi dan dokumentasi mendalam. Creswell (2013) menyebutkan penelitian kualitatif bertujuan menggali makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap persoalan sosial yang mereka alami.

Sementara itu, Bogdan dan Biklen (2007), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berorientasi pada proses, bukan hasil akhir. Fokusnya adalah bagaimana sesuatu terjadi, bukan hanya apa yang terjadi. Maka dalam hal ini bisa dijelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mampu memahami berbagai sudut pandang dan makna yang muncul dari interaksi sosial manusia dalam kehidupan sehari-hari bukan mencari kebenaran tunggal.

Studi kasus berdasarkan Yin (2018) adalah metode yang tepat ketika peneliti ingin menjawab pertanyaan ‘bagaimana’ dan ‘mengapa’ suatu fenomena sosial terjadi, dalam konteksnya yang dialami dan kompleks. Studi kasus merupakan penyelidikan empiris yang mendalam terhadap suatu fenomena nyata yang tidak dapat dilepaskan dari konteksnya. Hal serupa diungkapkan Stake (1995), bahwa studi kasus adalah bentuk penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu kasus tertentu, dengan memperhatikan konteks di mana kasus tersebut terjadi. Artinya studi kasus ini merupakan penelitian terhadap keunikan dan kompleksitas sebuah kasus dengan

tujuan memahami kegiatan atau fenomena yang terjadi dalam konteks dan kondisi penting yang melingkupinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus instrumental (*instrumental case study*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam bagaimana inovasi Pendamping sekolah lapang dalam proses pembangunan desa yang inklusif berdasarkan prinsip *No One Left Behind*.

B. Lokasi dan Subjek Penelitian

Kalurahan Petir, Kapanewon Rongkop dan Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul dan Pendamping P3PD Program Sekolah Lapang.

C. Sumber Data

Sumber data dihimpun untuk mendukung analisis dari responden melalui Wawancara secara mendalam/Diskusi terarah, Dokumen pendamping, dokumen pemerintah desa, laporan kegiatan yang sesuai, statistik desa dan instansi terkait, serta kajian akademik atau laporan evaluatif dari lembaga riset.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara mendalam (*In-depth Interview*)

Merupakan teknis pengumpulan data yang bertujuan untuk menggali informasi secara lebih mendalam mengenai pandangan, pengalaman, dan pemahaman subyek terhadap suatu fenomena. Sutama (2015) menyatakan bahwa wawancara mendalam memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengungkapkan makna dari pengalaman subyektif informan dan memungkinkan informan untuk menjelaskan secara terbuka pandangan, perasaan, dan pengalamannya. Hal serupa juga dinyatakan Sugiyono (2017)

bahwa wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber yang memiliki pengalaman langsung terkait dengan fenomena yang diteliti, yang memberikan kebebasan bagi informan untuk menyampaikan pendapat dan pengalamannya.

Dalam konteks ini, wawancara mendalam digunakan untuk menggali inovasi, strategi dan pengalaman berupa kendala dan hambatan atau tantangan pendamping secara mendalam dalam pembangunan desa inklusif dengan prinsip *No One Left Behind*.

Wawancara mendaam ini dilakukan kepada Pendamping sekolah lapang sebanyak tiga orang (sesuai kuota pendamping di Kabupaten Gunungkidul), Pengurus Sekolah Lapang di Kalurahan Ngipak dan Kalurahan Petir, Lurah, Perwakilan Unsur Kelompok Rentan, dan Tokoh Masyarakat. Adapun informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel II-1. Sumber Data Informan *Indepht*

No.	Nama	L/K	Usia	Pendidikan	Pekerjaan
1	Rosyid efendi	L	45	S 1	Pendamping SL
2	Salwa Malihana	P	22	S 1	Pendamping SL
3	Ika P	P	35	S 1	Pendamping SL
4	Bambang S	L	39	S 1	Lurah Ngipak
5	Sarju	L	-	S 1	Lurah Petir
6	Pratama Windar	L	-	S 1	Pamong Petir
7	Nuri Widi P	L	45	S 1	Pamong Ngipak
8	Pathcudin	L	55	S 1	Pamong Ngipak
9	Sumardi	L	-	SMP	Dukuh Ploso

Data informan tersebut merupakan sumber utama dalam wawancara mendalam (*Indepth*), adapun sumber informan lain pada saat observasi lapangan tidak dicantumkan.

2. Observasi Partisipatif

Menurut Moleong (2010) adalah teknik yang digunakan untuk mengamati dan ikut serta dalam aktivitas yang sedang berlangsung, memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih valid dan autentik tentang fenomena yang diteliti. Pernyataan serupa juga disampaikan Bungin (2013) yang menyatakan observasi partisipatif mengharuskan peneliti tidak hanya mengamati, tetapi juga terlibat dalam aktivitas yang dilakukan oleh subyek penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih mendalam mengenai situasi yang sedang diamati.

Dalam hal ini observasi dilakukan melalui pengamatan langsung pendampingan dan proses interaktif Pendamping dengan pengurus Sekolah Lapang dan Kegiatan di Kalurahan Ngipak serta interaksi warga masyarakat dalam keseharian dengan warga disabilitas di dusun Ploso, Kalurahan Petir.

3. Studi Dokumentasi

Yin (2011) menjelaskan bahwa studi dokumentasi memberikan data sekunder yang berharga dengan menganalisis dokumen yang terstruktur dan sistematis, yang dapat memperkaya data dari sumber primer dalam penelitian. Sedangkan Arikunto (2013) menjelaskan bahwa dokumentasi sebagai metode pengumpulan data sering digunakan untuk menambah pemahaman mengenai latar belakang dan konteks suatu fenomena sosial, terutama ketika data primer sulit diperoleh. Untuk penelitian ini, dimungkinkan

menganalisis dokumen terkait legalitas pendamping, pelaksanaan program sekolah lapang, dan *out put* dari kerja inovatif pendamping dalam Dokumen RPJMdes, BA Musyawarah Desa, Dokumen Sekolah Lapang, Laporan kegiatan pendamping, dokumen SDGs Desa. Adapun data dokumentasi yang dijadikan sumber penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel II-2. Sumber Data Dokumentasi

No.	Nama	Tahun	Wilayah
1	Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka	2025	Pemkab Kab. Gunungkidul
2	Data Agregat Kependudukan Kabupaten Gunungkidul Sem. 1	2024	Dukcapil
3	Data Agregat Kependudukan Kabupaten Gunungkidul Sem. II	2024	Dukcapil Gunungkidul
4	LPPK Ngipak	2024	Kal. Ngipak
5	LPPK Petir	2024	Kal. Petir
6	Perkal Ngipak No 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kalurahan tahun 2025	2024	Kal. Ngipak
7	Perkal No. 6 tahun 2024 tentang RKPK Tahun 2025	2024	Kal. Petir
8	Keputusan Lurah Ngipak No 50 Tahun 2024 tentang Sekolah Lapang Desa Inklusif Kal, Ngipak	2024	Kal. Ngipak
9	Kecamatan rongkop dalam angka	2023	Kapanewon Rongkop
10	Keputusan Lurah Petir No 34/KPTS/2023 tentang Sekolah Lapang Desa Inklusif	2023	Kal. Petir
11	Surat Penetapan Tim Lokal Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) Wilayah Tengah	2023	Kemendes PDDT dan Lakspedam PBNU
12	Perkal No. 3 Tahun 2022 tentang RPJM Kalurahan 2022-2027	2022	Kal. Ngipak

13	Buku Monografi Desa Petir Keadaan Sem II	2019	Kaurahan Petir
----	---	------	----------------

E. Teknik Pemilihan Informan

Informan dipilih secara purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, misal orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan (Sugiyono, 2017). Sementara Moeleong (2017) menjelaskan bahwa informan dipilih secara purposif, yaitu dengan sengaja memilih orang-orang yang dianggap tahu dan bisa dipercaya untuk menjadi sumber data yang lengkap, valid, dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian. Berdasarkan peran dan keterlibatannya dalam Sekolah Lapang maka informan yang direncanakan dipilih antara lain:

1. Pendamping sekolah lapang (Utama)
2. Kepala Desa/Perangkat desa
3. Pengurus Sekolah Lapang
4. Perwakilan kelompok rentan (perempuan, remaja, lansia, warga miskin, penyandang disabilitas)
5. Tokoh Masyarakat / Anggota lembaga desa.

Jumlah informan akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan prinsip saturasi data yakni data dianggap cukup jika tidak ada informan baru yang muncul.

F. Teknik validasi data

Untuk menjamin keabsahan data dalam kajian ini digunakan beberapa teknik validasi data berdasarkan pendekatan Lincoln dan Guba (1985) yang mencakup uji derajat kepercayaan (*Credibility*), keteralihan, kebergantungan, dan kepastian.:

1. Uji derajat kepercayaan (*Credibility*), untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian dengan memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan pandangan subyek yang diteliti serta keadaan yang relevan di lapangan, teknik yang digunakan untuk menguji kredibilitas adalah triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member check.
 - a. Triangulasi Sumber menurut Moeleong (2010) diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam hal ini dengan membandingkan data dari pendamping, perangkat desa, dan kelompok rentan.
 - b. Triangulasi Metode, yakni dilakukan dengan menggabungkan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.
 - c. Member check atau umpan balik dari informan, Sugiyono (2017) menyebutkan bahwa member check merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, apakah data yang dikumpulkan sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh pemberi data.
2. Uji Keteralihan (*Trasnferability*), Moleong (2010) mengungkapkan bahwa keteralihan berkaitan dengan kemampuan temuan penelitian untuk diterapkan dalam kontek yang berbeda dengan kondisi yang serupa. Dalam hal ini penyajian diskripsi kontekstual diupayakan dapat lebih terinci dan detail mengenai kondisi dan dinamika di lapangan (*thick description*).

3. Uji Kebergantungan (*Dependability*), digunakan untuk mengukur konsistensi hasil kajian. Untuk itu digunakan audit trial atau pelacakan proses penelitian secara transparan. Bungin (2013) menyatakan bahwa *audit trial* adalah metode untuk memverifikasi konsistensi proses penelitian yang dilakukan dengan menyediakan jejak audit yang sistematis mengenai langkah-langkah penelitian.
4. Uji Kepastian (*Confirmability*), dijelaskan oleh Moleong (2010) bahwa *confirmability* menjamin bahwa hasil penelitian berasal dari data yang dikumpulkan, bukan dari bias peneliti. Teknik yang dipakai adalah *Peer Debriefing*, yakni diskusi dengan dosen pembimbing dan sejawan untuk meninjau interpretasi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam kajian ini dilakukan dengan pendekatan Miles dan Huberman (1994) yang mencakup tiga langkah utama:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*), proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksi data dari catatan lapangan, wawancara, maupun dokumentasi.

Reduksi data dilakukan sejak awal proses pengumpulan data dan berlangsung secara terus-menerus sepanjang proses penelitian. Dalam konteks penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, menyederhanakan, serta mengabstraksi data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu wawancara mendalam dengan pendamping Sekolah Lapang Desa Inklusif (SLDI), pengurus SLDI, kepala desa/lurah, dan tokoh masyarakat; dokumentasi berupa Peraturan Kalurahan (Perkal), laporan kegiatan pendamping, serta catatan program; dan hasil observasi lapangan di beberapa dusun tempat pelaksanaan kegiatan SLDI.

Reduksi data dilakukan berdasarkan tiga fokus utama penelitian, yakni: (1) inovasi pendamping dalam pembangunan desa inklusif, (2) strategi pemberdayaan kelompok rentan, dan (3) tantangan penerapan prinsip *No One Left Behind* di tingkat desa. Informasi yang tidak relevan disisihkan, sementara data yang berkaitan dengan tema-tema tersebut dikategorikan secara sistematis sesuai dengan kerangka analisis awal. Proses ini bertujuan untuk menyaring data yang bermakna dan mendalam, serta mendukung peneliti dalam menyusun pemahaman awal terhadap dinamika peran pendamping desa inklusif secara kontekstual

2. Penyajian Data (*Data Display*),

Setelah proses reduksi data, langkah berikutnya dalam analisis adalah penyajian data (*data display*), yaitu mengorganisasikan data yang telah dipilah dalam bentuk yang sistematis agar memudahkan peneliti melihat pola, hubungan antartema, serta memfasilitasi penarikan kesimpulan yang bermakna (Miles & Huberman, 1994).

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan secara naratif dan visual tematik, dengan mengelompokkan data berdasarkan tiga fokus utama penelitian, yaitu:

a. Inovasi Pendamping Sekolah Lapang dalam Pembangunan Desa Inklusif

Data disajikan dalam bentuk narasi tematik yang menggambarkan berbagai bentuk inovasi yang dilakukan oleh pendamping, seperti metode pelibatan warga rentan melalui pendekatan informal, kegiatan berbasis dusun, serta pemanfaatan forum warga. Narasi ini diperkuat dengan kutipan wawancara dari pendamping dan pengurus Sekolah Lapang (SL), dokumentasi

kegiatan, serta observasi lapangan. Untuk memperjelas dinamika inovasi, data juga disajikan dalam bentuk matriks aktivitas dan hasilnya di tingkat desa atau dusun.

b. Strategi Menjangkau Kelompok Rentan

Data yang menunjukkan upaya pendamping dan perangkat desa dalam menjangkau kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia terlantar, anak putus sekolah, dan warga tanpa NIK, disusun dalam narasi deskriptif. Narasi ini menunjukkan strategi seperti pendekatan berbasis keluarga, pemetaan sosial berbasis RT, serta kolaborasi dengan pemerintah desa dan kader. Data pendukung ditampilkan dalam bentuk tabel pelibatan aktor dan dokumentasi hasil pendataan kelompok rentan.

c. Tantangan Penerapan Prinsip No One Left Behind

Penyajian data pada bagian ini memuat berbagai hambatan yang dihadapi, baik dari sisi sosial-budaya (seperti stigma terhadap ODGJ), kelembagaan (terbatasnya regulasi dan dukungan anggaran), maupun teknis (keterbatasan data atau partisipasi warga). Narasi disusun berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan (pendamping, pengurus, lurah, dan tokoh masyarakat), serta dilengkapi dengan catatan lapangan dan dokumentasi kegiatan. Tabel hambatan dan potensi solusi lokal disertakan untuk memperlihatkan respons masyarakat dan perangkat desa terhadap tantangan tersebut.

Penyajian data juga memperhatikan konteks sosial yang ada, serta memanfaatkan kutipan langsung (*clean verbatim*) dari informan untuk menjaga keotentikan suara lapangan. Penyajian secara tematik ini bertujuan tidak hanya menyampaikan

informasi, tetapi juga untuk mengungkap makna, hubungan antaraktor, dan dinamika sosial yang menjadi dasar pemahaman atas peran pendamping dalam membangun desa yang inklusif dan berkeadilan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawaing and verification*),

Tahap akhir dalam analisis data ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan secara bertahap dan terus-menerus sepanjang proses penelitian. Penarikan kesimpulan tidak dilakukan secara tiba-tiba di akhir proses, melainkan dimulai sejak tahap awal pengumpulan data, kemudian berkembang dan diuji ulang seiring dengan proses reduksi dan penyajian data (Miles & Huberman, 1994).

Dalam konteks penelitian ini, kesimpulan ditarik dari pola-pola tematik yang muncul secara konsisten dari berbagai sumber data, baik hasil wawancara mendalam dengan pendamping, pengurus SL, lurah, dan tokoh masyarakat; dokumen kegiatan dan regulasi desa; maupun hasil observasi lapangan di dusun. Misalnya, jika dari berbagai informan ditemukan bahwa pendekatan berbasis keluarga menjadi strategi utama dalam menjangkau kelompok rentan, maka hal tersebut diidentifikasi sebagai pola atau temuan penting.

Untuk menjaga validitas dan akurasi, proses penarikan kesimpulan disertai dengan verifikasi secara sistematis, yaitu:

- a. Triangulasi sumber data, dengan membandingkan informasi dari informan yang berbeda (pendamping, kepala desa, tokoh masyarakat).

- b. Triangulasi metode, yaitu membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan.
- c. Konfirmasi hasil temuan kepada informan kunci, sebagai bentuk member check untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti tidak menyimpang dari realitas lapangan.
- d. Diskusi dengan rekan sejawat atau pembimbing, untuk memperoleh second opinion atas temuan yang dianggap penting atau problematis.

Proses ini membantu peneliti menyusun kesimpulan yang logis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mencerminkan realitas sosial mengenai peran pendamping dalam mewujudkan pembangunan desa inklusif yang berorientasi pada prinsip No One Left Behind.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Program Sekolah Lapang Desa Inklusif

Sekolah Lapang Desa Inklusif (SLDI) merupakan program pembelajaran masyarakat berbasis desa yang dikembangkan dengan tujuan mendorong keterlibatan aktif seluruh kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam proses pembangunan. Pendekatan ini mengedepankan prinsip *No One Left Behind* (NOLB), dengan mendorong desa agar mengidentifikasi kelompok yang terpinggirkan dan memastikan mereka terlibat dalam musyawarah, perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program desa.

Program SLDI di Kabupaten Gunungkidul telah berjalan sejak tahun 2023, dilaksanakan di 8 desa dampingan, dengan dukungan organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan. Di setiap desa, dilaksanakan pertemuan belajar rutin yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari kader, RT/RW, pemerintah desa, hingga kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga, dan kelompok miskin ekstrem.

B. Profil Pendamping dan Pengurus Sekolah Lapang Desa Inklusif

Pelaksanaan Program Sekolah Lapang Desa Inklusif (SLDI) di Kabupaten Gunungkidul merupakan bagian dari implementasi Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) Subkomponen 2B yang dijalankan atas kerjasama antara Kementerian Desa PDTT dan LAKPESDAM PBNU. Untuk mendukung program ini, telah ditetapkan tim pendamping teknis dan struktur pengurus lokal di tingkat desa yang

bertanggung jawab dalam memfasilitasi proses belajar warga dan mendorong terciptanya desa inklusif dengan prinsip no one left behind.

Di tingkat kabupaten, pendampingan difokuskan oleh tim fasilitator yang terdiri dari tiga orang. Rosied Efendi bertindak sebagai Koordinator Tim, dengan tanggung jawab utama dalam mengoordinasikan teknis pelaksanaan rintisan dan replikasi desa inklusif di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul. Ia juga berperan menjembatani komunikasi antara tim teknis, fasilitator lapangan, dan LAKPESDAM PBNU pusat serta mengawasi kualitas fasilitasi dan pelaporan kegiatan.

Pendamping teknis lainnya adalah Salwa Amalia Hanafi dan Roni Fadli (ed.pengganti IkaP). Salwa memiliki tanggung jawab sebagai fasilitator langsung kegiatan sekolah lapang di desa lokus, termasuk memimpin proses fasilitasi pembelajaran, pemetaan sosial partisipatif, serta pengelolaan modul dan catatan kegiatan. Sementara itu, Roni Fadli berperan mendukung pelaksanaan kegiatan tematik seperti advokasi difabilitas, pemberdayaan perempuan, dan inklusi sosial lainnya. Ia juga berfungsi sebagai pelapor dan penghubung antara peserta sekolah lapang dengan pemerintahan desa dalam menyuarakan hasil-hasil pembelajaran ke ruang musyawarah desa.

Sebagai pelengkap dari sistem pendampingan ini, Kalurahan Petir di Kapanewon Rongkop dan Kalurahan Ngipak Kapanewon Karangmojo membentuk struktur pengurus lokal Sekolah Lapang Desa Inklusif yang ditetapkan secara resmi oleh Lurah melalui Surat Keputusan. Untuk Pengurus Sekolah Lapang Desa Inklusi di Kalurahan Petir melalui Keputusan Lurah Petri Nomor 34/KPTS/2023 tentang Sekolah Lapang Desa Inklusi, dan di Kalurahan Ngipak melalui Keputusan Lurah Ngipak

Nomor 50 Tahun 2024 tentang Sekolah Lapang Desa Inklusi Kalurahan Ngipak.

Berdasarkan ketentuan pada diktum I dan II dalam keputusan tersebut, Sekolah Lapang dimaknai sebagai ruang edukasi kolektif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, disabilitas, anak-anak, tokoh masyarakat, serta aparat kalurahan. Tujuan dari pembentukan ruang ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran kritis warga, memperkuat partisipasi dalam perencanaan pembangunan, serta mengembangkan kapasitas warga sebagai kader penggerak perubahan sosial.

Adapun struktur organisasi pengurus Sekolah Lapang Desa Inklusif Kalurahan Ngipak disusun secara fungsional untuk menjalankan lima peran utama, sebagaimana diatur dalam Diktum IV:

1. Koordinator Sekolah Lapang;
yang bertanggung jawab memimpin perencanaan dan pelaksanaan keseluruhan kegiatan sekolah lapang. Koordinator juga berperan dalam menjembatani komunikasi antara warga peserta, perangkat desa, dan pendamping P3PD.
2. Penanggung Jawab Administrasi;
menjalankan fungsi administratif dan dokumentatif. Ia bertugas memastikan tertib pencatatan kehadiran peserta, notulensi, serta pengarsipan dokumen pembelajaran.
3. Penanggung Jawab Pelatihan;
bertanggung jawab atas penyusunan materi dan pelaksanaan sesi-sesi pelatihan. Peran ini memastikan konten pembelajaran kontekstual dan menyentuh kebutuhan kelompok rentan di desa.
4. Penanggung Jawab Mobilisasi Peserta;

mengorganisasi keterlibatan warga dari berbagai latar belakang untuk aktif hadir dan terlibat dalam proses belajar. Ia juga memfasilitasi komunikasi antar peserta dan mengantisipasi hambatan partisipasi.

5. Pengawalan Daftar Usulan (Dausul);

memimpin proses perumusan dan penyampaian daftar usulan hasil sekolah lapang ke dalam forum musyawarah desa. Peran ini krusial dalam menghubungkan aspirasi warga marginal ke dalam siklus perencanaan desa.

Selain lima posisi inti tersebut, pengurus juga melibatkan anggota dari kelompok disabilitas dan perempuan, yang berfungsi sebagai representasi komunitas warga terdampak langsung oleh kebijakan inklusi. Mereka dilibatkan secara aktif dalam penyusunan materi, pelaksanaan kegiatan, hingga proses advokasi di tingkat desa.

C. Lokasi dan Karakteristik Desa Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua desa yang menjadi lokasi dampingan Program Sekolah Lapang Desa Inklusif di Kabupaten Gunungkidul, yakni Desa Ngipak di Kecamatan Karangmojo dan Desa Petir di Kecamatan Rongkop. Masing-masing desa memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda, sehingga memberikan keragaman konteks yang memperkaya kajian terhadap strategi dan peran pendamping SLDI.

1. Desa/Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo

a) Demografi

Kalurahan Ngipak merupakan salah satu kalurahan di wilayah Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul yang terletak sekitar 10 kilomtere sebelah timur Ibu Kota Kabupaten. Akses jalan menuju desa ini tergolong baik, dengan infrastruktur

transportasi yang memadai. Wilayahnya relatif datar, dengan kontur tanah cocok untuk pertanian dan pemukiman. Secara geografis berada pada 7°56' LS 7°58' dan 110°40' BT 110°41' dengan luas wilayah 559,60 Ha atau sekitar 0,38% dari luas wilayah Kabupaten Gunungkidul. Kalurahan Ngipak terdiri dari 10 Padukuhan yang terdiri dari 35 RT dan 9 RW dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah barat berbatasasn dengan Kalurahan Kelor, Kapanewon Karangmojo.
- 2) Sebelah Utara berbatasasn dengan Kalurahan Ngawis dan Kaurahan Gedangrejo, Kapanewon Karangmojo.
- 3) Sebelah Timur berbataasn dengan Kalurahan Karangmojo, Kapanewon Karangmojo.
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kalurahan Kelor Kapanwon Karangmojo dan Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu.

b) Kependudukan

Jumlah penduduk di Kalurahan Ngipak pada tahun 2024 adalah 3.641 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.292 KK. Perbandingan penduduk Kalurahan Ngipak berdasar jenis kelamin adalah jumlah penduduk perempuan lebih banyak yakni jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.891 jiwa atau sekitar 52 % dari pada jumlah penduduk laki-laki yakni 1.750 jiwa atau sekitar 48 %. Adapun jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia dan pekerjaan adalah sebagai berikut:

Tabel III-4 Jumlah Penduduk Berdasar Kelompok Usia Bayi,
Balita dan Usia Produktif

Kelompok Usia (tahun)	Jumlah (Jiwa)	Prosentase (%)
0 – 1	51	1
2 – 5	151	4
6 – 14	408	11
15 – 65	2.504	69
65 tahun keatas	527	15
JUMLAH	3.641	100

Sumber: Perkal Ngipak Nomor 3/2024 tentang RKPK Tahun 2025

Berdasarkan data tersebut terdapat sejumlah kelompok rentan dan perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan. Perempuan mencakup 52% dari total penduduk, hal ini menunjukkan pentingnya pengarusutamaan gender agar perempuan memiliki ruang partisipasi yang setara. Selain itu, jumlah anak-anak (0-14 tahun) sebanyak 16% dan lansia (>65 tahun) sebanyak 15 % dari populasi menunjukkan perlunya layanan dasar yang menjangkau usia non produktif misal pendidikan, gizi, kesehatan, serta perlindungan sosial. Sedangkan kelompok usia produktif yang mendominasi komposisi populasi penduduk sekitar 69% didalamnya tidak menutup kemungkinan terdapat kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, difabel, dan warga miskin yang memerlukan kebijakan afirmatif. Dengan jumlah kepala keluarga di Kalurahan Ngipak sebanyak 1.292 KK maka untuk pendataan sosial yang lebih inklusif penting untuk dilaksanakan sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis prinsip *No One Left Behind*.

Pekerjaan penduduk Kalurahan Ngipak mayoritas adalah sebagai petani, untuk jumlah penduduk yang belum bekerja masih relatif tinggi. Kondisi penduduk berdasarkan pekerjaan dan mata pencahariannya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel III-5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan dan Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan/Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
Buruh tani/perkebunan	49
Pensiunan	66
PNS	64
Wiraswasta	87
Buruh Harian Lepas	166
Karyawan Swasta	422
Mengurus Rumah Tangga	400
Petani	1.037
Pelajar/Mahasiswa	543
Lainnya	124
Belum/Tidak bekerja	683
Jumlah	3.641

Sumber: Perkal Ngipak Nomor 3/2024 tentang RKPK Tahun 2025

Struktur pekerjaan penduduk Kalurahan Ngiapak menunjukan bahwa mayoritas penduduk bekerja sebagai petani (1.0327 jiwa), hal ini dapat mengindikasikan ketergantungan pada produktifitas dan pendapatan cenderung fluktuatif. Selain itu, kelompok yang bekerja sebagai buruh harian lepas (166 jiwa) dan buruh tani (49 jiwa) secara struktural berada dalam posisi rentan akibat ketidakpastian pendapatan dan ketiadaan ketersediaan jaminan kerja. Di sisi lain jumlah penduduk yang belum atau tidak bekerja tergolong tinggi yakni mencapai 683 jiwa sehingga berpotensi

menjadi kelompok rentan secara ekonomi jika tidak ada intervensi. Dan dengan tingginya penduduk dengan status pekerjaan mengurus rumah tangga (400 jiwa) dan pelajar/mahasiswa (543 jiwa) menunjukkan pentingnya penyediaan akses terhadap pendidikan dan pelatihan serta kegiatan ekonomi produktif berbasis rumah tangga atau komunitas, meskipun terdapat 422 jiwa yang bekerja sebagai karyawan swasta dan 87 jiwa sebagai wiraswasta, distribusi ini belum cukup kuat menandakan adanya diversifikasi ekonomi yang merata. Penting bagi pemerintah merancangan program pemberdayaan ekonomi yang mampu menjangkau kelompok rentan melalui pelatihan, akses permodalan dan penguatan ekonomi berbasis komunitas.

c) Pendidikan

Pendidikan penduduk Kalurahan Ngipak paling banyak adalah tamat SLTA/ sederajat. Namun penduduk yang tidak/ belum sekolah juga cukup signifikan jumlahnya. Adapaun kondisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kalurahan Ngipak dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III - 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
Tidak/Belum Sekolah	903
Belum Tamat SD/ Sederajat	364
Tamat SD/ Sederajat	556
Tamat SLTP/ Sederajat	679
Tamat SLTA/ Sederajat	949
D I/ D II	18
Akademi/ Diploma III	40
Diploma IV/ Strata I	125

Strata II	7
Strata III	-
Jumlah	3.641

Sumber: Perkal Ngipak Nomor 3/2024 tentang RKPK Tahun 2025

Mayoritas penduduk Kalurahan Ngipak menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SLTA/ sederajat (949 jiwa), menunjukkan capaian pendidikan menengah yang cukup baik. Namun demikian, terdapat 903 jiwa yang tidak atau belum sekolah, serta 364 jiwa yang belum tamat SD, yang mencerminkan tantangan serius dalam akses pendidikan dasar. Rendahnya jumlah lulusan pendidikan tinggi (Strata I hanya 125 jiwa, dan jenjang di atasnya nihil) juga mengindikasikan keterbatasan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan dalam akses pendidikan yang berpotensi memperbesar ketimpangan sosial di kemudian hari.

d) Kesehatan

Diketahui jumlah balita di Kalurahan Ngipak pada tahun 2024 sebanyak 168 orang yang kesemuanya dalam cakupan imunisasi. Sedangkan untuk kematian bayi (IMR) tidak ditemukan pada dua tahun terakhir, sebelumnya ditemukan 1 kasus pada tahun 2022. Dan jumlah balita gizi buruk mengalami penurunan, ditemukan masih terdapat sebanyak 18 orang dengan status gizi buruk. Adapun sarana Kesehatan di Padukuhan Ngipak dalam bentuk Posyandu berjumlah sebanyak 10 Posyandu yang berada di tiap padukuhan.

Data indikator kesehatan pada Kalurahan Ngipak dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III - 7 Jumlah Indikator Kesehatan

Uraian	Jumlah Orang ppada Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Penolong Balita Tenaga Kesehatan	4	4	4	4
Angka Kematian Bayi / IMR	-	1	-	-
Angka Kematian Ibu Melahirkan / MMR	-	-	-	-
Cakupan Imunisasi	180	180	155	168
Balita Gizi Buruk	19	14	19	18

Sumber : Perkal Ngipak Nomor 3/2024 tentang RKPK Tahun 2025

Kondisi kesehatan di Kalurahan Ngipak dapat dilihat positif, terutama dalam cakupan imunisasi yang menjangkau seluruh balita (168 jiwa) pada tahun 2024, tidak ditemukan kasus kematian bayi (IMR) selama dua tahun terakhir, dan tidak ada kematian ibu melahirkan (MMR) dalam empat tahun terakhir. Hal ini menandakan efektivitas pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa.

Meski demikian, masih terdapat 18 balita dengan status gizi buruk, yang meskipun menunjukkan tren menurun, tetap harus menjadi perhatian karena mengindikasikan adanya kelompok yang belum sepenuhnya terjangkau oleh program perbaikan gizi. Keberadaan 10 Posyandu di setiap padukuhan menjadi kekuatan penting dalam mendekatkan layanan kesehatan terutama dalam hal edukasi gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak.

e) Agama

Penduduk Kalurahan Ngipak memeluk agama Islam, Kristen, dan Katolik. Jumlah mayoritas penduduk beragama Islam yakni sebanyak 3.425, penduduk dengan agama Kristen sebanyak 123 orang, dan penduduk dengan agama Katolik sebanyak 93 orang. Jumlah penduduk berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III - 8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Agama	Jumlah (Jiwa)
Hindu	-
Budha	-
Khatolik	93
Kristen	123
Islam	3.425
JUMLAH	3.641

Sumber: Perkal Ngipak Nomor 3/2024 tentang RKPK Tahun 2025

Mayoritas penduduk Kalurahan Ngipak beragama Islam, yaitu sebanyak 3.425 jiwa. Sementara itu, terdapat 123 jiwa yang memeluk agama Kristen dan 93 jiwa beragama Katolik. Penting bagi desa untuk memastikan bahwa layanan publik, forum warga, dan akses terhadap program pembangunan menjangkau semua kelompok agama tanpa diskriminasi, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas agar tidak mengalami pengucilan atau keterbatasan partisipasi dalam kehidupan sosial desa.

f) Ekonomi

Angka kemiskinan di Kalurahan Ngipak tergolong cukup tinggi, tingkat kemiskinan ini mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebagai dampak pandemi Covid-19 yakni sebanyak 960 KK

miskin, dan mengalami penurunan pada tahun 2023 yakni dengan jumlah sebanyak 907 KK miskin dan terus mengalami penurunan di tahun 2024. Adapun angka kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III - 9 Tingkat Kemiskinan

Tahun	Jumlah (KK)		
	Miskin	Tidak Miskin	Total
2024	896	396	1.292
2023	907	394	1.301
2022	960	361	1.321
2021	783	511	1.294

Sumber: Perkal Ngipak Nomor 3/2024 tentang RKPK Tahun 2025

Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kalurahan Ngipak tergolong cukup tinggi. Peningkatan jumlah keluarga miskin terjadi pada tahun 2022, dengan 960 KK tercatat dalam kategori miskin, sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Meskipun setelah itu angka kemiskinan terus mengalami penurunan — menjadi 907 KK pada 2023 dan 896 KK pada 2024 — proporsinya masih mendominasi jumlah total kepala keluarga. Dengan lebih dari 69% KK tergolong miskin pada tahun 2024. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sebagian besar penduduk hidup dalam keterbatasan ekonomi. Hal ini menandakan perlunya intervensi afirmatif yang menyangar langsung kebutuhan dasar, akses pekerjaan, serta jaminan sosial.

g) Pemerintahan Kalurahan Ngipak

Struktur organisasi pemerintahan Kalurahan Ngipak sesuai dengan Perkal Ngipak Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Ngipak adalah sebagai berikut:

Tabel III - 10 Daftar Pamong KaLurahan Ngipak

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Bambang Setiawan, S.Pd.I	Lurah	S 1
2	Noviyantirini Sripna, S.E	Carik	S 1
3	Surahyo	Kaur Danarta	SMA
4	Sri Rusdiyati, S.I.P	Kaur Tatalaksana	S 1
5	Yulianto, S.Pt	Kaur Pangripta	S 1
6	Nuri Widi Hartono, S.I.P	Jagabaya	S 1
7	Tika Setyaningrum, A.Md.	Ulu-Ulu	D III
8	Patkhudin, S.I.P	Kamituwa	S 1
9	Edi Purwanto	Dukuh Ngipak	SMA
10	Indarti	Dukunh Munggur	SMA
11	Wahrudin	Dukuh Coyudan 1	SMA
12	Ngatiyar	Dukuh Coyudan 2	SMA
13	Prayoga	Dukuh Jetis	SMA
14	Wahana Budi Santosa	Dukuh Dungkasi	SMA
15	Kartikaratna Wijayanti, A.Md	Dukuh Karangwetan	D III
16	Ramad Didik Siswanto	Dukuh Kalangan 1	SMA
17	Yatilah	Dukuh Kalangan 2	SMA
18	Ngadiman	Staf Pamong Kal.	SMA
19	Catarina Nursilawati	Staf Pamong Kal.	SMP
20	Widodo Tri Admaji	Staf Pamong Kal.	SMA
21	F. Erni Kusumaningsih, S.S	Staf Pamong Kal.	S 1

Sumber: Perkal Ngipak Nomor 3/2024 tentang RKPK Tahun 2025

Stuktur organisasi pemerintahan tersebut mencerminkan komposisi bahwa pemerintahan desa telah memiliki dasar kapasitas sumber daya manusia yang cukup memadai secara formal. Dengan formasi sebanyak 21 orang pamong sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan SMA sebanyak sepuluh orang dan S1 sebanyak sembilan orang dan hanya terdapat satu staf dengan pendidikan SMP. Namun demikian, bahwa sebagian

besar dukuh masih berlayat belakang pendidikan menengah dimungkinkan berdampak pada keterbatasan dalam aspek perencanaan, digitaisasi data, dan fasilitasi program-program pembangunan yang menuntut spesifikasi kemampuan teknis. Dari representasi gender, posisi strategis seperti carik dan kaur tatalakasana telah diisi oleh perempuan, hal ini merupakan indikasi awal bahwa pengarusutamaan gender mulai diakomodasi dalam struktur pemerintahan.

2. Desa/Kalurahan Petir, Kapanewon Rongkop

Kalurahan Petir berada di bagian Tenggara Wilayah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan luas wilayah 1.025.537 Ha (data sensuai), 995.435 Ha (data legger Kaurahan). Secara geografis wilayah Kalurahan Petir berada di kawasan perbukitan karst dan tergolong sebagai desa dengan akses transportasi yang terbatas. Sebagian besar wilayahnya terdiri atas lahan kering dan bebatuan, sehingga memiliki tantangan tersendiri dalam aspek pertanian dan mobilitas sosial. Meski demikian, masyarakat Kalurahan Petir berprofesi sebagai petani dengan lahan pertanian tegal dan lahan kering sistem tadah hujan.

d. Demografi

Kelurahan petir merupakan bagian dari wilayah Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul yang berjarak dari ibu kota kecamatan ± 4 km dan jarak dari ibu kota kabupaten ± 24 km. Wilayah Kalurahan Petir terletak pada ketinggian antara 0 – 800 mdpl (meter di atas permukaan laut). Untuk batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara : Kalurahan Pucanganom, Kapanewon Rongkop
- 2) Sebelah Selatan : Kalurahan Botodayakan, Kapanewon Rongkop
- 3) Sebelah Timur: Kalurahan Pringombo, Kapanewon Rongkop
- 4) Sebelah Barat : Kalurahan Dadapayu, Kapanewon Semanu

Kalurahan Petir terbagi dari 13 Padukuhan dengan 13 Rukun Warga dan 35 Rukun Tetangga.



Gambar 1.1 Peta Wilayah Desa Petir

e. Kependudukan

Jumlah penduduk Kaurahan Petir per Juni 2024 sebanyak 3.610 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.825 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.785 jiwa dan terbagi dalam 1.234 Kepala Keluarga. Berikut jumlah penduduk dalam bentuk tabel:

Tabel III - 11 Jumlah Penduduk dan KK

Jumlah penduduk			Jumlah KK
Laki-laki	Perempuan	Total	
1.825	1.785	3.610	1.234

Sumber: Monografi Kaurahan etir Semester I tahun 2024

Jumlah penduduk Kalurahan Petir secara komposisi gender menunjukkan proporsi yang cukup berimbang dengan selisi kecil antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Dari sisi jumlah kepala keluarga, rasio penduduk terhadap keluarga menunjukkan rata-rata 2 – 3 jiwa per KK, hal ini dapat mengindikasikan pola rumah tangga kecil atau adanya rumah tangga inti.

Dilihat dari pekerjaan atau mata pencaharian penduduk Kalurahan Petir terbanyak adalah petani/pekebun yakni 1.462 jiwa. Adapun data penduduk Kalurahan Petir secara pilah sesuai kriterianya adalah sebagai berikut:

Tabel III - 12 Data Penduduk Kalurahan Petir berdasarkan Pekerjaan atau Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PNS	16	7	23
Polri	2	0	2
Karyawan Swasta	265	128	393
Wiraswasta	220	72	292
Petani/Pekebun	656	806	1.462
Buruh Harian Lepas	114	87	201
Buruh Tani	3	4	7
Buruh Peternakan	2	0	2
Pensiunan	15	0	15
Tukang Jahit	1	1	2

Guru	5	4	9
Dosen	1	0	1
Lurah	1	0	1
Pamong Kalurahan	19	4	23
Bidan	0	2	2
Sopir	3	0	3
Pelajar/Mahasiswa	238	180	418
Mengurus Rumah Tangga	0	238	238
Lainnya	7	4	11
Belum Bekerja	268	237	505
JUMLAH	1.836	1.774	3.610

Sumber: Monografi Kaurahan etir Semester I tahun 2024

Struktur pekerjaan penduduk Kalurahan Petir menunjukkan dominasi pada sektor primer, dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani atau pekebun sebanyak 1.462 jiwa, yang mencakup baik laki-laki (656 jiwa) maupun perempuan (806 jiwa). Kondisi ini mencerminkan ketergantungan ekonomi masyarakat pada sektor agraris, yang rentan terhadap fluktuasi hasil panen dan ketidakpastian iklim.

Sektor informal lainnya juga cukup besar, seperti buruh harian lepas (201 jiwa) dan wiraswasta kecil (292 jiwa), yang menunjukkan potensi kerentanan ekonomi akibat pendapatan tidak tetap. Sementara itu, penduduk yang belum bekerja mencapai 505 jiwa, dan sejumlah 238 perempuan tercatat sebagai ibu rumah tangga, yang meskipun tidak masuk dalam kategori produktif secara ekonomi formal, tetap merupakan bagian penting dari ekonomi domestik dan sosial desa.

Keberadaan pekerja formal seperti PNS (23 jiwa), karyawan swasta (393 jiwa), serta tenaga pendidik (9 guru dan 1 dosen) masih dalam jumlah terbatas. Ini menandakan bahwa akses

terhadap pekerjaan dengan jaminan sosial dan stabilitas ekonomi masih belum merata.

Berdasarkan kelompok usia untuk penduduk Kalurahan Petir usia 60 tahun keatas hampir 30 % dari jumlah penduduk yang ada. Berikut jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia:

Tabel III - 13 Data Penduduk Kalurahan Petir berdasarkan Kelompok Usia

Nomor	Kelompok Usia (tahun)	Jumlah (jiwa)
1	0 – 4	55
2	5 – 9	152
3	10 – 19	419
4	20 – 29	459
5	30 – 44	675
6	45 – 59	807
7	60 tahun keatas	1.043
JUMLAH		3.610

Sumber: Monografi Kaurahan etir Semester I tahun 2024

Kalurahan Petir memiliki struktur usia yang unik dengan proporsi warga lanjut usia (≥ 60 tahun) mencapai 1.043 jiwa, atau sekitar 29% dari total penduduk. Ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga populasi berada dalam kategori non-produktif dan memerlukan perhatian khusus dalam aspek perlindungan sosial, layanan kesehatan, dan partisipasi komunitas yang layak bagi lansia. Kelompok usia produktif (20–59 tahun) mendominasi jumlah penduduk dengan total 1.941 jiwa, atau sekitar 54% dari total populasi. Ini menunjukkan potensi besar dalam kontribusi pembangunan desa, namun perlu didukung dengan akses pekerjaan yang layak, pelatihan keterampilan, dan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu, kelompok usia anak

dan remaja (0–19 tahun) berjumlah 626 jiwa (sekitar 17%). Jumlah ini relatif kecil dibanding kelompok usia lanjut, sehingga menunjukkan arah transisi demografi desa yang mengarah ke penuaan penduduk (*aging population*). Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menjadi tantangan serius jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang inklusif, seperti pelayanan lansia berbasis komunitas dan regenerasi tenaga kerja produktif melalui pendidikan dan pemberdayaan pemuda.

f. Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Kalurahan Petir sebagai upaya menciptakan generasi cerdas adalah Sekolah Dasar berjumlah 2 unit, Taman Kanak-kanak sebanyak 3 unit, PAUD sebanyak 4 unit dan 1 unit perpustakaan Kalurahan. Tingkat pendidikan masyarakat Kalurahan Petir dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III - 14 Jenjang Pendidikan Masyarakat Kalurahan Petir

Jenjang Sekolah	Jumlah (Jiwa)
Taman Kanak-kanak	672
Sekolah Dasar/Sederajat	1.294
SMP	845
SMA	543
Akademi /D1-D3	63
Sarjana	52
Pascasarjana (S 2)	4
Pascasarjana (S 3)	1
Tidak Bersekolah	672

Sumber : *Monografi Kalurahan Petir Tahun 2019*

Fasilitas pendidikan formal di Kalurahan Petir meliputi 2 unit Sekolah Dasar, 3 unit Taman Kanak-kanak, 4 unit PAUD, dan 1 unit perpustakaan kalurahan. Ketersediaan ini menunjukkan

komitmen dasar desa dalam menyediakan akses pendidikan awal. Namun, kapasitas layanan tersebut perlu dibandingkan dengan jumlah penduduk untuk melihat apakah telah menjangkau seluruh usia sekolah secara proporsional. Dari sisi capaian pendidikan masyarakat, sebagian besar penduduk menempuh pendidikan hingga jenjang SD (1.294 jiwa) dan SMP (845 jiwa). Sementara itu, jenjang pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan penurunan signifikan: hanya 543 jiwa lulusan SMA, 63 lulusan D1–D3, 52 sarjana, 4 lulusan S2, dan 1 orang dengan pendidikan S3. Yang cukup mencolok adalah data penduduk yang tidak bersekolah, yakni 672 jiwa — jumlah ini sama besar dengan jumlah anak usia TK, yang bisa jadi merepresentasikan kelompok usia muda atau warga usia dewasa/lansia yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kalurahan Petir masih menghadapi tantangan kesenjangan akses dan keberlanjutan pendidikan, khususnya pada jenjang menengah ke atas.

g. Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kalurahan Petir terdiri dari 1 Puskesmas Pembantu, 1 buah Polindes, dan 13 Posyandu balita dan Lansia di tiap padukuhan. Selain itu, juga terdapat Pos Pembinaan Terpadu di 6 padukuhan. Dan didukung dengan tenaga kesehatan seorang bidang Kalurahan, Kader Kalurahan Siaga sebanyak 20 orang, Kader Kesehatan sebanyak 66 orang di 13 Padukuhan, Kades Posyandu sebanyak 66 orang di 13 Padukuhan, Kader Kampung KB sebanyak 22 orang, Kader

Pembangunan Manusia (KPM) berjumlah 2 orang, serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 5 orang.

Jumlah kader yang besar ini menandakan adanya partisipasi warga yang tinggi dalam mendukung kesehatan masyarakat. Namun demikian, perlu dipastikan bahwa seluruh kader mendapatkan pendampingan, pelatihan berkelanjutan, serta akses data kesehatan agar dapat menjalankan perannya secara maksimal dan terintegrasi dengan sistem kesehatan desa. Keberadaan layanan terdekat (seperti Polindes dan Posyandu) sangat vital bagi kelompok marjinal, terutama ibu hamil, balita gizi rentan, penyandang disabilitas, serta lansia yang tidak memiliki akses mobilitas luas.

h. Agama

Penduduk Kalurahan Petir menganut agama Islam, Agama Kristen, dan Agama Khatolik. Penganut Agama Islam merupakan penduduk mayoritas. Sarana peribadatan yang berada di wilayah Kalurahan Petir berupa Masjid sebanyak 15 unit, Mushola 2 unit, Gereja Kristen 2 unit, dan Kapel 1 unit.

Data penduduk berdasarkan Agama dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III - 15 Data Penduduk Kalurahan Petir Berdasarkan Agama

Agama	Jumlah (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Islam	1.727	1.672	3.399
Kristen	88	76	164
Katholik	21	26	47
Hindu	-	-	-
Budha	-	-	-

Konghucu	-	-	-
Aliran Kepercayaan	-	-	-
JUMLAH	1.836	1.774	3.610

Sumber: Monografi Kaurahan etir Semester I tahun 2024

Infrastruktur keagamaan dengan ketersediaan tempat ibadah mencerminkan adanya akomodasi ruang ibadah bagi kelompok minoritas yang menjadi salah satu indikator awal keberagaman yang inklusif meskipun pengakuan kelompok agama minoritas tidak cukup berhenti pada aspek fisik dan administratif. Untuk itu perlu ada kepastian seluruh kelompok memiliki akses yang adil terhadap partisipasi sosial serta tidak mengalami diskriminasi dalam pelayanan publik maupun interaksi sosial.

i. Keadaan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kaurahan Petir masih bertumpu pada sektor pertanian dalam arti luas (pertanian, perkebunan, hutan rakyat, peternakan, dan kelautan). Sektor lain seperti industri kecil dan perdagangan diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi. Pemanfaatan lahan terluas berupa tegalan pertanian 3.250 m² dan berupa hutan/lainnya seluas 5.098.283 m².

Kondisi kesejahteraan keluarga di Kalurahan Petir sebagian besar merupakan keluarga miskin yakni mencapai sekitar 36 % dari jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada. Adapun jumlah penduduk berdasarkan tingkat kesejahtraannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III - 16 Data Penduduk Kalurahan Petir berdasarkan
Tingkat Kesejahteraan

Nomor	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah (KK)	%
1	Keluarga Miskin	445	36
2	Pra Keluarga Sejahtera (PKS)	398	32
3	Keluarga Sejahtera I (KS I)	243	30
4	Keluarga Sejahtera II (KS II)	148	12
JUMLAH		1.234	100

Sumber: Monografi Kaurahan etir Semester I tahun 2024

Ketergantungan yang besar pada sumber daya alam menjadikan perekonomian desa sangat rentan terhadap gangguan eksternal seperti perubahan iklim, gagal panen, maupun fluktuasi harga komoditas. Hampir 68% keluarga di Kalurahan Petir berada pada taraf kesejahteraan rendah hingga belum sejahtera. Hal ini dapat menandakan masih perlunya intervensi ekonomi yang lebih tajam, terarah, dan berbasis data dengan kelompok keluarga miskin dan pra sejahtera sebagai target prioritas dalam program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan akses layanan dasar.

Sementara itu untuk jumlah penduduk berdasarkan usia tenaga kerja yakni dalam rentang usia 15 tahun sampai dengan 69 tahun cukup besar, yakni mencapai 2.669 orang. Adapun data penduduk berdasarkan usia tenaga kerja adalah sebagai berikut:

Tabel III - 17 Data Penduduk Kalurahan Petir berdasarkan
Usia Tenaga Kerja

Nomor	Kelompok Usia (tahun)	Jumlah (jiwa)
1	15 – 19	207
2	20 – 24	221
3	25 – 34	466
4	35 – 49	690
5	50 – 59	564
6	60 – 69	521
7	70 tahun keatas	520
JUMLAH		3.189

Sumber: Monografi Kaurahan etir Semester I tahun 2024

Jumlah penduduk dalam usia kerja (15–69 tahun) mencapai 2.669 jiwa dari total 3.610 penduduk. Ini berarti lebih dari 73% penduduk desa berada pada usia produktif, yang dapat menjadi aset penting dalam pembangunan ekonomi lokal jika dikelola secara tepat. Kelompok usia terbanyak berada pada rentang 35–49 tahun (690 jiwa), disusul oleh 25–34 tahun (466 jiwa), dan 50–59 tahun (564 jiwa). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja berada pada tahap dewasa produktif, dengan pengalaman kerja yang relatif mapan, namun juga mulai mendekati masa transisi menuju usia nonproduktif. Kelompok usia muda (15–24 tahun) berjumlah 428 jiwa, yang merupakan potensi regenerasi tenaga kerja, namun pada saat bersamaan juga berisiko menjadi pengangguran muda jika tidak tersedia akses pendidikan vokasi, pelatihan kerja, atau lapangan kerja lokal yang relevan. Menariknya, kelompok usia 60–69 tahun masih tercatat sebagai bagian dari tenaga kerja dengan jumlah 521 jiwa, menandakan bahwa banyak lansia masih aktif secara

ekonomi, baik di sektor informal maupun pertanian keluarga. Hal ini perlu ditinjau dari dua sisi: sebagai potensi ekonomi berbasis pengalaman, dan sekaligus indikasi beban kerja lansia akibat ketiadaan sistem perlindungan sosial. Kelompok 70 tahun ke atas, meski secara teknis masuk kategori nonproduktif, tetap berjumlah tinggi (520 jiwa), sehingga penting untuk dikaji secara sosiologis terkait ketergantungan ekonomi antar generasi dan akses layanan lansia dalam kerangka pembangunan desa yang berkeadilan.

j. Pemerintahan Kalurahan Petir

Struktur pemerintahan Kalurahan Petir menunjukkan adanya sistem kelembagaan yang cukup lengkap, terdiri dari unsur pemerintah kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal). Komposisi ini menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan fungsi pelayanan publik, pengambilan keputusan lokal, dan pelibatan warga dalam proses pembangunan. Berikut struktur organisasi pemerintahan Kalurahan Petir:

Tabel III - 15 Lurah dan Pamong Kalurahan Petir

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Sarju, S.I.P	Lurah	S 1
2	Tomi Wibow, S.I.P	Carik	S 1
3	Tulus Budiarta, S.Pd	Jagabaya	S 1
4	Ermasari, S.I.P	Ulu-Ulu	S 1
5	Pratama Windarta, S.E	Kamituwa	S 1
6	Dheni Sunarwan, S.E	Kaur Danarta	S 1
7	Budi Iswanto, S.P	Kaur Tatalaksana	S 1
8	Oki Isdianto, S.E	Kaus Pangripta	S 1
9	Suparyanta	Staf Pamong	Paket C
10	Herlina	Staf Pamong	SMK

11	Reni Liana, S.A.P	Staf Pamong	S 1
12	Panijo	Dukuh Petir A	Paket B
13	Warsina	Dukuh Petir B	SMP
14	Sulasti	Dkuh Petir C	SMA
15	Susanta	Dukuh Ngelo	SMA
16	Sumardi	Dukuh Ploso	Paket C
17	Rusmiyanto, S.Sos	Dukuh Ngurak Urak	S 1
18	Margiyanta	Dukuh Watumengkurep	SMA
19	Antoro	Dukuh Dadapan	SMA
20	Wasiran	Dukuh Weru	SMP
21	Alip Sutarmaji	Dukuh Siyono A	SMK
22	Ismuko, S.Sos	Dukuh Siyono B	S 1
23	Akbar Pamungkas	Dukuh Siyono C	SMK
24	Arif Marsudianto	Dukuh Dagangmati	SMA

Sumber: Perkal Petir Nomor 6 / 2024 tentang RKPK Tahun 2025

Pada tingkat pemerintahan, Kalurahan Petir dipimpin oleh Lurah berpendidikan S1, dengan seluruh jabatan struktural utama (Carik, Jagabaya, Kamituwa, Kaur-Kaur) juga diisi oleh pamong lulusan perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan kapasitas literasi administratif dan profesional yang relatif tinggi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Namun, pada tingkat dukuh (kepala wilayah padukuhan), variasi tingkat pendidikan cukup mencolok. Beberapa dukuh masih berlatar pendidikan SMP atau paket B/C, yang menunjukkan masih terdapat kesenjangan kapasitas kelembagaan di tingkat tapak. Untuk menguatkan pembangunan inklusif, penting bagi pemerintah desa memberikan ruang peningkatan kapasitas rutin dan akses informasi yang setara bagi para dukuh agar proses pengambilan keputusan di tingkat padukuhan tidak tertinggal.

Tabel III - 16 Badan Permusyawaratan Kalurahan

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Saelan, S.Pd	Ketua	S 1
2	Sumadi, S.Pd	Wakil Ketua	S 1
3	Erlina Rusmiyantini, S.Pd	Sekretaris	S 1
4	Iswandi, S.I.P	Kabid Pemerintahan	S 1
5	Marsija	Kabid Pembangunan	
6	Rakimin	Anggota	
	Sutarno	Anggota	
	Agus Padmana	Anggota	
	Supriyanto	Anggota	

Sumber: Perkal Petir Nomor 6 / 2024 tentang RKPK Tahun 2025

Struktur Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) juga relatif solid, dengan pimpinan dan sebagian besar anggota memiliki latar belakang pendidikan S1. Ini menjadi potensi penting untuk menjalankan fungsi kontrol, aspirasi, dan musyawarah secara akuntabel. Dari perspektif inklusif, penting untuk mencermati bahwa partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan masih terbatas (meskipun ada beberapa staf perempuan), dan pelibatan kelompok muda atau penyandang disabilitas dalam struktur formal.

D. Gambaran Inklusi Sosial Kalurahan Ngipak dan Kalurahan Petir

1. Dimensi Demografi dan Kelompok Rentan

Kalurahan Ngipak memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.641 jiwa, dengan 52% perempuan dan kelompok anak-anak (0–14 tahun) sebesar 16%, serta lansia 15%. Sebaliknya, Kalurahan Petir dihuni oleh 3.610 jiwa, dengan proporsi lansia sangat tinggi mencapai 28,9%, menandakan beban perlindungan sosial yang lebih berat. Kondisi ini mencerminkan bahwa Ngipak perlu memperkuat layanan dasar bagi anak dan perlindungan lansia, sedangkan Petir perlu fokus pada strategi adaptasi terhadap populasi menua, termasuk intervensi kesehatan komunitas dan integrasi lansia dalam kegiatan produktif.

2. Akses terhadap Pendidikan

Kalurahan Ngipak memiliki 25% penduduk tidak/belum sekolah, dan hanya 4,6% lulusan pendidikan tinggi. Sedangkan di Kalurahan Petir mencatat 18,6% tidak sekolah dan jumlah sarjana kurang dari 2%. Ini menunjukkan bahwa kedua desa menghadapi tantangan besar dalam literasi pendidikan yang dapat berdampak pada eksklusi informasi, rendahnya partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, serta keterbatasan mobilitas sosial.

3. Pekerjaan dan Partisipasi Ekonomi

Pekerjaan di kedua desa masih didominasi oleh sektor informal dan pertanian. Di Kalurahan Ngipak sekitar 28,5% sebagai petani, dan 18,9% belum bekerja. Sedangkan di Kalurahan Petir sekitar 40,5% petani/pekebun, dengan 14% belum bekerja. Di Petir, jumlah petani perempuan justru lebih banyak

dari laki-laki, yang mengindikasikan adanya beban kerja ganda tanpa perlindungan tenaga kerja memadai. Dalam konteks inklusi, ini mengharuskan adanya afirmasi terhadap pekerja informal dan kelompok perempuan dalam pengembangan ekonomi desa.

4. Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Kedua desa memiliki Posyandu aktif di tiap padukuhan, namun Kalurahan Ngipak masih mencatat 18 balita gizi buruk (10,7%), meski cakupan imunisasi telah 100% dan Kalurahan Petir memiliki lebih banyak kader dan tim kesehatan komunitas (66 kader kesehatan, 22 kader kampung KB, 5 TPK), namun tidak disertai data gizi balita. Perlu diakui, ketersediaan infrastruktur belum menjamin akses setara, terutama bagi balita dari keluarga miskin dan penyandang disabilitas yang tidak tercatat.

5. Keberagaman dan Kehidupan Sosial

Ngipak dan Petir sama-sama plural dalam keagamaan, Kalurahan Ngipak: Islam (96,1%), Kristen dan Katolik sisanya. Kalurahan Petir: Islam (94,1%), Kristen (4,5%), Katolik (1,3%). Namun hanya Petir yang memiliki sarana ibadah lintas agama secara representatif. Ini menandakan pentingnya penguatan ruang dialog antar kelompok dan menjamin hak beragama sebagai bagian dari inklusi sosial berbasis keberagaman.

6. Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial

Ngipak mencatat penurunan kemiskinan dari 960 KK (2022) menjadi 896 KK (2024) atau 69% KK masih miskin. Petir lebih baik secara persentase, dengan 36% KK tergolong miskin, namun 68% KK masih rentan secara ekonomi (miskin + pra sejahtera). Hal ini menunjukkan bahwa basis ketahanan sosial-

ekonomi warga masih lemah, terutama di tengah keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak dan perlindungan sosial jangka panjang.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Inovasi Pendamping sekolah lapang dalam Mewujudkan Desa Inklusif

Dalam kerangka pembangunan desa inklusif, kehadiran Pendamping sekolah lapang Desa Inklusif (SLDI) bukan hanya sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai aktor perubahan sosial yang mampu membaca kompleksitas sosial, terutama eksklusi terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, ODGJ, lansia, dan perempuan kepala keluarga.

Berikut adalah bentuk-bentuk inovasi yang ditemukan di lapangan beserta interpretasi teoretiknya:

1. Strategi Jemput Bola sebagai Inovasi Sosial Pendamping

Dalam implementasi Sekolah Lapang Desa Inklusif (SLDI), salah satu temuan paling menonjol adalah munculnya strategi jemput bola yang dilakukan oleh pendamping sebagai respons terhadap rendahnya partisipasi kelompok rentan dalam forum-forum pembangunan desa. Pendekatan ini dilakukan secara aktif dan personal oleh pendamping dengan cara mendatangi langsung rumah warga yang selama ini tidak hadir atau bahkan tidak terdeteksi dalam struktur data formal desa. Kelompok ini mencakup penyandang disabilitas, ODGJ, lansia, perempuan kepala keluarga, dan warga miskin ekstrem yang tersembunyi secara administratif maupun sosial.

Salah satu pendamping menyatakan:

“Kami tidak menunggu mereka datang. Kalau ditunggu, mereka tidak akan pernah muncul di forum. Jadi kami yang awalnya mendatangi ke rumahnya.” (SL1, Petir, 17 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari prosedur normatif menuju aksi yang berbasis kedekatan sosial. Strategi ini bukan hanya menyasar aspek partisipasi teknis, melainkan membangun relasi sosial yang memungkinkan kelompok marginal merasa dilihat dan diakui keberadaannya.

Pendamping tidak hanya melakukan pendekatan persuasif melalui kunjungan informal, tetapi juga mengambil peran aktif dalam memfasilitasi kebutuhan administratif dasar, seperti pembuatan KTP, KK, dan pendaftaran BPJS. Seorang pendamping mengungkapkan:

“Kalau kita tidak bantu, mereka tidak akan pernah punya KTP. Padahal itu syarat semua bantuan.” (SL1, Petir, 17 Mei 2025)

Temuan ini memperlihatkan bahwa pendamping menjalankan peran melebihi tugas teknis yang tertera dalam desain program. Mereka secara aktif mengintervensi hambatan struktural yang selama ini menghalangi warga rentan untuk mengakses hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. Pendekatan ini dilakukan tidak melalui mekanisme top-down, melainkan melalui relasi sosial yang lentur, humanis, dan penuh empati.

Strategi jemput bola dapat dimaknai sebagai bentuk inovasi sosial yang muncul dari pembacaan kritis atas realitas eksklusi sosial di tingkat komunitas. Inovasi ini bukan hasil dari instruksi institusional atau kerangka proyek, melainkan lahir dari praktik reflektif dan kedekatan emosional pendamping terhadap warga. Dalam hal ini, inovasi tidak hadir sebagai produk teknologi atau

sistem digital, tetapi sebagai tindakan sosial yang berdampak konkret dalam membuka akses dan partisipasi kelompok rentan.

Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa partisipasi yang bermakna tidak dapat dibentuk hanya dengan membuka ruang secara formal. Kelompok rentan tidak serta merta hadir hanya karena diundang, melainkan harus didekati secara personal, diberikan rasa aman, dan dibantu dalam mengatasi hambatan administratif maupun psikososial.

Temuan tersebut sejalan dengan gagasan inovasi sosial kontekstual seperti dikemukakan oleh Mulgan (2006), yang menyatakan bahwa inovasi sosial yang berdampak besar, seringkali muncul dari respons terhadap kebutuhan nyata yang belum terpenuhi oleh sistem formal. Dalam konteks ini, pendamping SLDI bertindak sebagai aktor inovatif yang merancang solusi melalui empati dan keberpihakan, bukan melalui formula prosedural.

Lebih lanjut, pendekatan ini dapat dianalisis melalui model adopsi inovasi dari Everett Rogers (1983), yang melibatkan lima tahap: pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Strategi jemput bola yang dilakukan pendamping sebenarnya mengikuti pola ini, meskipun tidak secara formal. Pengetahuan diperoleh dari pembacaan sosial lapangan, persuasi dilakukan melalui pendekatan personal, keputusan diambil berdasarkan refleksi kontekstual, implementasi dijalankan dalam bentuk kunjungan dan fasilitasi, dan konfirmasi terjadi saat warga mulai terlibat dan mengakses layanan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya seperti Susanti (2022) dan Rivaldi (2021) yang lebih menyoroti aspek partisipasi umum serta peningkatan kapasitas warga secara luas, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan relasional dan empatik dalam menjangkau warga yang selama ini terpinggirkan.

Pendekatan jemput bola juga mencerminkan sikap kritis terhadap pendekatan pembangunan yang bersifat top-down. Dalam praktiknya, pendamping menciptakan sendiri jalur-jalur akses non-formal yang justru lebih efektif dalam menjembatani hubungan antara negara dan kelompok warga yang paling tertinggal.

Dari penelitian ini bahwa keberhasilan pembangunan desa yang inklusif sangat ditentukan oleh kapasitas pendamping sebagai agen perubahan yang mampu menerjemahkan nilai-nilai global ke dalam tindakan nyata dan kontekstual. Pendamping dengan kepekaan sosial dan kemampuan reflektif terbukti mampu meretas jalan bagi kelompok paling marjinal agar tidak hanya hadir, tetapi turut menentukan arah pembangunan yang berkeadilan. Strategi ini dapat dibaca sebagai wujud nyata implementasi prinsip *No One Left Behind* dalam skala lokal, yang menjadikan warga tak terlihat menjadi bagian dari prioritas pembangunan.

2. Integrasi Nilai Inklusif dalam Budaya Lokal: Inovasi Kultural Pendamping sebagai Jalan Lain Menuju Kesetaraan

Di tengah perhelatan sosial desa yang sarat tradisi, di mana ritus seperti *pasrah manten*, *selamatan*, dan *tahlilan* menjadi denyut kehidupan komunitas, para pendamping sekolah lapang justru melihat ruang-ruang tersebut sebagai peluang. Bukan untuk sekedar hadir atau

berbasa-basi, melainkan untuk memasukan nilai-nilai inklusi yang menyentuh akar budaya warga.

Dalam wawancara mendalam, salah satu pendamping menceritakan pengalamannya:

“Kami menggunakan tradisi yang sudah ada, misal acara manten, atau tahlilan, digunakan untuk menyampaikan informasi atau materi tentang inklusi.” (Koordinator SL 2, Ngipak)

Ucapan itu tidak hanya menggambarkan strategi komunikasi, melainkan menunjukkan keberanian untuk membangun inovasi sosial yang kultural, bukan konfrontatif. Pendamping tidak mengintervensi dengan pendekatan formal, tetapi melebur dalam ruang yang akrab bagi warga. Di balik kegiatan budaya itu, mereka menyisipkan informasi, membangun relasi, dan menyemai nilai kesetaraan yang selama ini jauh dari ruang tradisi.

Di Desa Ngipak, inovasi ini bahkan berkembang menjadi strategi ekonomi dan identitas kultural.

“Kegiatan desa inklusi lebih ke budaya, yakni bahasa Jawa, yang nantinya bisa sebagai pusat budaya dan dapat membantu ekonomi warga.” (Koordinator SL 2, Ngipak)

Pernyataan ini menunjukkan bagaimana inovasi inklusif tidak berhenti pada domain sosial, tetapi menjelma menjadi gerakan budaya yang produktif secara ekonomi. Bahasa lokal, tradisi, dan ekspresi sosial warga tidak lagi menjadi penghambat, tetapi menjadi kendaraan bagi transformasi sosial.

Dari temuan tersebut, terlihat jelas bahwa pendamping tidak memaksa masyarakat menerima gagasan inklusi dengan pendekatan normatif, melainkan membangun ruang transmisi nilai melalui

saluran budaya yang sudah hidup. Strategi ini menghindari resistensi, karena tidak mengubah ritus yang ada, tetapi memperkaya maknanya.

Praktik ini dapat dimaknai sebagai bentuk inovasi sosial berbasis kultural, yaitu inovasi yang memanfaatkan kekuatan simbolik dan relasional dari budaya lokal sebagai medium perubahan sosial. Menurut Velaques (2014), inovasi semacam ini memiliki daya tembus yang tinggi karena mengakomodasi struktur makna yang telah tertanam dalam komunitas. Nilai baru, dalam hal ini inklusi social, tidak diinjeksikan dari luar, tetapi ditanamkan di dalam ruang yang familiar, melalui narasi, kebiasaan, dan ritus yang dimiliki masyarakat sendiri.

Strategi ini juga sejalan dengan pedagogi pembebasan dari Freire (1970), yang menekankan bahwa perubahan sosial hanya bisa terjadi bila aktor-aktor lokal mampu membaca dunia mereka sendiri. Pendamping bukan bertindak sebagai pengajar dari luar, tetapi sebagai bagian dari komunitas yang turut menyemai kesadaran baru dalam konteks yang akrab. Ketika ajakan untuk menyekolahkan anak disabilitas disisipkan dalam tahlilan, atau ketika informasi tentang forum desa disampaikan saat hajatan, itulah saat di mana inklusi berjalan di atas jembatan budaya. Lebih dari itu, pendekatan kultural ini juga menyentuh aspek interseksionalitas dalam praktik pendampingan.

Inovasi pendamping melalui integrasi nilai inklusif dalam budaya lokal bukan sekadar cara menyampaikan pesan, tetapi sebuah strategi transformatif yang mengubah makna praktik sosial desa itu sendiri. Tradisi yang dulu steril dari nilai kesetaraan kini menjadi

ruang baru bagi kesadaran inklusi tumbuh, tidak dengan paksaan, tetapi dengan penerimaan yang tulus.

Inilah bentuk inovasi sosial kultural yang mampu menjangkau ruang-ruang sunyi di mana kelompok rentan selama ini tidak terlihat. Dalam logika ini, pembangunan desa inklusif bukan hanya tentang anggaran, data, atau forum, tetapi tentang menggeser cara pandang kolektif masyarakat terhadap siapa yang layak diikuti. Dan jika inklusi bisa berakar dalam ruang *selamatan* atau *tahlilan*, maka itu artinya perubahan sosial sudah menemukan jalannya yang paling membumi.

Inilah yang membedakan pendekatan ini dari studi seperti Faizal (2018) yang menitikberatkan pada pemberdayaan berbasis potensi lokal namun belum mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan sosial ke dalam kerangka budaya, atau Sonny (2023) yang membahas komunikasi efektif tanpa menyentuh medium kultural sebagai jalur penyampaian nilai. Pendekatan yang ditemukan dalam penelitian ini jauh lebih halus dan strategis, memanfaatkan struktur makna yang telah tertanam dalam komunitas sebagai media perubahan sosial.

Menggunakan kerangka inovasi sosial berbasis kultural (Velaques, 2014), serta pendekatan pedagogi pembebasan dari Freire (1970), strategi ini mencerminkan bentuk pendidikan kritis yang terjadi di dalam ruang komunitas itu sendiri. Pendamping tidak bertindak sebagai penyuluh luar, melainkan sebagai bagian dari warga yang bersama-sama membaca, memahami, dan menyemai nilai baru dalam ritual yang selama ini dianggap steril dari pesan-pesan kesetaraan. Lebih dari itu, integrasi nilai inklusif ke dalam praktik budaya lokal juga membuka peluang transformasi ekonomi dan

identitas kultural desa. Seperti yang ditemukan di Kalurahan Ngipak, kegiatan budaya yang inklusif justru menjadi pintu masuk untuk mengembangkan pusat budaya berbasis bahasa Jawa, yang potensial menjadi kekuatan ekonomi lokal. Hal ini membedakan penelitian ini dari studi-studi sebelumnya yang belum melihat keterkaitan antara inklusivitas, budaya, dan penghidupan secara bersamaan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan inklusif dapat berjalan melalui jalur budaya, bukan hanya birokrasi. Perubahan cara pandang masyarakat terhadap siapa yang layak dilibatkan dalam pembangunan bisa dimulai dari ruang-ruang yang mereka anggap akrab, bukan asing. Pendekatan ini tidak mengubah tradisi, melainkan memberi makna baru yang lebih adil dan setara, sebuah strategi inovatif yang senyap namun menggugah.

3. Fasilitasi Administratif dan Layanan Dasar: Inovasi Etis Pendamping dalam Menyeberangkan Hak ke Warga Terpinggirkan

Bagi banyak orang, memiliki KTP, kartu keluarga, BPJS, atau akta kelahiran mungkin adalah hal sepele. Namun bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas psikososial, atau warga miskin ekstrem, dokumen semacam itu ibarat pintu gerbang menuju pengakuan sebagai warga negara. Di sinilah pendamping sekolah lapang desa inklusif menghadirkan inovasi etis dalam bentuk pendampingan administratif dan layanan dasar.

Praktik ini tergambar jelas dalam pernyataan salah satu informan:

“Kami fasilitasi langsung, bahkan kadang jemput ke rumah, urus BPJS, ikutkan forum kesehatan mental di Puskesmas.”
(Pengurus SL Petir)

Kutipan ini mengandung makna yang jauh melampaui deskripsi teknis. Ia menunjukkan bahwa pendamping tidak membiarkan sistem berjalan sendiri dan berharap kelompok rentan mampu menyesuaikan diri, melainkan justru mengintervensi ketimpangan administratif secara aktif dan penuh kepedulian. Pendamping mengambil peran sebagai *penyeberang hak*—mereka mengantar warga dari dunia eksklusif menuju ruang formal pelayanan publik.

Hal senada diungkap oleh informan lain:

“Pernah kita bantu dengan menghadirkan Dinas Dukcapil untuk rekam KTP” (Pendamping SL)

Kalimat ini menggambarkan bahwa masalah administratif bukan sekadar soal kelalaian teknis, tetapi refleksi dari ketimpangan struktural. Banyak warga dengan kondisi disabilitas atau gangguan jiwa hidup dalam *invisibilitas administrative*, tidak tercatat dalam sistem, tidak punya akses, dan akibatnya tidak bisa menuntut hak. Dalam konteks ini, tindakan pendamping bukan hanya membantu, tetapi memulihkan eksistensi warga sebagai subjek hukum dan sosial.

Inovasi pendamping terletak pada cara mereka membongkar hambatan birokrasi melalui pendekatan personal. Mereka tidak menunggu inisiatif warga, tetapi hadir sebagai agen katalis yang menyederhanakan prosedur dan merawat relasi sosial. Pendamping mengantarkan akses langsung ke dinas kependudukan, puskesmas, dan instansi terkait jaminan sosial.

Inovasi ini merefleksikan gagasan *capability approach* dari Amartya Sen (1999), yang menekankan bahwa keadilan harus dilihat bukan dari apa yang diberikan negara, melainkan apa yang sungguh-

benar-benar bisa diakses dan dilakukan oleh warga. Memiliki hak formal belum tentu berarti memiliki kemampuan riil. Ketika pendamping menguruskan BPJS untuk seorang psikososial yang tidak punya KTP, mereka sedang mengubah hak potensial menjadi kapabilitas nyata.

Lebih jauh, tindakan ini juga dapat dimaknai melalui prinsip keadilan *difference principle* dari John Rawls (1971) bahwa ketimpangan sistemik hanya dapat dibenarkan jika hasilnya menguntungkan kelompok paling tertinggal. Maka, fasilitasi administrasi bukan hanya tindakan kasuistik, melainkan bentuk konkret dari redistribusi akses dan pengakuan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Dalam logika inovasi sosial, seperti yang dijelaskan oleh Mulgan (2006), langkah-langkah kecil seperti ini menjadi bermakna karena mereka mengubah struktur relasi antara warga dan sistem layanan. Pendamping menjadi jembatan yang mempertemukan realitas desa dengan sistem negara, dan melakukannya dengan empati, kegigihan, dan improvisasi.

Berbeda dari penelitian seperti Rakhmadi dkk. (2022) yang lebih fokus pada evaluasi teknis kinerja pendamping, penelitian ini menyoroti dimensi keadilan distributif dan rekognisi sosial dalam kerja-kerja pendampingan. Di titik inilah konsep *capability approach* dari Amartya Sen (1999) menjadi relevan, pendamping tidak hanya membantu warga memiliki hak, tetapi juga memastikan mereka mampu menjalankan hak itu secara nyata.

Lebih jauh, strategi ini juga bersinggungan dengan *difference principle* oleh John Rawls (1971), bahwa upaya yang dilakukan harus berpihak pada mereka yang paling tertinggal. Maka, tindakan

pendamping menjadi lebih dari sekadar bantuan, ia adalah gestur etis-politik yang menggerus tembok eksklusif. Pendamping menjadi agen penghubung antara sistem layanan publik yang sering kali rumit dengan warga desa yang tak terbaca oleh data dan tak terjangkau secara formal.

4. Penguatan Ekonomi dan Pemberdayaan Keluarga Rentan: Inovasi Pendamping dalam Merekonstruksi Peran Sosial melalui Produktivitas

Pada beberapa kegiatan pelatihan yang difasilitasi oleh Pendamping sekolah lapang seorang ibu dari keluarga penyandang disabilitas dapat menjual produknya sebagai tambahan penghasilan atau sumber ekonomi. Bukan sebagai penerima bantuan, tapi sebagai pelaku ekonomi. Momen itu tidak hanya menjadi peristiwa ekonomi, melainkan peristiwa sosial yang penting karena, seperti diungkap oleh seorang pendamping:

“Setelah kita adakan pelatihan, hasil mereka dijual untuk tambahan penghasilan. Ini mengubah cara pandang warga terhadap mereka.” (Pendamping SL3, Petir)

Pernyataan ini menggambarkan bagaimana inovasi pendamping menggeser posisi kelompok rentan dari objek belas kasihan menjadi subjek yang diakui dan dihargai. Pendamping tidak hanya memberikan akses pelatihan keterampilan, tetapi juga menciptakan ruang untuk rekognisi sosial, bahwa warga marginal pun mampu produktif, kreatif, dan berkontribusi dalam perekonomian lokal.

Inovasi ini tidak muncul dari pendekatan programatik semata, melainkan dari keberanian pendamping membaca potensi di tengah keterbatasan. Di desa, tempat kerja informal menjadi tumpuan hidup,

dan pendamping melihat peluang untuk menguatkan kapasitas kelompok rentan agar tidak semata bertahan, tetapi tumbuh dengan identitas ekonomi yang bermartabat.

Tidak hanya pelatihan, pendamping juga memberikan pemahaman keluarga penyintas ODGJ untuk mengelola usaha kecil berbasis rumah tangga, seperti budidaya tanaman pekarangan, produksi makanan ringan. Semua dilakukan dengan pendekatan bertahap dan penuh pendampingan.

“Kami cari yang bisa mereka lakukan, tidak memaksakan. Kadang ya cuma ngurus tanaman, menanam tanaman obat keluarga atau sayuran dalam pot. Tapi itu penting agar mereka punya aktivitas, merasa berguna.” (Pendamping SL2, 11 Juni 2025)

Kutipan ini menunjukkan bahwa inovasi ekonomi tidak harus selalu besar dan spektakuler. Justru, dalam konteks kelompok rentan, langkah kecil yang sesuai kapasitas menjadi sangat bermakna. Ini adalah bentuk pendekatan ekonomi inklusif kontekstual di mana produktivitas tidak diukur dari omset, tetapi dari tumbuhnya kreatifitas yang dapat menumbuhkan harga diri, semangat, dan posisi sosial baru.

Hal ini sejalan dengan gagasan ekonomi sebagai instrumen rekognisi sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Nancy Fraser (2003) yaitu bahwa keadilan sosial tidak hanya membutuhkan distribusi ekonomi, tetapi juga pengakuan terhadap identitas dan peran sosial seseorang. Ketika keluarga ODGJ bisa menjual hasil karyanya atau sekedar mendapat hasil dari menanam sayuran sendiri, mereka sedang mengalami momen *recognition*, bukan sekadar *charity*.

Lebih lanjut, pendekatan ini senada dengan prinsip *capability approach* Amartya Sen (1999), yang menekankan bahwa pembangunan yang adil bukan hanya tentang memberi peluang, tetapi tentang membuat orang mampu menjalani kehidupan yang mereka nilai bermakna. Aktivitas ekonomi yang disesuaikan dengan kapasitas warga rentan adalah bentuk nyata dari membangun *capabilities*, bukan sekadar menyalurkan bantuan.

Inovasi ini juga menanggapi teori pemberdayaan komunitas ala Robert Chambers (1997), yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan sejati harus dimulai dari *local knowledge* dan *real need*, bukan dari intervensi luar yang tidak peka. Pendamping yang mengajak keluarga marginal untuk mengelola produksi sederhana telah menyatukan *dignity*, *skill*, dan *visibility* dalam satu ruang inklusi ekonomi.

Penelitian ini memperlihatkan bagaimana Pendamping sekolah lapang tidak hanya memfasilitasi keterampilan ekonomi, tetapi juga merekonstruksi relasi sosial antara masyarakat dan kelompok rentan. Melalui berbagai aktivitas pelatihan, menanam, hingga usaha kecil rumahan, pendamping membuka jalur baru bagi warga marginal untuk tampil bukan sebagai penerima belas kasih, melainkan sebagai pelaku ekonomi yang dihargai.

5. TOT dan Rotasi Pembelajaran Inklusif: Inovasi Kelembagaan untuk Menebar Pengetahuan

Dalam semangat inklusi, pengetahuan tidak boleh dimonopoli oleh segelintir elite atau diproduksi hanya dari pusat. Pendamping sekolah lapang memahami prinsip ini dan melahirkan satu inovasi

penting, *Training of Trainers* (TOT) dan rotasi pembelajaran antar desa.

Inovasi ini bermula dari kesadaran bahwa kelompok rentan tidak cukup hanya dijangkau, mereka harus diposisikan sebagai bagian dari proses belajar kolektif. Bukan sebagai objek pelatihan semata, tetapi sebagai pelaku, fasilitator, bahkan penyebar nilai-nilai inklusi. Pendamping mendorong warga marginal menjadi aktor dalam siklus pembelajaran.

“Setiap bulan ada kelas pembelajaran dari desa ke desa.”
(Koordinator Pendamping, 18 Mei 2025)

“Kita benar-benar konsen dalam membentuk kegiatan. Karena sasarannya kelompok marjinal, perempuan, dan disabilitas.”
(Pendamping SL 3, 11 Juni 2025)

Model rotasi ini tidak hanya efektif memperluas jangkauan pembelajaran, tapi juga membentuk ekosistem pengetahuan horizontal antar komunitas. Setiap desa dapat menyampaikan praktik baiknya, menyerap inspirasi dari yang lain, dan menumbuhkan jejaring solidaritas sosial.

Di sisi lain, pelaksanaan TOT tidak hanya menyasar pengurus SLDI, tetapi juga melibatkan langsung perwakilan kelompok rentan sebagai peserta aktif. Mereka dilatih untuk berbicara di depan publik, menyampaikan gagasan dalam forum pra Musrenbangdes, dan mengadvokasi kebutuhan mereka sendiri.

“TOT itu tidak hanya untuk perangkat, tapi juga buat teman-teman dari kelompok disabilitas dan perempuan. Mereka belajar ngomong, menyampaikan pendapat.” (Pendamping SL2, 9 Juni 2025)

Apa yang dilakukan para pendamping ini menunjukkan pergeseran mendalam dalam pendekatan pembangunan, dari model mendidik masyarakat menjadi belajar bersama masyarakat. Inilah bentuk inovasi kelembagaan dan pedagogis yang tumbuh dari bawah.

Model rotasi pembelajaran dan TOT ini sejalan dengan teori pedagogi kritis Paulo Freire (1970) dalam *Pedagogy of the Oppressed*. Freire menekankan pentingnya pendidikan yang membebaskan—yaitu ketika subjek belajar diberi ruang untuk mengartikulasikan pengalaman dan membangun kesadarannya sendiri melalui dialog, bukan ceramah satu arah.

Pendamping SLDI telah menerapkan prinsip ini secara kontekstual. Dalam forum-forum rotasi dan pelatihan, kelompok rentan bukan hanya hadir secara fisik, tapi juga hadir secara sosial. Mereka didorong untuk bicara, dilatih untuk menyampaikan pendapat, dan dipercaya sebagai fasilitator, sebuah langkah kecil, tapi sangat transformatif dalam membongkar budaya bisu kelompok marginal.

Selain itu, strategi rotasi dan TOT juga mencerminkan prinsip *distributed learning* dan *horizontal knowledge-sharing* dalam inovasi sosial kelembagaan. Menurut Van de Ven (2022), inovasi kelembagaan sejati terjadi ketika pengetahuan tidak hanya dikuasai oleh satu pusat, tetapi dibagi, disebar, dan dikembangkan dalam jaringan interaksi sosial.

Inilah yang terjadi dalam Sekolah Lapang Desa Inklusif, pengetahuan tentang inklusi tidak dikendalikan oleh aktor eksternal atau dokumen tertulis, tetapi ditumbuhkan dari praktik, disebar, dan diperkuat oleh relasi sosial antar desa. Ini

sekaligus dapat menciptakan kesinambungan program meski pendamping sudah tidak aktif lagi di lapangan.

Salah satu dimensi inovasi yang paling strategis namun kerap luput dibahas dalam studi-studi sebelumnya adalah inovasi kelembagaan dalam bentuk pelaksanaan *Training of Trainers* (TOT) dan rotasi pembelajaran antar desa. Temuan ini menunjukkan bahwa Pendamping sekolah lapang Desa Inklusif (SLDI) tidak hanya fokus pada intervensi sesaat, tetapi membangun fondasi jangka panjang melalui ekosistem pembelajaran lintas komunitas.

Berbeda dengan studi seperti Okem dkk. (2024) dan Sonny (2023) yang menekankan pentingnya komunikasi solutif antara pendamping dan masyarakat, penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi saja tidak cukup, pengetahuan harus dibagi, didemokratisasikan, dan direproduksi secara sosial oleh warga itu sendiri. Pendamping SLDI menjadikan kelompok rentan bukan sebagai penerima pelatihan, tetapi fasilitator dan penggerak nilai inklusi.

Lebih jauh, inovasi ini juga mencerminkan prinsip *distributed learning & horizontal innovation* sebagaimana dijelaskan oleh Van de Ven (2022). Bahwa pengetahuan dan praktik baik tidak boleh dimonopoli oleh elite desa, LSM, atau pendamping, tetapi harus berputar, tumbuh, dan dimiliki oleh warga sendiri.

Bahwa inovasi kelembagaan berbasis inklusi tidak selalu lahir dari kebijakan formal, tetapi dari keberanian membalik arah pembelajaran, dari pusat ke pinggir, dari elite ke rakyat, dari instruktur ke warga. TOT dan rotasi bukan hanya metode pembelajaran/pelatihan, tetapi cara baru menata struktur kuasa

pengetahuan di desa, agar inklusi tidak menjadi jargon, melainkan kesadaran yang hidup di kepala dan hati warga.

6. Pemanfaatan Teknologi dan Evaluasi Digital: Inovasi Pendamping dalam Menyambungkan Kemanusiaan dengan Sistem

Di tengah keterbatasan infrastruktur dan kapasitas digital desa, Pendamping sekolah lapang Desa Inklusif (SLDI) tetap mencari celah untuk memperkuat praktik inklusi dengan sentuhan teknologi yang sederhana namun berdampak. Bukan dalam bentuk sistem informasi yang kompleks, melainkan melalui inovasi mikro, pelaporan digital, pre dan post test daring, serta dokumentasi kegiatan.

“Kita harus punya laporan kegiatan dalam bentuk aplikasi... pre dan post test.” (Koordinator Pendamping, 18 Mei 2025)

Dalam praktiknya, beberapa pendamping menggunakan *Google Form*, *WhatsApp Group*, *spreadsheet online*, dan dokumen digital untuk menilai perubahan perilaku peserta, mencatat kegiatan sekolah lapang, serta membuat pelaporan.

Menariknya adalah inovasi ini tidak lahir dari proyek digitalisasi besar-besaran, tetapi dari kebutuhan untuk menciptakan sistem pembelajaran yang bisa direplikasi dan ditingkatkan. Misalnya, setelah pelatihan *public speaking* untuk kelompok rentan, pendamping mengisi formulir evaluasi bersama peserta untuk mengukur perubahan pengetahuan diri mereka.

Pendekatan ini juga membantu pendamping memastikan adanya akuntabilitas terhadap kegiatan, sekaligus menciptakan jejak digital pembelajaran yang bisa diakses lintas waktu dan tempat.

Sebagai hasilnya, nilai-nilai inklusi tidak hanya menjadi praktik sesaat, tapi bisa terdokumentasi dan ditelusuri kembali.

“Kami simpan semua dokumentasi kegiatan, dari foto, catatan, sampai evaluasi, di folder Google Drive dan kita kirim sebagai laporan setiap bulan.” (Pendamping SL3, 11 Juni 2025)

Dalam kacamata teori inovasi sosial, teknologi bukanlah tujuan, melainkan alat bantu untuk memperkuat proses perubahan sosial. Seperti ditegaskan oleh Geoff Mulgan (2006), teknologi baru menjadi *inovasi sosial* ketika digunakan untuk menyelesaikan masalah publik dengan cara yang inklusif, adaptif, dan berdampak sistemik.

Hal ini juga sejalan dengan gagasan Peter Drucker (2023) tentang “*smart innovation*” inovasi yang tidak harus spektakuler, tetapi mampu menjembatani cara kerja lama menuju sistem yang lebih reflektif dan berbasis data. Teknologi di sini menjadi *alat monitoring progresif*, bukan sebagai pemaksaan sistem asing.

Lebih jauh lagi, praktik ini mencerminkan prinsip *evidence-based practice* dalam pembangunan, bahwa setiap perubahan sosial harus memiliki jejak yang bisa diuji, ditinjau ulang, dan dijadikan pijakan kebijakan. Dengan pelaporan digital, pendamping membuka ruang untuk evaluasi kolektif dan transparansi progresif.

Pemanfaatan teknologi oleh pendamping SLDI menunjukkan bahwa inovasi sosial tidak harus analog atau digital sepenuhnya, melainkan hibrida yakni menyatukan kedekatan sosial dan sistem dokumentasi yang akurat. Dalam konteks desa dengan jaringan internet yang terbatas dan kapasitas digital yang bervariasi, pendekatan ini sangat kontekstual dan cerdas.

Berbeda dengan studi Rakhmadi dkk. (2022) yang menilai kinerja pendamping secara kuantitatif melalui indikator teknis, penelitian ini menunjukkan bahwa indikator keberhasilan inklusi tidak cukup dinilai dari angka, tetapi harus ditopang oleh dokumentasi sosial yang berbasis data lapangan. Teknologi dipakai bukan untuk menggantikan relasi sosial, tetapi menopang kesinambungan relasi, memudahkan evaluasi, dan menciptakan transparansi progresif.

Dari temuan ini, teknologi dipakai oleh pendamping untuk mendokumentasikan cerita, perubahan perilaku, dan capaian warga rentan, maka inklusi menjadi bukan sekadar narasi, tetapi realita yang bisa diuji, diteruskan, dan ditingkatkan. Teknologi dalam konteks ini bukan sekadar alat bantu administratif, melainkan jembatan kemanusiaan yang memungkinkan nilai-nilai inklusi tidak hilang bersama waktu, tetapi terdokumentasi, terbaca, dan diperjuangkan kembali.

7. Koordinasi Lintas Sektor dan Legitimasi Formal: Inovasi Pendamping Menyemai Inklusi dalam Struktur Desa

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bagaimana para pendamping SLDI tidak membiarkan program inklusi berakhir sebagai inisiatif temporer. Mereka dengan sengaja mendorong agar nilai-nilai dan struktur inklusif diinstitusionalisasikan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa, forum kolaboratif lintas lembaga, serta sinkronisasi data kelompok rentan.

“Sudah di-SK-kan oleh kepala desa... agar pengurus bisa lanjut meski kami tidak mendampingi.” (Pendamping SL 3, 11 Juni 2025)

SK atau Surat Keputusan Kepala Desa bukan hanya produk administrasi, melainkan bentuk legitimasi formal yang sangat penting. Melalui SK, keberadaan Sekolah Lapang dan pengurusnya tidak lagi tergantung pada proyek atau pendamping, tetapi menjadi bagian dari sistem kelembagaan desa. Bahkan, beberapa desa telah menetapkan pengurus SLDI sebagai mitra resmi pemerintah desa dalam perencanaan dan pendataan kelompok rentan.

Langkah ini dibarengi dengan inisiatif membentuk forum koordinasi lintas sektor yang melibatkan puskesmas, pendamping PKH, pekerja sosial, dan Dinas terkait. Tujuannya bukan hanya berbagi tugas, tetapi menyatukan data dan visi, agar kelompok rentan tidak mengalami tumpang tindih intervensi atau malah terlewatkan sama sekali.

“Kami duduk bersama PKH, BPJS, puskesmas, dan pengurus desa inklusi. Kita samakan data, jadi tidak saling abaikan.”
(Koordinator Pendamping, 18 Mei 2025)

Langkah ini adalah inovasi strategis yang membuktikan bahwa infrastruktur sosial tidak cukup tanpa dukungan struktural. Pendamping menyadari bahwa tanpa legitimasi dan kolaborasi antar sektor, program sebaik apa pun akan berhenti ketika pendamping tidak ada.

Apa yang dilakukan oleh pendamping ini dapat dibaca melalui kerangka kelembagaan inovasi sosial Van de Ven (2022) bahwa inovasi tidak cukup hanya bersifat individual dan temporer, tetapi harus mampu masuk ke dalam jaringan formal dan sistem tata kelola.

Legitimasi melalui SK dan kolaborasi adalah bentuk dari institusionalisasi nilai-nilai inklusi, yang menjamin bahwa program tidak hanya hidup karena orangnya, tetapi karena sistemnya. Dengan

kata lain, pendamping sedang menggeser nilai inklusi dari domain afeksi dan praksis lapangan, ke domain hukum dan kelembagaan desa.

Langkah ini juga sejalan dengan pendekatan *governance kolaboratif* (Ansell & Gash, 2007), yang menekankan bahwa keberhasilan kebijakan publik yang kompleks seperti inklusi social terjadi bila ada kerjasama antarpelaku, kepercayaan antar institusi, dan tujuan yang dibangun secara bersama. Pendamping yang mempertemukan berbagai unsur telah menciptakan ruang kolaboratif antar aktor desa yang tidak selalu bertemu secara alami.

Inovasi dalam bentuk ini bukan lagi sekadar upaya penjangkauan, tetapi perjuangan agar inklusi tidak hanya berjalan, tapi juga hidup dan bertahan. Sebab yang paling rentan seringkali tidak hanya sulit dijangkau oleh program, tetapi juga mudah dilupakan oleh sistem. Dengan legitimasi formal dan kerja lintas sektor, pendamping telah meletakkan pondasi sistemik yang memungkinkan inklusi tetap tumbuh, bahkan saat para pendamping sudah tiada. Dan di situlah makna paling dalam dari inovasi social, bukan soal siapa yang memulai, tapi seberapa kuat sistem yang ditinggalkan.

Salah satu turning point penting dari inovasi pendamping SLDI adalah kemampuannya menggeser kerja-kerja inklusi dari sekadar praktik sosial menjadi bagian dari sistem formal pemerintahan desa. Temuan ini menampilkan wajah pendamping bukan lagi sebagai penggerak akar rumput semata, tetapi sebagai arsitek sosial kelembagaan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya seperti Wijayanti (2021) atau Ahmad (2020) yang menekankan pada pentingnya partisipasi warga dan musyawarah sebagai pilar inklusi, penelitian ini

memperlihatkan bahwa musyawarah saja tidak cukup jika tidak disertai legitimasi formal. Dalam konteks desa, SK Kepala Desa bukan hanya simbol administratif, tapi merupakan jaminan eksistensi kelembagaan yang memastikan Sekolah Lapang tetap hidup bahkan setelah pendamping tidak lagi aktif.

Koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai elemen menunjukkan bahwa pembangunan inklusif adalah proyek kolektif, bukan tugas sektoral. Pendamping berperan sebagai *orchestrator* yang menyatukan visi, data, dan aksi dari berbagai aktor yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri. Langkah ini merupakan cerminan langsung dari *governance kolaboratif* sebagaimana dikembangkan oleh Ansell & Gash (2007), di mana keberhasilan kebijakan inklusif sangat ditentukan oleh kesediaan para aktor untuk berbagi peran dan membangun kepercayaan. Dari perspektif Van de Ven (2022), langkah pendamping juga memenuhi syarat dari sebuah *institutionalized innovation* yaitu ketika sebuah ide sosial tidak berhenti sebagai inisiatif individu, melainkan menjadi bagian dari jaringan tata kelola formal yang mengatur keberlanjutan praktik tersebut secara struktural.

Keberlanjutan inklusi tidak akan mungkin terjadi bila hanya bergantung pada karisma individu atau kebaikan hati pendamping. Diperlukan kerja sistematis untuk melembagakan nilai-nilai inklusi ke dalam struktur, regulasi, dan sistem desa itu sendiri. Dalam hal ini, inovasi pendamping bukan hanya menjangkau warga, tetapi juga menjangkau sistem dan bahkan merekonstruksi ulang sistem agar inklusi tidak sebatas wacana. Pendamping telah membuktikan bahwa pendekatan humanis dan kelembagaan bukanlah dua hal yang

berseberangan, melainkan dua sisi dari kerja inklusi yang utuh. Ketika SK dikeluarkan, forum lintas sektor disepakati, dan data kelompok rentan disinkronkan, maka pendamping telah menyemai sistem yang bisa hidup lebih lama dari dirinya sendiri, dan itulah bentuk tertinggi dari inovasi sosial yang bukan hanya mengubah hari ini, tetapi juga menyiapkan fondasi untuk hari esok.

B. Strategi Pendamping sekolah lapang dalam Pemberdayaan dan Penjangkauan Kelompok Rentan

1. Pemetaan dan Penjangkauan Kelompok Rentan

Pendamping memulai proses pemetaan kelompok rentan dengan memanfaatkan data resmi dari pemerintah desa. Langkah ini menunjukkan pendekatan adaptif, di mana sumber data administratif tidak ditolak, tetapi diintegrasikan sebagai titik awal. Seperti disampaikan oleh Koordinator Pendamping:

“Kami melakukan pemetaan dengan menggunakan data dari Pemerintah Kalurahan yang ada, mereka yang memiliki data warganya. Kita juga gunakan data tersebut.” (Koordinator Pendamping, 8 Mei 2025)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pendamping memiliki fleksibilitas epistemik, yakni kesediaan untuk membaca data formal sebagai bagian dari peta awal, bukan sebagai representasi mutlak atas realitas sosial. Strategi ini mencerminkan pendekatan *participatory mapping* (Chambers, 1994), di mana aktor lokal tidak hanya menggunakan data yang tersedia, tetapi secara aktif menafsirkannya dalam konteks keseharian warga.

Namun demikian, pendamping tidak bergantung sepenuhnya pada data resmi. Mereka mengembangkan metode identifikasi sosial berbasis relasi dan pengamatan informal:

“Yang kita data bukan hanya difabel yang kelihatan secara fisik, tapi juga yang ‘tak kelihatan’, seperti ODGJ, lansia, atau ibu tunggal yang kesulitan ekonomi.” (Koordinator SL Petir, 27 Mei 2025)

Pendamping melakukan proses identifikasi sosial yaitu metode mengenali warga rentan bukan hanya dari kategori formal seperti status miskin atau disabilitas fisik, tapi melalui cerita warga, dan pengamatan atas pola keseharian.

“Kadang kita temukan bukan dari forum, tapi dari cerita tetangga. Misal, ada anak muda yang sudah lama tidak keluar rumah, ternyata mengalami gangguan jiwa.” (Koordinator SL Petir, 27 Mei 2025)

Temuan ini mengungkap bahwa pendamping menjadikan jejaring sosial informal sebagai kanal utama untuk mendeteksi keberadaan kelompok rentan yang tak terdata. Mereka tidak menunggu laporan resmi atau musyawarah formal, tetapi aktif mendengarkan cerita warga dan menangkap sinyal sosial dari kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, informasi yang muncul dari warung, tetangga, dan lingkaran obrolan menjadi alat deteksi dini sosial yang sangat efektif.

Di sinilah peran modal sosial menjadi sangat vital, sebagaimana dijelaskan oleh Robert Putnam (1993). Pendamping membangun dan memanfaatkan jaringan kepercayaan dan hubungan timbal balik di masyarakat untuk memperoleh informasi yang lebih tajam dan mendalam. Bukan sekadar ‘siapa’, tetapi juga ‘mengapa mereka tidak tampak’ di ruang publik.

Secara praksis, pendekatan ini juga menunjukkan nuansa pedagogi pembebasan dari Paulo Freire (1970). Dalam konteks ini, proses penggalan informasi bukan dilakukan secara vertikal atau

instruksional, melainkan melalui dialog yang egaliter—di mana warga bukan sekadar objek data, tetapi subjek sosial yang diakui pengetahuannya. Cerita tetangga menjadi sumber kebenaran sosial yang kadang justru lebih jujur daripada data formal. Selain itu, strategi ini sejalan dengan pendekatan “*participatory mapping*” dalam teori pembangunan partisipatif (Chambers, 1994), di mana warga dan pelaku lokal menjadi pelacak dan pemetaan utama atas ketertinggalan sosial. Dalam hal ini, pendamping bukan hanya mencatat, tetapi memetakan secara kolektif siapa yang tersembunyi dari radar formal pembangunan.

Kerja pemetaan yang dilakukan pendamping ini merupakan proses aktif menggabungkan sumber pengetahuan formal dan lokal, administratif dan sosial, birokratis dan afektif. Ini sejalan dengan pendekatan local governance (UNDP, 2016) yang menekankan pentingnya partisipasi dan inklusi dalam seluruh tahapan pembangunan serta integrasi antara sistem pemerintahan desa dan partisipasi warga.

Berbeda dengan penelitian terdahulu seperti Rahmawati (2020) atau Surahman (2021) yang menjadikan data desa dan forum resmi sebagai acuan utama, penelitian ini memperlihatkan inovasi praksis pemetaan partisipatif yang berbasis kepekaan sosial dan relasi horizontal. Pendamping membangun daftar kelompok rentan tidak dari kantor, tetapi dari jalan setapak, obrolan warung, dan sapa lirin di beranda rumah. Mereka tidak mengandalkan laporan tertulis, tetapi pada “penglihatan sosial” sebuah kemampuan membaca tanda-tanda keterasingan di tengah keramaian.

Langkah ini menjadi sangat penting karena ia menyentuh inti dari teori interseksionalitas (Crenshaw, 1989) bahwa seseorang tidak hanya rentan karena satu identitas (misalnya disabilitas), tapi karena irisan dari banyak dimensi: miskin, perempuan, lansia, tak berdokumen. Dengan kata lain, satu nama dalam daftar bisa membawa seluruh lapisan luka struktural yang tak terlihat di spreadsheet manapun.

Lebih lanjut, pendekatan ini sejalan dengan semangat participatory mapping dari Chambers (1994), di mana peta sosial tidak dibuat oleh institusi, tetapi oleh warga sendiri. Pendamping bertindak sebagai fasilitator yang mengajak warga membaca ulang desanya, tidak hanya dari segi fisik atau ekonomi, tetapi dari siapa yang “tidak hadir” baik dalam forum maupun dalam ingatan kolektif pembangunan.

Penjangkauan kelompok rentan bukan sekadar tahap awal program, melainkan tindakan politik yang menentukan siapa yang diakui sebagai warga. Dalam kerja pendamping, siapa yang dilihat adalah siapa yang diperjuangkan. Pemetaan inklusif menjadi alat untuk membongkar hierarki penglihatan dalam birokrasi di mana yang tampak mendapat bantuan, dan yang tersembunyi tetap tertinggal. Dalam logika ini, pemetaan bukan kerja teknis, tetapi kerja etis dan afektif. Ia menyatukan dimensi mikro (sapa, tatap, dengar) dengan dimensi makro (pengakuan negara, akses layanan). Pendamping tidak mengandalkan sensus, tetapi merawat sensitivitas sosial.

2. Membangun Kepercayaan dan Relasi Sosial

Dalam konteks pemberdayaan kelompok rentan di desa, kepercayaan menjadi prasyarat yang sangat penting sebelum partisipasi dapat terwujud secara bermakna.

“Keluarga penderita gangguan jiwa awalnya mereka tidak mau bicara kepada kami. Tapi ketika kami sering datang, berusaha ngobrol santai, lama-lama mereka mulai terbuka.”
(Pendamping SL1 Petir, 27 Mei 2025)

Pernyataan ini mencerminkan bahwa kerja pendamping SLDI bukan sekadar menjalankan prosedur pendataan, melainkan melakukan proses manusiawi dengan membangun relasi sosial melalui kehadiran. Mereka menyadari bahwa warga dengan latar belakang keluarga yang memiliki kerentanan psikososial dengan anggota keluarga ODGJ tidak serta-merta dapat dijangkau dan terlibat dalam forum warga, sehingga yang dibutuhkan terlebih dahulu adalah rasa aman dan kepercayaan.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pedagogi dialogis Paulo Freire (1970), bahwa pembebasan hanya bisa dicapai melalui dialog antara manusia, bukan melalui intervensi teknokratis. Ketika pendamping tidak datang sebagai petugas atau "penolong", tetapi sebagai sesama manusia yang hadir, maka disinilah proses relasi yang membebaskan sedang berlangsung. Pada suasana informal dan santai tersebut warga merasa dihargai, bukan disurvei.

Secara sosiologis, tindakan ini juga merefleksikan pembangunan modal sosial berbasis kepercayaan sebagaimana dijelaskan oleh Putnam (1993). Relasi yang dibangun secara konsisten akan menciptakan norma timbal balik yang pada akhirnya membuka ruang partisipasi. Dalam konteks inklusi sosial, pendekatan semacam

ini sangat krusial karena warga rentan seringkali terisolasi, bukan hanya karena kondisi fisik atau ekonomi, tetapi karena isolasi sosial yang berlapis dan berakar dari pengalaman ditolak yang kemudian malu.

“Biasanya kami tidak langsung mengajak ke forum, tapi mulai dari kunjungan, kadang menawarkan untuk mengantar ke puskesmas, bantu ambil obat, atau bantu urus dokumen. Itu membuat mereka percaya dan mulai terbuka.” (Koordinator SL Petir, 27 Mei 2025)

Strategi yang dijelaskan di sini adalah wujud nyata dari pemberdayaan berbasis relasi personal. Pendamping tidak menggunakan pendekatan formal untuk menarik partisipasi warga rentan, tetapi memulainya dari hal-hal sederhana dan praktis, seperti mengantar ke puskesmas atau membantu administrasi dokumen. Dalam tindakan-tindakan itu, terkandung pesan kuat bahwa "Anda penting, dan kami hadir untuk membantu, bukan memerintah."

Kondisi ini merefleksikan pendekatan pemberdayaan komunitas seperti yang disampaikan Chambers dan Adams (2006), yang menekankan pentingnya proses “menghampiri warga” dalam konteks keseharian mereka, bukan menarik mereka ke ranah formal yang kadang menakutkan atau asing. Keterbukaan warga tidak muncul karena diajak ke forum resmi, tapi karena merasakan keberpihakan nyata dalam tindakan pendamping.

Lebih jauh, ini juga memperlihatkan dimensi *governance* yang adaptif, sebagaimana ditawarkan oleh pendekatan *local governance* dari UNDP (2016). Ketika aktor pembangunan lokal (pendamping) mengambil peran aktif dalam menjembatani warga dengan sistem layanan, maka yang terbentuk bukan hanya kepercayaan, tapi juga

efisiensi tata kelola. Pendekatan berbasis empati ini menjadi pengganti dari kelemahan birokrasi formal dalam menjangkau warga yang termarjinalkan.

“Kami bentuk kelompok diskusi kecil pada kegiatan kelas sekolah lapang. Di forum kelompok kecil itu mereka merasa lebih nyaman untuk berbicara. Forum besar kadang membuat mereka pasif.”

(Pendamping SL 3, 11 Juni 2025).

Kutipan ini menunjukkan bahwa pendamping sangat peka terhadap dinamika psikologis dan sosial warga rentan. Mereka tidak serta-merta memaksa partisipasi dalam forum besar yang cenderung kaku dan didominasi oleh elite desa, melainkan menciptakan ruang aman dalam bentuk diskusi kelompok kecil. Forum kecil bukan sekadar soal skala, melainkan strategi untuk menciptakan suasana yang mendukung keberanian berbicara dan keterbukaan.

Strategi ini sangat erat dengan prinsip Paulo Freire (1970) dalam *Pedagogy of the Oppressed*, di mana partisipasi yang sejati hanya mungkin muncul dalam ruang yang dialogis, setara, dan bebas dari tekanan hierarki. Pendamping dengan sadar membentuk ruang alternatif, sebagai bentuk pembangkangan kultural terhadap forum-forum dominan yang selama ini tidak ramah terhadap suara warga marjinal.

Lebih dari itu, forum kecil ini juga merupakan bentuk penguatan modal sosial horizontal, yaitu membangun solidaritas sesama warga rentan melalui cerita dan pengalaman bersama. Dalam forum inilah, bukan dalam forum Musrenbang, warga saling belajar, membangun empati, dan menyadari bahwa mereka tidak sendiri dan mampu bersuara tentang dirinya.

Salah satu kontribusi paling signifikan dari temuan ini adalah penekanan bahwa inklusi sosial tidak dimulai dari undangan menghadiri forum, tetapi dari pengalaman dasar manusia, rasa aman dan relasi yang empatik. Pendamping sekolah lapang inklusi telah menunjukkan bahwa partisipasi kelompok rentan tidak bisa dibangun di atas ketakutan, keraguan, dan sejarah eksklusi sosial. Ia hanya tumbuh di atas pondasi kepercayaan yang dibangun perlahan dan personal.

Berbeda dengan studi terdahulu seperti Suryadi (2018) atau Haryono (2019) yang mengukur partisipasi dari jumlah kehadiran dalam forum desa atau modul pelatihan, penelitian ini memperlihatkan pendekatan yang lebih dalam, relasi sosial sebagai prasyarat, bukan sekadar indikator. Pendamping tidak langsung mengajak warga rentan untuk “aktif,” tetapi terlebih dulu menemani, mendengarkan, dan menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Strategi seperti ini memperlihatkan pengaruh kuat dari teori dialog Paulo Freire (1970) bahwa kesadaran tidak bisa dipaksakan, ia tumbuh dari proses berbagi pengalaman secara setara. Dialog dalam konteks ini bukan hanya komunikasi verbal, tetapi gestur solidaritas, mengantar ke puskesmas, membantu urus dokumen, atau sekadar menyimak keluh kesah. Kepercayaan yang dibangun menjadi bentuk dari modal sosial (Putnam, 1993) yang bukan hanya menghubungkan warga rentan dengan pendamping, tetapi juga dengan diri mereka sendiri, menumbuhkan kembali kepercayaan bahwa mereka layak didengar dan dihargai.

Dari temuan ini diketahui bahwa tanpa membangun kepercayaan, semua partisipasi akan rapuh dan semu. Partisipasi bukan urusan administrasi, tetapi urusan afeksi. Pendamping yang bisa membangun relasi berbasis empati sejatinya sedang menyiapkan ruang politik baru, di mana suara marginal tidak hanya diundang, tetapi merasa punya tempat. Karena itulah, kepercayaan menjadi inovasi sosial paling mendasar. Ia tidak bisa dibeli atau diprogramkan, tapi hanya bisa dibangun lewat komitmen hadir, konsistensi mendengar, dan keberanian untuk tidak tergesa-gesa. Dalam kerja ini, para pendamping telah melangkah lebih jauh dari fasilitator teknis, mereka menjadi penjaga nilai-nilai dasar inklusi yakni bahwa setiap warga, betapapun terluka, tetap pantas untuk disapa dan dipercaya.

3. Kolaborasi dan Pemberdayaan Terintegrasi: Integrasi Pendampingan dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Lintas Sektor

Salah satu ciri menonjol dari praktik Pendamping sekolah lapang Desa Inklusif (SLDI) adalah kemampuannya untuk tidak bekerja secara parsial. Pendamping menyadari bahwa kompleksitas kerentanan tidak bisa ditangani secara tunggal. Oleh karena itu, mereka membangun strategi kolaboratif dengan berbagai pihak, terutama pemerintah desa dan lembaga-lembaga layanan sosial lainnya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendamping aktif menjalin koordinasi dengan unsur pemerintah desa, petugas kesehatan, pendamping PKH, tokoh masyarakat, dan organisasi penyandang disabilitas. Kolaborasi ini menyangkut pelaksanaan

kegiatan bersama, fasilitasi dokumen kependudukan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi keluarga rentan.

“Kami koordinasi dengan PKH dan perangkat desa agar data kelompok rentan tidak tumpang tindih. Kadang kita bantu juga urus ke dinas sosial.” (Pendamping SL Petir, 27 Mei 2025)

“Pengurus SLDI sudah di-SK-kan oleh kepala desa, jadi program bisa lanjut walau kita tidak mendampingi langsung.” (Pendamping SL 3, 11 Juni 2025)

“Kita komunikasi lintas sektor, termasuk dari puskesmas dan BPJS, jadi ketika ada kebutuhan, langsung bisa ditindaklanjuti. Jejaring ini sudah terbentuk sehingga semua bisa segera nyambung.” (Koordinator SL Petir, 27 Mei 2025)

Langkah kolaboratif ini memperkuat posisi SLDI tidak hanya sebagai kegiatan insidental, tetapi sebagai bagian dari sistem pembangunan desa. Bahkan, pengesahan pengurus SLDI dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Desa menjadi legitimasi formal yang memungkinkan keberlanjutan dan integrasi program dalam RKPDes atau Musrenbangdesa.

Analisis

Praktik kolaboratif yang dilakukan pendamping menunjukkan kesadaran strategis bahwa pembangunan inklusif memerlukan dukungan struktural dan sistemik. Kelompok rentan tidak cukup didampingi secara sosial dan psikologis, tetapi juga harus dibukakan akses terhadap layanan formal, kebijakan desa, dan sumber daya yang tersedia. Pendamping mengambil peran sebagai penghubung (*connector*) antaraktor desa. Mereka menghindari pendekatan *soliter* dan justru membentuk jejaring kerja lintas sektor. Ini menjadi langkah penting dalam menghindari fragmentasi data dan tumpang tindih program. Selain itu, kolaborasi juga memperkuat legitimasi sosial dari

program inklusi, karena melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat desa secara bersama-sama.

Integrasi kegiatan ke dalam struktur desa juga menjawab tantangan keberlanjutan. Ketika pengurus SLDI sudah diakui melalui SK resmi, maka kapasitas kelembagaan terbentuk dan dapat terus berjalan meski program eksternal telah selesai. Hal ini menjadi penting agar prinsip inklusi tidak berhenti sebagai inisiatif temporer, melainkan menjadi bagian dari sistem pemerintahan desa itu sendiri.

Strategi kolaboratif yang dikembangkan oleh pendamping sejalan dengan pendekatan *local governance* (Pierre & Peters, 2000) yang menekankan pentingnya tata kelola kolaboratif antara negara, masyarakat sipil, dan aktor lokal lainnya dalam menciptakan pembangunan yang responsif dan berkelanjutan. Pendamping mempraktikkan bentuk pemerintahan yang tidak semata administratif, tetapi kolaboratif dan partisipatif.

Pendekatan ini juga selaras dengan konsep multi-stakeholder engagement dalam pembangunan sosial, sebagaimana ditekankan oleh UNDP (2016), bahwa pencapaian tujuan inklusivitas hanya dapat dilakukan melalui kemitraan antara sektor pemerintah, masyarakat, dan lembaga layanan.

Dari perspektif pemberdayaan komunitas, praktik ini dapat dibaca sebagai bentuk pengarusutamaan (*mainstreaming*) kelompok rentan dalam kebijakan dan program desa. Menurut Narayan (2005), pengarusutamaan adalah langkah lanjut dari pemberdayaan, bukan sekadar meningkatkan kapasitas individu, tetapi mengubah sistem agar lebih inklusif secara struktural.

Hal ini mengoreksi praktik pembangunan berbasis proyek yang masih dominan, yang sering gagal meninggalkan warisan kelembagaan setelah proyek selesai. Temuan penelitian ini justru menegaskan bahwa kekuatan inovasi sosial tidak diukur dari banyaknya kegiatan yang dilakukan, tetapi dari seberapa dalam nilai-nilainya tertanam dalam sistem desa. Implikasi Kritisnya, Transformasi dari model proyek ke model kelembagaan, Mengubah inklusi dari retorika sosial ke kebijakan desa yang dapat diakses dan diukur. Pendamping sebagai penghubung struktur informal (komunitas) dan formal (desa), bukan sekadar pelaku lapangan.

C. Tantangan Pendamping sekolah lapang daam mewujudkan prinsip *No One Left Behind*

Meskipun peran Pendamping sekolah lapang telah terbukti krusial dalam membuka ruang partisipasi kelompok rentan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa mereka menghadapi sejumlah tantangan struktural, kultural, dan teknis yang tidak sederhana. Tantangan-tantangan ini bukan sekadar persoalan operasional, melainkan juga mencerminkan ketidaksiapan sistem desa dalam mengadopsi nilai-nilai pembangunan inklusif secara substantif.

1. Ketimpangan Struktural: Dana, Kapasitas, dan Kekuasaan

Pendamping menghadapi hambatan serius dalam aspek pembiayaan program. Minimnya alokasi anggaran dan ketergantungan pada skema *top-down* membuat banyak rencana aksi tertunda atau bahkan gagal terlaksana. Salah satu pendamping menyampaikan:

“Kami sudah membuat rencana sampai lima-enam kegiatan, tapi hanya dua kegiatan yang terlaksana, karena nggak ada

dana talangan dan walaupun ada tidak ada kepastian diganti.”
(Pendamping SL 2, 9 Juni 2025)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa desain kegiatan yang inklusif sering kali terkendala bukan oleh minimnya inisiatif, melainkan oleh mekanisme pembiayaan yang tidak fleksibel dan tidak sejalan dengan dinamika lokal. Kondisi ini memperlihatkan adanya relasi kuasa yang timpang antara pusat dan desa dalam menentukan arah serta sumber daya pembangunan.

Lebih dari itu, rendahnya kapasitas teknis dan administratif pemerintah desa menambah beban kerja pendamping. Beberapa perangkat desa belum memahami prinsip inklusivitas secara utuh, bahkan terkesan menunda atau menyepelekan proses perencanaan program yang menjangkau kelompok rentan.

“Kadang kami yang menyusun sendiri rencana kegiatannya karena perangkat desanya pasif, sudah banyak kegiatan, untuk template baru tidak ada yang mengerjakan.” (Pendamping SL 3, 11 Juni 2025)

Masalah ini menggambarkan ketimpangan struktural yang bersifat sistemik, di mana distribusi sumber daya dan kapasitas kelembagaan belum memadai untuk mewujudkan prinsip *No One Left Behind*. Ketergantungan terhadap dana pusat dan prosedur birokratis menunjukkan bahwa desa belum memiliki otonomi fiskal dan kelembagaan yang cukup kuat untuk menyokong inisiatif berbasis kebutuhan lokal.

Situasi ini relevan dengan konsep *capability approach* dari Sen (1999), yang menekankan bahwa keadilan substantif harus diukur dari kemampuan riil seseorang untuk memilih dan menjalani hidup yang bernilai. Dalam konteks ini, ketika dana tidak tersedia dan

kapasitas desa rendah, maka kebebasan substantif warga rentan untuk berpartisipasi ikut terbengkalai.

Dari perspektif kekuasaan, Foucault (1977) mengingatkan bahwa kekuasaan modern tidak hanya menindas secara langsung, tetapi juga bekerja melalui sistem administratif dan teknokratis yang tampak “netral” namun menghasilkan eksklusi sistemik. Skema anggaran yang tidak tanggap terhadap kebutuhan kelompok rentan adalah bentuk kekuasaan yang bekerja melalui prosedur.

2. Tantangan Kultural: Minimnya Kesadaran dan Relasi Sosial yang Hirarkis

Di luar tantangan teknis dan struktural, nilai-nilai inklusivitas juga belum terinternalisasi dalam norma sosial desa. Pendamping menghadapi resistensi kultural, baik dari pihak perangkat desa maupun dari warga kelompok rentan sendiri. Salah satu informan menyebut:

“Rata-rata desa pada awalnya memahami sepenuhnya konsep inklusi, ada beberapa perangkat yang masih muda garis besarnya tahu, mungkin lewat berita atau media online.” (Pendamping SL 3, Wawancara, 11 Juni 2025)

Hal ini diperparah dengan sikap pasif dari kelompok rentan itu sendiri, yang tidak jarang merasa tidak percaya diri atau skeptis terhadap perubahan.

“Pesertanya dari ibu-ibu yang terbiasa ke ladang dan seperti ogah-ogahan datang ke forum. Mungkin belum tahu manfaatnya ya” (Pendamping SL 3, 11 Juni 2025)

Minimnya kesadaran kolektif tentang pentingnya inklusi menandakan belum adanya kerangka nilai bersama di tingkat komunitas. Relasi kekuasaan yang masih elitis, di mana pengambilan

keputusan didominasi oleh aktor tertentu, turut mempersempit ruang partisipasi. Kelompok rentan cenderung menjadi objek pembangunan, bukan subjek aktif yang mampu menyuarakan kebutuhan mereka.

Rawls (1971) menekankan bahwa keadilan sosial mensyaratkan adanya akses yang setara terhadap *primary goods*, termasuk hak politik dan partisipasi. Ketika struktur sosial desa tidak menyediakan ruang deliberatif yang adil, maka prinsip keadilan itu gagal diwujudkan. Di sisi lain, Chambers (1997) mengingatkan bahwa partisipasi sejati tidak mungkin terjadi dalam konteks yang hierarkis dan tidak setara.

Masalah partisipasi pasif juga perlu dilihat dari perspektif interseksionalitas (Crenshaw, 1989), yakni bagaimana identitas-identitas sosial seperti gender, usia, kemiskinan, dan disabilitas saling berpotongan menciptakan kerentanan berlapis. Dalam konteks ini, tidak cukup hanya menyediakan ruang formal partisipasi namun perlu strategi yang mempertimbangkan keragaman pengalaman hidup kelompok rentan.

3. Hambatan Teknis: Fasilitas, Digitalisasi, dan Koordinasi

Secara teknis, keterbatasan sarana fisik dan akses digital dirasa menjadi kendala dalam pelibatan warga rentan. Salah satu pendamping mengungkapkan:

“Kelompok ini terkendala pemasaran online.” (Koordinator Pendamping, 18 Mei 2025)

“Kami kalau mau undang mereka yang tuna rungu atau tuna wicara gimana ya, sebab kami tidak bisa komunikasi dan belum ada juru bahasa isyarat di desa,” (Koordinator SL Ngipak, 16 Juli 2025)

“dijemput karena warga tidak ada kendaraan untuk hadir, kemarin itu yang tuna netra,” (Pendamping SL 2, 10 Juli 2025)

Selain itu, infrastruktur dasar seperti aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, moda transportasi untuk jemput bola, serta dukungan alat komunikasi yang layak masih sangat terbatas. Hambatan ini berdampak langsung terhadap efektivitas program pemberdayaan, terutama yang berbasis ekonomi atau pelatihan digital.

Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur mencerminkan kurangnya perhatian terhadap pembangunan yang berkeadilan secara spasial dan fungsional. Di era transformasi digital, kelompok rentan desa justru tertinggal dalam mengakses teknologi dan pasar daring. Hal ini tidak hanya membatasi daya saing mereka, tetapi juga memperluas jurang ketimpangan baru dalam pembangunan.

Dalam perspektif hak asasi manusia, negara dan aparatnya memiliki kewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak warga negara. Ketika akses terhadap layanan dasar dan teknologi tidak tersedia, maka prinsip ini gagal ditegakkan.

Prinsip *Leave No One Behind* (UNDP, 2018) menekankan bahwa pembangunan harus dimulai dari mereka yang paling tertinggal. Dalam hal ini, kegagalan menyediakan fasilitas aksesibilitas dan sarana digital berarti pembangunan belum menjangkau bagian masyarakat yang paling membutuhkan.

Tantangan struktural, kultural, dan teknis yang dialami oleh Pendamping dalam mewujudkan prinsip *No One Left Behind* merefleksikan dinamika pembangunan desa yang jauh lebih kompleks daripada sekadar pelaksanaan program teknis. Dalam konteks ini,

pendamping tidak sekadar berperan sebagai pelaksana administratif, tetapi menjadi agen negosiasi sosial yang bekerja dalam lanskap institusional yang sering kali tidak ramah terhadap perubahan inklusif.

Berbagai penelitian sebelumnya (Okem dkk., 2024; Rivaldi, 2021; Susanti, 2022; Sonny, 2023; Faizal, 2018; Rakhmadi dkk., 2022) memang telah menyoroti pentingnya peran pendamping dalam pembangunan desa, terutama sebagai fasilitator, jembatan komunikasi, dan penggerak partisipasi warga. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut belum mengangkat secara eksplisit bagaimana pendamping menghadapi resistensi struktural dan hambatan kultural dalam menjangkau kelompok rentan. Bahkan, prinsip *No One Left Behind* belum menjadi kerangka utama dalam mengkaji strategi kerja pendamping di desa.

D. Hubungan dengan Prinsip *No One Left Behind*

Tiga tema utama yang menjadi fondasi penelitian ini yaitu inovasi pendamping, strategi menjangkau kelompok rentan, dan tantangan dalam penerapan prinsip *No One Left Behind* (NOLB), pada dasarnya tidak berjalan secara terpisah. Ketiganya saling bersinggungan, saling menguatkan, dan bersama-sama membentuk kerangka utuh dari upaya mewujudkan pembangunan desa yang benar-benar inklusif. Ketiga tema saling menyatu dalam kerangka *No One Left Behind*.

Tema pertama mewujudkan prinsip ini dalam tindakan inovatif; tema kedua menjadikannya arah dan tujuan dari strategi pemberdayaan; tema ketiga menunjukkan risiko dan batas-batas praksisnya, terutama ketika sistem belum mampu menopang konsistensi peran pendamping.

Dalam logika *capability approach* (Sen, 1999), pendamping mendorong warga rentan dari kondisi pasif menjadi subjek yang memiliki kapabilitas. Namun dalam logika *difference principle* (Rawls, 1971),

pendamping sendiri juga harus diperlakukan sebagai bagian dari yang "paling tertinggal" dalam sistem pelaksana pembangunan, jika dukungan struktural terhadap mereka lemah. Di sinilah prinsip *No One Left Behind* harus dibaca secara dua arah, tidak hanya bagi warga tetapi juga bagi para pendamping yang menjadi jembatan antar realitas.

Inovasi, strategi pemberdayaan, dan tantangan pendamping saling bertaut dan tidak dapat dipisahkan. Inovasi menciptakan kemungkinan, strategi menegaskan keberpihakan, dan tantangan menunjukkan risiko riil yang harus dikelola agar inklusi tidak menjadi utopia. Ketiganya bersama-sama menjawab pertanyaan besar dalam pembangunan inklusif: bagaimana menjadikan prinsip *No One Left Behind* tidak hanya sebagai jargon, tetapi sebagai kenyataan yang lahir dari proses sosial yang hidup, reflektif, dan berakar dari bawah. Dengan demikian, kerja pendamping bukan hanya soal program, melainkan perjuangan sosial dan etis yang membutuhkan keberanian, kecerdasan sosial, dan dukungan lintas tingkat. Melalui studi komparatif ini, kita memahami bahwa jalan menuju desa inklusif bukanlah jalan lurus tanpa rintangan—namun jalan berliku yang ditunen oleh kerja kolektif, inovasi yang adaptif, dan semangat yang tak henti-henti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengangkat peran inovasi, strategi, dan tantangan pendamping Sekolah Lapang Desa Inklusif (SLDI) dalam mendorong implementasi prinsip *No One Left Behind* di tingkat desa. Berdasarkan temuan lapangan dan kerangka teori yang telah dibahas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

Pertama, inovasi pendamping SLDI bukan sekadar improvisasi teknis, melainkan sebuah bentuk gerakan sosial yang tumbuh dari empati, keberpihakan, dan pemahaman kontekstual terhadap kerentanan warga desa. Inovasi yang lahir dari pembacaan realitas lokal ini menjangkau berbagai dimensi eksklusi, mulai dari administratif hingga sosial kultural. Pendamping menjadikan ruang-ruang sosial dan tradisi lokal sebagai media transformasi inklusi yang bersifat humanis, etis, pedagogis, digital-adaptif, hingga kelembagaan.

Kedua, strategi pemberdayaan yang digunakan bersifat relasional, kontekstual, dan transformatif. Pendekatan ini menekankan pentingnya relasi sosial dan ruang aman sebagai prasyarat partisipasi warga rentan. Pendamping membangun kepercayaan melalui interaksi informal dan pendampingan personal yang intensif. Selain itu, strategi mereka juga menekankan kerja lintas sektor, integrasi dalam sistem desa, dan mendorong pengarusutamaan inklusi ke dalam dokumen perencanaan dan pengambilan keputusan desa.

Ketiga, tantangan pendamping dalam mengimplementasikan prinsip *No One Left Behind* sangat kompleks dan berlapis, meliputi hambatan struktural (minimnya anggaran fleksibel, kapasitas kelembagaan yang terbatas), hambatan kultural (norma sosial eksklusif, dominasi elite desa, rendahnya literasi inklusi), dan hambatan teknis (aksesibilitas difabel, minimnya dukungan digital, lemahnya koordinasi lintas sektor). Kondisi ini menunjukkan bahwa kerja pendamping berlangsung dalam ruang sosial yang penuh dilema dan membutuhkan daya tahan sosial serta dukungan kebijakan yang kuat.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa kerja pendamping SLDI telah melampaui tugas fasilitasi biasa. Mereka menjadi aktor mikro-politik yang menjembatani kelompok rentan ke ruang pengambilan keputusan desa, sekaligus menantang sistem yang tidak adil melalui kerja-kerja akar rumput yang terstruktur dan berdampak. Prinsip *No One Left Behind* bukan lagi sekadar jargon, tetapi telah dijalankan secara konkret melalui kerja harian pendamping desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan baik untuk penguatan praktik pendampingan, pengembangan kebijakan, maupun arah penelitian selanjutnya:

1. Bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah

- Perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan desa agar inklusi sosial tidak hanya menjadi proyek temporer, melainkan bagian dari sistem kerja desa.
- Penyusunan kebijakan dan perencanaan desa sebaiknya memasukkan prinsip inklusi sebagai norma dasar, bukan pengecualian.

- Dukungan anggaran fleksibel bagi kegiatan partisipatif seperti SLDI sangat penting untuk menjamin keberlanjutan.
2. Bagi Pendamping dan Organisasi Masyarakat Sipil:
 - Pendamping perlu terus mengembangkan pendekatan relasional yang adaptif dan berbasis nilai lokal.
 - Dibutuhkan dokumentasi praktik baik secara sistematis agar inovasi lapangan bisa menjadi rujukan lintas wilayah.
 - Kolaborasi lintas sektor perlu diperkuat, termasuk dengan lembaga layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial.
 3. Bagi Perancang Kebijakan Nasional dan Mitra Pembangunan:
 - Diperlukan skema pendampingan yang menjamin kesinambungan, tidak hanya jangka pendek atau berbasis proyek.
 - Kebijakan nasional tentang desa inklusif perlu menyertakan indikator keberhasilan berbasis partisipasi kelompok rentan, bukan hanya output administratif.
 4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya:
 - Penelitian mendalam perlu dilakukan untuk menggali dinamika internal pendamping, termasuk aspek kelelahan sosial (*social fatigue*) dan strategi bertahan dalam situasi dilematis.
 - Studi perbandingan lintas daerah dapat memperkuat pemahaman tentang praktik inklusi yang efektif dan kontekstual.

Dengan demikian, pembangunan desa inklusif yang menjunjung prinsip *No One Left Behind* membutuhkan perubahan paradigma yang tidak hanya menata ulang kebijakan, tetapi juga menghidupkan kembali relasi sosial, kepemimpinan warga, dan kelembagaan kolaboratif di tingkat desa

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah batasan yang penting untuk dicatat sebagai bagian dari refleksi kritis terhadap proses dan hasil yang diperoleh. Pertama, penelitian ini hanya dilakukan di satu kabupaten dengan cakupan wilayah dan karakteristik demografi tertentu, sehingga temuan yang dihasilkan belum tentu merepresentasikan kondisi utuh di wilayah lain dengan konteks geografis, sosial, dan politik yang berbeda. Keterbatasan ini tentu mempengaruhi generalisasi temuan.

Kedua, pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam memang menghasilkan data yang kaya secara naratif, tetapi pada saat yang sama juga sangat bergantung pada subjektivitas narasumber. Interpretasi dan representasi makna dari pengalaman para pendamping maupun perangkat desa bisa jadi dipengaruhi oleh latar belakang, persepsi, dan posisi mereka dalam konteks sosial tertentu.

Ketiga, keterbatasan waktu penelitian menjadi kendala tersendiri dalam memahami dinamika perubahan jangka panjang dari pendampingan strategi, khususnya dalam hal dampak transformatif terhadap kelompok rentan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdal, 2023. *Teori Pemberdayaan Masyarakat*. Global Ekeskutif Teknologi.
Sumatera Barat. Hal. 23-24
https://repos.dianhusada.ac.id/894/1/BUKU%20DIGITAL%20PEMBERDAYAAN%20MASYARAKATcompressed_compressed.pdf diunduh pada 23 Januari 2025.
- Afdal, A., & Nurhadi, N. (2020). Model penguatan kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan kawasan pedesaan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(2), 101–112. <https://doi.org/10.22219/sospol.v6i2.13864> diunduh pada 23 Januari 2025.
- Afiff, S. A. (2020). Inklusi sosial dan pembangunan desa: Refleksi atas praktik dan strategi kebijakan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 22(1), 33–45.
- Alatas, H. (2000). *Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan*. LP3ES.
- Ali, M. (2014). Teori partisipasi dalam pembangunan masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(2), 122–135.
- Arifin, Z. (2011). *Evaluasi pembelajaran*. Remaja Rosdakarya.
- Association. *Affirmative Action*. <https://directemployers.org/glossary/affirmativeaction/> diunduh pada 10 Januari 2025.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil manusia Kabupaten Gunungkidul 2023*. BPS.

- Bappenas. (2020). *Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2020–2024*. Kementerian PPN/Bappenas. <https://sdgs.bappenas.go.id/> diunduh pada 23 Januari 2025.
- Bappenas. (2019). *Prosiding SDGs Annual Conference 2018: Toward a Prosperous Indonesia* Jakarta. <https://sdgs.bappenas.go.id/product/sdgs-2019/> diunduh pada 23 Januari 2025.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. (2023a). *Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2023*. BPS. <https://gunungkidulkab.bps.go.id/publication/2023/02/28/5250511c0e2626ca301ebd01/kabupaten-gunungkidul-dalam-angka-2023.html> diunduh pada 23 Januari 2025.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. (2023b). *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul 2023*. BPS. <https://gunungkidulkab.bps.go.id/publication/2024/01/17/564ff11dc5a12154b9fdb8d5/indeks-pembangunan-manusia-kabupaten-gunungkidul-2023.html> diunduh pada 23 Januari 2025.
- Berlianto, E. (2018). Strategi komunikasi inklusi sosial di level desa. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 16(2), 147–158.
- Bourdieu, P. (1986). *The Farms of Capital*. In Richardson, J. (Ed.), *Handbook oh the Theory and Research for the Sociology of Education*. Greenwood.

- Cornwall, A., & Coelho, V. S. (2007). *Spaces for change? The politics of citizen participation in new democratic arenas*. Zed Books.
- Bidlle, B.J & Thomas, E.J.(1966). *Role Theory: Concepts and Research*. New York: Wiley.
- Cohen, Bruje J. (2009). *Sociology: An Intrudction*. Macmillan Publishing, 2009.
- Chambers, R. (1995). *Poverty and livelihoods: Whose reality counts?*. Brighton: IDS.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. Intermediate Technology Publications.
- Crenshaw, K. (1989). *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex*. University of Chicago Legal Forum, 1989(1), 139–167.
- Damayanti, R., & Syarifuddin, S. (2020). The inclusiveness of community participation in village development planning in Indonesia. *Development in Practice*, 30(5), 567–578. <https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1764532> diunduh pada 10 Januari 2025.
- David & Turner M. (1990). *Sociology of Development, Theories, Policies and Practices*, Harvester Wheatsheaf. Dalam Karjuni Dt. Maani (2011) hal 57. <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/download/1430/1240> diunduh pada 10 Januari 2025

Departemen Dalam Negeri. (2007). *Pedoman umum pemberdayaan masyarakat*. Depdagri.

Eko, S. (2012). *Desa membangun Indonesia*. Kepel Press.

Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.

Gaventa, J. (2004). Towards participatory governance: Assessing the transformative possibilities. In S. Hickey & G. Mohan (Eds.), *Participation: From tyranny to transformation?* (pp. 25–41). Zed Books.

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Harian Jogja. (2022, December 9). *Ada 6.019 Penyandang Disabilitas di Gunungkidul, Bupati Beri Janji kepada Mereka*. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/12/09/510/1119824/> diunduh pada 23 April 2025

Harian Jogja. (2024, April 9). *Dinsos Gunungkidul Kucurkan 62 Alat Bantu untuk Penyandang Disabilitas*. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/04/09/513/1187106/> diunduh pada 23 April 2025

Harian Jogja. (2024, Agustus 21). *Pemkab Gunungkidul butuh puluhan dokter umum untuk puskesmas*. *Harian Jogja*. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/08/21/513/1185576/pemkab-gunungkidul-butuh-puluhan-dokter-umum-untuk-puskesmas> diunduh pada 23 April 2025

- Hill, H. (2003). The Indonesian economy: New democratic framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193–214.
- Ife, Jim. (2008). *Pembangunan Masyarakat Berbasis Komunitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- IRE Yogyakarta. (2017). *Praktik inklusi sosial di desa: Studi pembelajaran dari program Peduli*. IRE Press.
- Kabeer, N (2000). *Social Exclusion, Poverty and discrimination: Towards an Analytical Framework*. IDS Bulletin, 31(4) 83-97
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). *Pedoman desa inklusi: No one left behind*. Kemendesa PDTT.
- Kordi, M. G. H. (2023). *Desa inklusi*. <https://baktinews.bakti.or.id/> diunduh pada 10 Januari 2025
- Kumparan. (2023, July 29). *Pengertian Inovasi Menurut Para Ahli dan Manfaatnya*. Retrieved from <https://kumparan.com/ragam-info/pengertian-inovasi-menurut-para-ahli-dan-manfaatnya-20cR1esWEZ8>. Dilihat 23 April 2025
- Maani, KD. (2011). *Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Demokrasi Vol. X No. 1 Tahun 2011. <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/download/1430/1240> diunduh pada 10 Januari 2025.
- Manuputty, Feky dan Lussi R Loppies, (2023). Universitas Patimura, Indonesia; *Menuju Desa Inklusi:Perencanaan Pembangunan*

Berkelanjutan untuk desa adat negeri hukurilla di kota ambon, SEMAR Jurnal Sosial dan Pengabdian Masyarakat, E-ISSN: 2987-0755. Vol I Nomor 3 tahun 2023. <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/SEMAR/article/view/453> diunduh pada 8 November 2024

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Mudhoffir, A. M. (2013). Teori kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi sosiologi politik. *Jurnal Sosiologi*, 18(1). <https://scholarhub.ui.ac.id/mjs/vol18/iss1/4/> diunduh pada 10 Januari 2025

Mulgan, G. (2006). *The Process of Social Innovation*. *Innovations: Technology, Governance, Globalization*, 1(2), 145–162. <https://doi.org/10.1162/itgg.2006.1.2.145> diunduh pada 20 April 2025

Narayan, D. (2000). *Voices of the poor: Can anyone hear us?* World Bank.

Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. *Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1(2), [PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Noor | Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan](#), diunduh pada 20 April 2025.

OECD. (2019). *Leaving no one behind: OECD social inclusion indicators*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264311312-en> diunduh pada 26 April 2025

- Okem, K. B., Pangemanan, S., & Nayoan, H. (2024). Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.35797/jp.v13i1.54089> diunduh pada 26 April 2025
- Sugito, Dirjen PDP. 2021. *Handbook Desa Inklusi*. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hal 58. <https://ciptadesa.com/handbook-desa-inklusif/> diunduh pada 10 November 2024
- Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, (2021). *Bahan Bacaan Sekolah lapang Desa Inklusif*. Hal. 22. [https://www.academia.edu/124516377/Sekolah Lapang Desa Inklusif](https://www.academia.edu/124516377/Sekolah_Lapang_Desa_Inklusif) diunduh pada 20 November 2024.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Prasetyo, Y. E. (2018). Pendekatan lokal dalam pembangunan desa inklusif. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 2(1), 13–29.
- Purbantara, arif dan Mujiyanto. (2019). Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan masyarakat Desa. *Pusat Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*. <https://undana.ac.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-Pemberdayaan-Masyarakat-Desa.pdf> diunduh pada 10 November 2024.

- PSPPR UGM, (2023). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*.
<https://psppr.ugm.ac.id/2023/03/17/tujuan-pembangunan-berkelanjutan/> Diunduh tanggal 25 Desember 2024.
- Seknas Fitra, (2016). Mewujudkan Desa Inklusif (perencanaan penganggaran partisipatif pro poor dan responsif gender).<https://seknasfitra.org/wpcontent/uploads/2021/12/38.-Mewujudkan-Desa-Inklusif.pdf> 25 Desember 2024.
- United Nations (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.
<https://sdgs.un.org/2030agenda> diakses pada 23 April 2025
- Pratolo, S., Atmaja, N. R. S., & Sofyani, H. (2020). What Determines Village Autonomy in Indonesia? A Case of Villages in Sleman Regency. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 15–32.
<https://doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15086> diunduh pada 5 Mei 2025
- Prayoga, F. (2025). Memuliakan desa, menguatkan Bangsa.
<https://timesindonesia.co.id/kopi-times/524365/memuliakan-desa-menguatkan-bangsa> diunduh pada 5 Juni 2025
- Rakhmadi, M. A., Bahtiar, B., & Jopang, J. (2022). Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Program Pembangunan Desa Di Kabupaten Kolaka. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 12(2).
<https://doi.org/10.33772/publica.v12i2.12772> diunduh pada 27 April 2025

- Rivaldi, A. (2021). *Optimalisasi Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(2), 241–251. <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.36> diunduh pada 27 April 2025
- Rogers, E. M. (1983). *Diffusion of Innovations* (3rd ed.). New York: Free Press.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Rogers, E. M. (1983). *Diffusion of innovations* (3rd ed.). Free Press.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Sastrawacana. (2022, October 20). *10 pengertian inovasi menurut para ahli*. <https://www.sastrawacana.id/2022/10/pengertian-inovasi-menurut-para-ahli.html> diunduh pada 23 April 2025
- Setiawan, B. (2017). Inklusi sosial dan demokrasi lokal: Studi kasus dari program desa inklusif. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 19(2), 231–246.
- Seknas FITRA. (2016). *Mewujudkan Desa Inklusif: Perencanaan Penganggaran Partisipatif Pro Poor dan Responsif Gender*. <https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2021/12/38.-Mewujudkan-Desa-Inklusif.pdf> diunduh pada 1 Mei 2025
- Stake, R.E. (1995). *The art of case study research*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

- Institut untuk Research and Empowerment (IRE). (2017). *Modul desa inklusif: Mendorong tata kelola desa yang inklusif dan responsif terhadap kelompok rentan dan marginal*. Yogyakarta: IRE. Diunduh pada 20 April 2025
- Sudarmo, S. (2018). Pembangunan desa dan penguatan modal sosial. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 55–67.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2013). *Pembangunan, kemiskinan, dan globalisasi: Mengurai akar masalah dan mencari solusi*. Refika Aditama.
- Suharto, 2019. Pemerintahan Desa dalam Mendukung Keberhasilan Implementasi UU Desa di Jawa Tengah. *Prosiding Seminar Nasional Politik dan Hukum Indonesia (SENASPOLHI)*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2019. https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SENASPOLHI/article/view/2973?utm_source=chatgpt.com diunduh pada 3 April 2025
- Syukri, M. (2018). Kesenjangan pembangunan desa: Mengapa partisipasi belum inklusif? *Policy Brief The SMERU Research Institute*. <https://smeru.or.id/id/publication> Diunduh pada 20 April 2025
- Trisnawati, N., & Lestari, S. D. (2018). Strategi pembangunan desa melalui pendekatan partisipatif. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 9(1), 23–34.

- UNDP Indonesia. (2017). *No one left behind: Advancing social inclusion in Indonesia*. <https://www.undp.org/indonesia/publications/no-one-left-behind> diunduh pada 25 Desember 2024
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. <https://sdgs.un.org/2030agenda> diakses pada 23 April 2025
- Velaques, D. (2014). Justice and Affirmative Action: A Utilitarian Perspective. In J. Newman (Ed.), *Social Justice and Public Policy* (pp. 400–420). Cambridge University Press.
- Van de Ven, A. H. (2022). *The innovation journey: You can't control it but you can learn to navigate it*. Oxford University Press.
- Widianingsih, I., & Morrell, E. (2007). Participatory planning in Indonesia: Seeking a new path to democratic development. *Policy Studies*, 28(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/01442870601121341> diunduh pada 3 Mei 2025
- Widayanti, S. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis*, WELFARE, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2012. [Welfare Vol 1 No1 Januari - Juni 2012 CHAPTER 5.pdf](#) diunduh pada 21 April 2025.
- World Bank. (2016). *Reducing inequality and promoting shared prosperity*. World Bank Publications.
- Wijaya, M., & Samadhi, W. (2020). Desa sebagai subjek pembangunan: Peran aktif dalam otonomi daerah. *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 18(2), 112–124.

- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.
- Young, I. M. (1990). *Justice and the politics of difference*. Princeton University Press.

LAMPIRAN



Lumbung Desa STPM "APMD"
Perpustakaan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Jl. Timoho 317 Gondokusuman Yogyakarta 55225
Email: perpustakaan@gmail.com telp/WA: 0851-7320-3177

TANDA TERIMA CEK PLAGIASI

Tanda terima ini menyatakan bahwa Lumbung Desa Perpustakaan STPM "APMD" telah menerima makalah anda dan telah memeriksanya melalui perangkat lunak Turnitin dengan rangkuman berikut:

Penulis Makalah : TRI ASMIYANTO

Judul Makalah: INOVASI PENDAMPING SEKOLAH LAPANG
DALAM PEMBANGUNAN DESA INKLUSIF DENGAN
PRINSIP NO ONE LEFT BEHIND

Tanggal pemeriksaan: 16 Juli 2025

Persentase plagiasi: 9%



Petugas: Checked By:

Wiji Astuti

